



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 sebagai perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Visi Sulawesi Selatan mandiri, maju, dan berkelanjutan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Misi:
  - a. mewujudkan transformasi sosial;
  - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
  - c. mewujudkan transformasi tata kelola;
  - d. memantapkan keamanan Daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro;
  - e. memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi;
  - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
  - g. mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
  - h. mendorong daya saing Daerah untuk kesinambungan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;

c. permasalahan . . .

- c. permasalahan dan isu strategis;
  - d. Visi dan Misi Daerah;
  - e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
  - f. penutup.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) RPJPD dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7-225/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



FIRWIN FIRMANSYAH, SH., MH  
NIP. 19821016 201101 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 340

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan secara terencana dengan partisipatori yang luas dari seluruh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, bagi manusia sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai tujuan, muara, dan bahkan esensi pembangunan. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi seluruh masyarakat sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah seperti kabupaten/kota maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan secara Nasional, sehingga tercipta sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia dengan wilayah pesisir dan laut yang terbentang sepanjang 1.979,97 km dan luas perairan laut yang tidak kurang dari 48.000 km<sup>2</sup> di Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone serta hamparan pulau-pulau kecil yang menyimpan kekayaan hayati dan non hayati, dan bahkan Selat Makassar menjadi salah satu jalur pelayaran internasional dan ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari aspek ekonomi, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan sumberdaya yang komparatif dengan potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, dari sisi sosial budaya, nilai-nilai luhur dan ragam budaya masyarakat Sulawesi Selatan berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Keunggulan posisi strategis, potensi alam dan sosial budaya ini perlu dipadukan secara bijak dan dikelola seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan dengan produktivitas tinggi namun tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan di Sulawesi Selatan selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2005 hingga 2023 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih menyisakan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2045.

Gambaran capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan yang telah

mencapai . . .

mencapai 74,60 pada tahun 2023 atau naik sebesar 6,54 poin dari tahun 2005, dan berada diatas nasional. Namun demikian, persebaran capaian IPM antar kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dan masih terdapat kesenjangan IPM penduduk laki-laki dan perempuan. Dari aspek kesejahteraan penduduk, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan menurun sepanjang 2005 hingga 2023 sebesar 6,28 persen, dari 14,98 di tahun 2005 menjadi 8,70 pada Maret 2023. Namun demikian, perlu upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan, karena sepanjang periode 2005 hingga 2023 jumlah penduduk miskin yang tinggal di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan, berkisar pada 70 hingga 80 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,51 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sepuluh tahun sebelumnya yang mencapai 7,62 persen. Makassar masih menjadi poros ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan PDRB tertinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2005 hingga 2023, karena hanya turun sebesar 0,013 dari angka 0,390 menjadi 0,377. Pada sektor ketenagakerjaan, pembangunan di Sulawesi Selatan telah memberi manfaat bagi kesempatan kerja penduduk yang membaik dengan berkurangnya pengangguran terbuka dari tahun 2005 yang mencapai angka 13,58 menjadi 4,33 pada tahun 2023.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sudah selayaknya disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 20 tahun lalu. Pembangunan dalam 20 tahun kedepan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan pertama.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2(dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi.

Transformasi Sulawesi Selatan memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan disusun melalui 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dalam perspektif ekonomi hijau dan ekonomi biru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di provinsi secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam upaya perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan. Sinergitas perencanaan provinsi terhadap pembangunan nasional dilakukan melalui 8 (delapan) misi, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan sebagai komitmen Sulawesi Selatan untuk menjaga keselarasan pembangunan nasional, dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama keberhasilan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 memiliki arti penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, dan menjadi dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali, sekaligus menjadi acuan bagi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah kabupaten/kota.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJPD oleh DPRD, evaluasi pemerintah Pusat, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

## 1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6885);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
  19. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 10 Januari 2024 dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

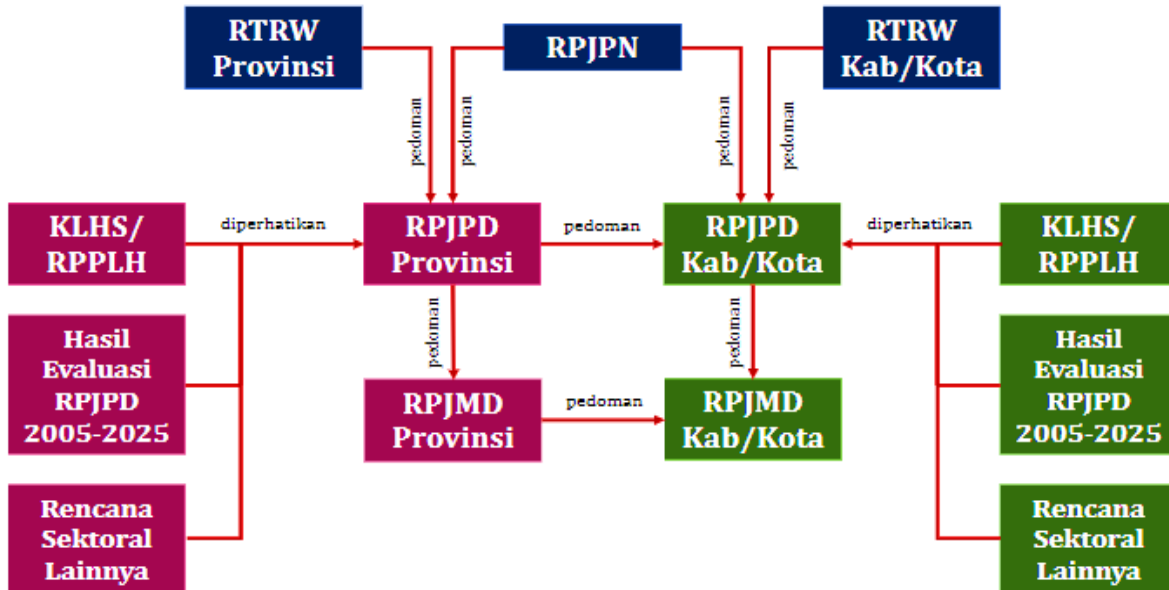
### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang didalamnya mengamanatkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah/tujuan pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan 2) RTRW Provinsi, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Selatan, hasil evaluasi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Keterkaitan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan dengan dokumen lainnya dapat digambarkan dalam skema pada gambar 1.1. sebagai berikut ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber :Imendagri Tahun 2024

RPJPD Provinsi ini selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan RPJMD Provinsi setiap 5 tahun, dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RPJPD kabupaten/kota agar tercipta keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

##### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 adalah :

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Provinsi Sulawesi Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk setiap jangka waktu lima tahun.
6. Menjadi pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

Bab II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah, memuat gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi, kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil /capaian, serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan termasuk hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Bab IV. Visi dan Misi Daerah, memuat Visi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045, sasaran visi, dan misi yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, memuat arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, indikator utama pembangunan, dan arah pembangunan kewilayahan.

Bab VI. Penutup, memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI

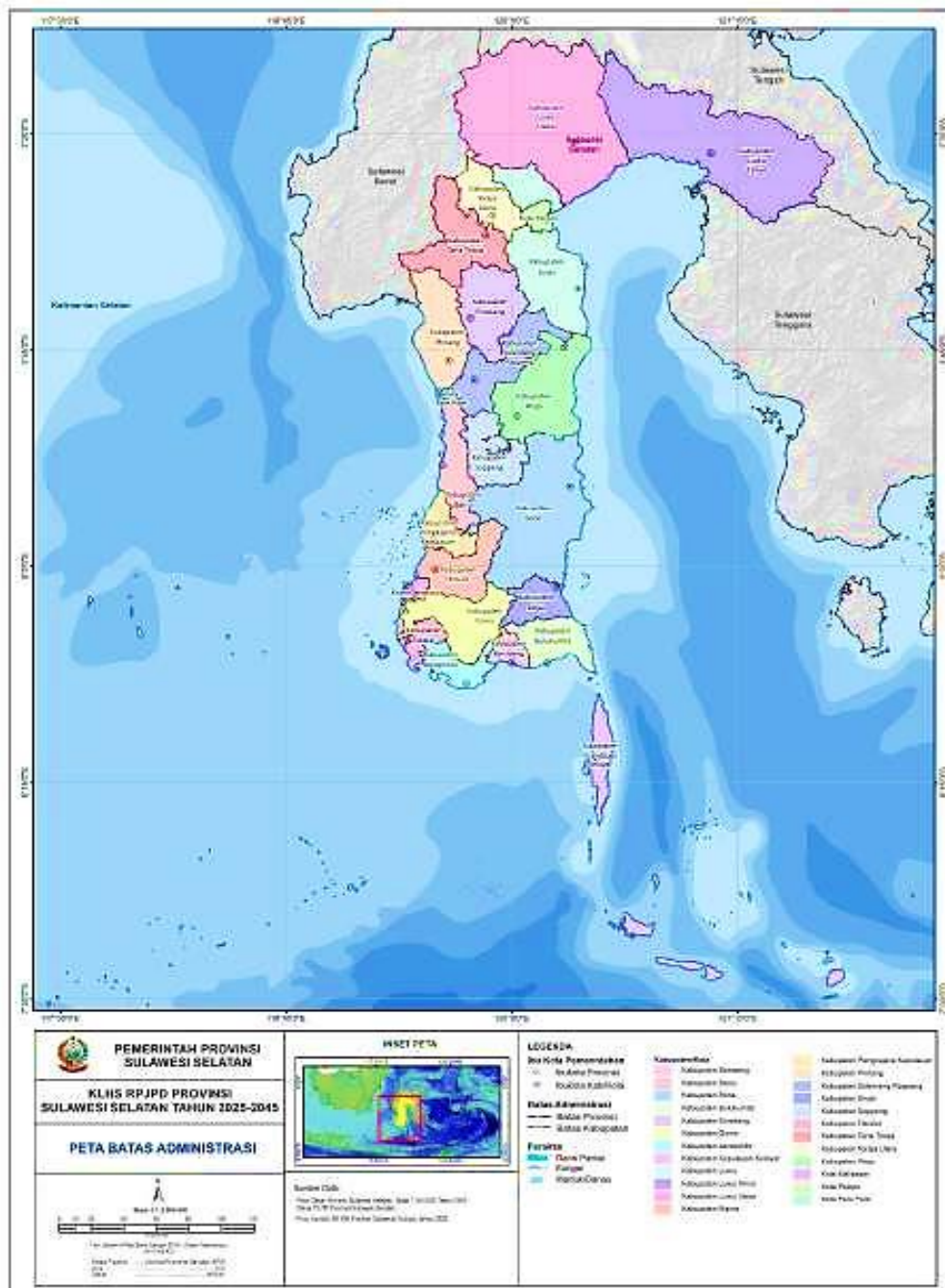
Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dengan batas sebelah Utara adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Teluk Bone, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lokasi yang strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal nasional maupun internasional. Pada tataran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan terletak kira-kira di tengah bentangan kepulauan Nusantara sehingga aksesibilitas dan jangkauan transportasi Nasional Barat-Timur, Utara-Selatan adalah yang terbaik di wilayah ini. Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada  $1^{\circ}52' - 8^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ} 48'' - 122^{\circ} 36'$  Bujur Timur. Geografi wilayah Sulawesi Selatan mencakup pesisir dan pulau dengan garis pantai sepanjang 2.702,81 Km (berdasarkan analisis peta dasar garis pantai Sulawesi Selatan), juga memiliki dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu dan tiga danau.

Secara Administrasi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota, yang terdiri dari 313 kecamatan, 793 kelurahan, dan 2.266 desa. Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 45.331 Km<sup>2</sup> atau 4.533.100 Hektar

Topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi dari ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah seluas 59,37 persen dari luas wilayah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi seluas 16,71 persen, dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan seluas 23,92 persen.

Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan 0-2 persen menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27 persen dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2 persen ini. Kemudian disusul tingkat kemiringan 15-30 persen dengan dominasi luasan berada di Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84 persen dari total luasan dalam tingkat kemiringan 15-30 persen. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15 persen didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84 persen. Sementara tingkat kemiringan 30-40 persen menempati luasan terkecil.

Gambar II.1.  
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Klimatologi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu:

- a. Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

b. Tipe . . .

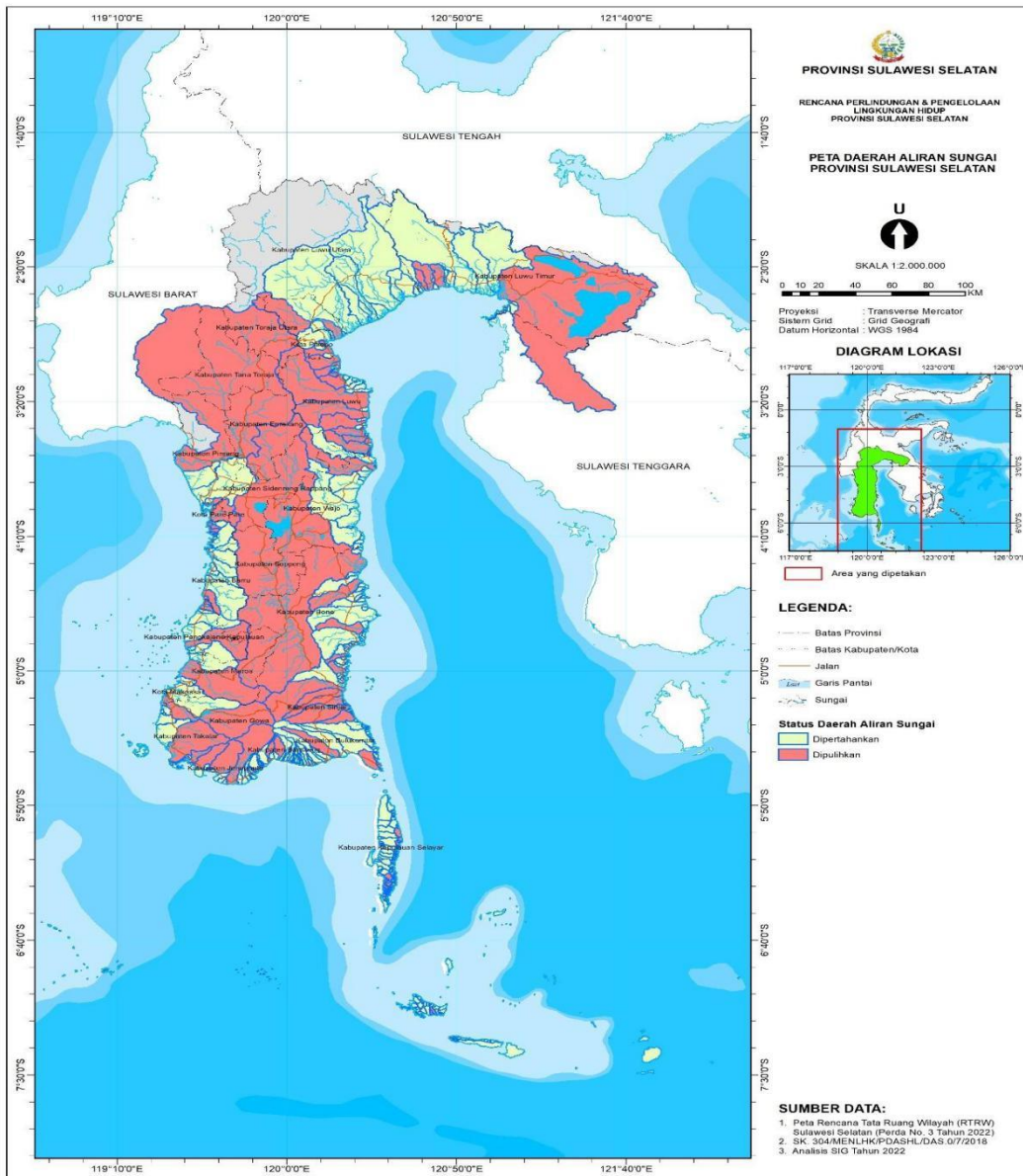
- b. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 - 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.
- c. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros, Jeneponto, Makassar, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.
- d. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Sinjai, Maros, Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Makassar.
- e. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 - 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Bantaeng, dan Selayar.

Curah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya cukup untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum, dan untuk keperluan domestik lainnya. Terdapat beberapa sungai yang melintas antar kabupaten/kota dan ada juga yang melintas antar provinsi.

Sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari curah hujan, danau, sungai, dan air tanah. Curah hujan masih menjadi salah satu faktor penting untuk mencukupi kebutuhan irigasi dan air bersih lainnya. Konservasi air tanah menjadi bagian yang penting di Sulawesi Selatan untuk mengatur pengambilan air tanah dan melindungi zona konservasi dan kawasan perlindungan tata air. Terdapat 148 daerah aliran sungai (DAS) di bawah administratif Sulawesi Selatan yang dikelola oleh BPDAS Jeneberang- Saddang.

Dari keseluruhan DAS, sebanyak 108 DAS masuk ke dalam kategori kritis dan membutuhkan upaya restorasi. Salah satu DAS yang termasuk ke dalam DAS prioritas I di Sulawesi Selatan adalah DAS Bila Walanae. DAS ini meliputi wilayah Bone, Enrekang, Luwu, Maros, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja dan Wajo. Danau ini memiliki banyak jasa ekosistem, di antaranya dengan adanya sebuah danau di tengah DAS Walanae yakni Danau Tempe. Setiap DAS memiliki potensi air yang dihasilkan melalui proses hidrologi. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai, disebutkan bahwa potensi air permukaan dari DAS-DAS yang ada sekitar 63.548.796.610,20 m<sup>3</sup> berasal dari DAS di wilayah sungai Jeneberang, Pompengan Larona, Saddang, dan Walanae-Cenranae.

Gambar II.2.  
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045

Beberapa aspek geografis diatas perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan informasi daya dukung dan daya tampung di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Kajian Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masuk kedalam Kuadran II bersama dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, atau berpredikat **Pemulihan Sumber Daya Berkelanjutan**. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) Eksisting dibawah nilai rata-rata nasional yang mengindikasikan bahwa fungsi lingkungan hidup Sulawesi Selatan sudah mengalami penurunan fungsi baik dari sisi pengatur air, penyedia air, penyediaan lahan, dan pendukung kehati. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa Indeks KMK berada di atas rata-rata nasional atau dari sisi sosial, ekonomi dan budaya sudah memiliki nilai keselamatan, bermutu hidup, dan nilai kesejahteraan yang tinggi.

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu dalam pengembangan

kebijakan . . .

kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir termasuk kategori cukup baik hingga kategori baik. Pada tahun 2023, IKLH Sulawesi Selatan sebesar 74,30 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 74,17 atau naik sekitar 0,13. Nilai IKLH tahun 2023 ini merupakan perhitungan komposit dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 57,95, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,58, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 84,30, dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 56,22. Meskipun nilai IKLH Sulawesi Selatan berada diatas nasional (72,54), namun masih berada di urutan ke 18 dari 38 provinsi di Indonesia.

Tabel II.1.

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup											
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>IKLH Sulawesi Selatan</b>	63,67	64,06	67,01	70,54	73,24	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17	74,30
<b>IKLH Nasional</b>	na	63,42	68,23	65,73	66,46	71,67	66,55	70,27	71,45	72,42	72,54

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, data diolah

Kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sangat berhubungan dengan isu menurunnya kualitas air akibat degradasi lahan pada DAS. Dinamika tutupan hutan tahun 2006 hingga 2020 menunjukkan bahwa luasan hutan mengalami penurunan sekitar 0,12 persen di Sulawesi Selatan. Dalam jangka 20 tahun, luas pertanian meningkat sebesar 13,6 persen dari luas total provinsi. Sebesar 13,47 persen luas kebun campur menunjukkan tren penurunan tercatat sebagai penurunan kelas tutupan lahan tertinggi sepanjang periode 20 tahun terakhir. Adanya kerentanan pada DAS mengakibatkan bertambahnya lahan kritis di Sulawesi Selatan. Lahan kritis dimaksud adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur DAS. Kabupaten Bone memiliki luas lahan kritis terbesar, hal ini bisa mengindikasikan salah satu tantangan terkait degradasi fungsi lahan dan DAS. Kabupaten lainnya yang memiliki luasan lahan kritis pada kategori 'Sangat Kritis' adalah Kabupaten Barru, Maros, dan Soppeng.

Gambaran lebih lanjut terkait kualitas lingkungan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan, dapat dilihat pula dari kondisi sanitasi dan persampahan.

Kondisi sanitasi di Sulawesi Selatan dapat diketahui dari **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**. Penyelenggaraan layanan air limbah domestik di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu sistem pelayanan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dalam upaya pelayanan sanitasi Aman Setempat di Provinsi Sulawesi Selatan telah terbangun IPLT sebanyak 16 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Daerah yang telah memiliki IPLT sejumlah 16 kabupaten/kota dengan kapasitas terbangun 218 m<sup>3</sup>/hari. Jumlah IPLT yang berfungsi sejumlah 11 unit dan 4 unit tidak/belum berfungsi. Sedangkan 8 kabupaten belum memiliki IPLT yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Gowa dan Bone sehingga untuk meningkatkan kinerja layanan

penyedotan lumpur tinja melalui kerja sama dengan kabupaten/kota terdekat yang memiliki IPLT. Dalam upaya meningkatkan layanan sanitasi aman terpusat di Provinsi Sulawesi Selatan telah dibangun 1 unit IPALDT (sewerage system) skala kota di Kota Makassar dengan kapasitas layanan 14.000 sambungan rumah. Untuk layanan sanitasi aman terpusat skala permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan telah terbangun sejumlah 634 unit IPALD Komunal (skala permukiman), Tangki Septik Komunal sejumlah 763 Unit, MCK++ sejumlah 69 unit, dan MCK Kombinasi sejumlah 16 unit.

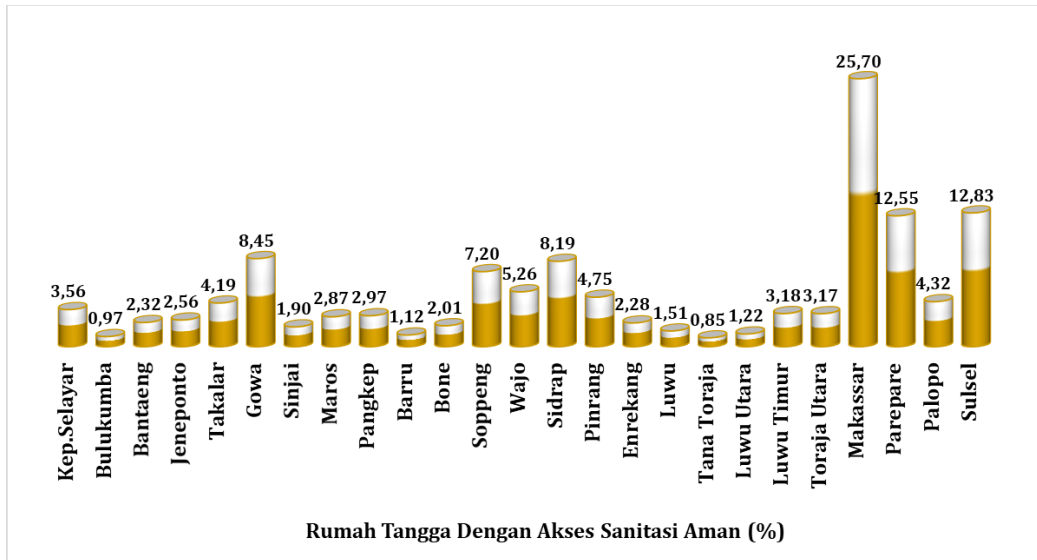
Grafik II.1.  
Akses Sanitasi Aman Rumah Tangga



Sumber Data : survei Sosial Ekonomi Nasional Data diolah Bappenas

Tahun 2019 hingga 2022 capaian akses Sanitasi Aman Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 12,92 persen lebih baik dari capaian Nasional. Tahun 2023 akses Sanitasi Aman Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mencapai 12,83 persen namun telah melampaui target Sanitasi Aman Sulawesi Selatan sebesar 8 persen pada tahun 2024. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut. Sarana sanitasi aman sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik SNI, jumlah IPLT terbangun dan jumlah truk tinja. Survei terhadap pengelolaan sarana SPALD-S tidak mendapatkan data jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik SNI karena faktor ketidakersediaan data di daerah. Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil mencapai status provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang di deklarasikan pada tahun 2023. Dibandingkan dengan provinsi lain, Sulawesi Selatan menduduki provinsi urutan ketiga yang telah berhasil mencapai status SBS setelah provinsi NTB dan DI.Yogyakarta.

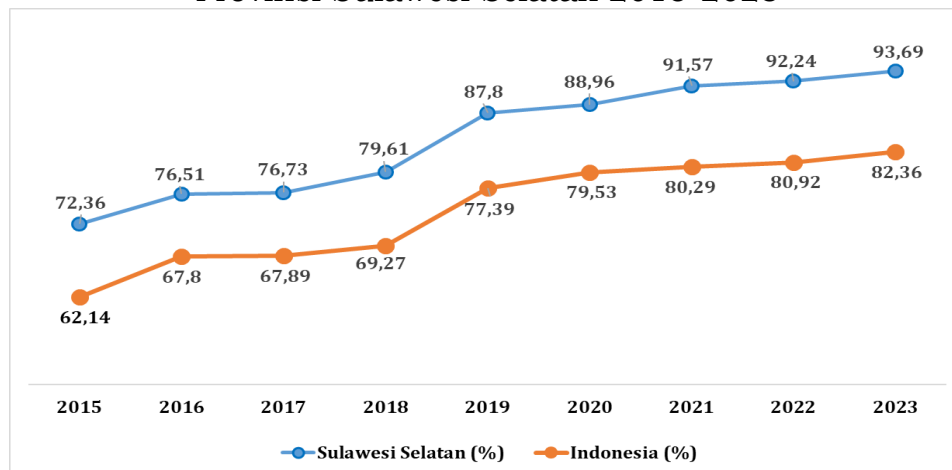
Grafik II.2.  
Akses Sanitasi Aman Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional data diolah BAPPENAS

Tahun 2023 akses Sanitasi Aman Rumah Tangga di Sulawesi Selatan mencapai 12,83 persen dengan capaian tertinggi di Kota Makassar sebesar 25,70 persen. Selain melalui penyedotan lumpur tinja tangki septik rumah tangga, capaian akses Sanitasi Aman juga didukung oleh penambahan jumlah sambungan rumah yang terhubung dengan IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPAL Kota. Berdasarkan arahan Rancangan Teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman Nasional pada tahun 2030 Sulawesi Selatan ditargetkan harus mencapai 15 persen akses Sanitasi Aman dengan asumsi bahwa semua sarana terbangun berfungsi optimal. Namun demikian hampir semua kabupaten/kota memiliki IPAL komunal dengan jumlah yang terbatas dan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pencapaian target akses sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan IPLT regional perlu dilakukan apabila daerah tidak memiliki kemampuan untuk membangun IPLT sendiri dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan posisi lokasi geografis kabupaten/kota yang saling berdekatan yang sama-sama belum memiliki IPLT sendiri.

Grafik II.3.  
Akses Sanitasi Layak Rumah Tangga  
Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

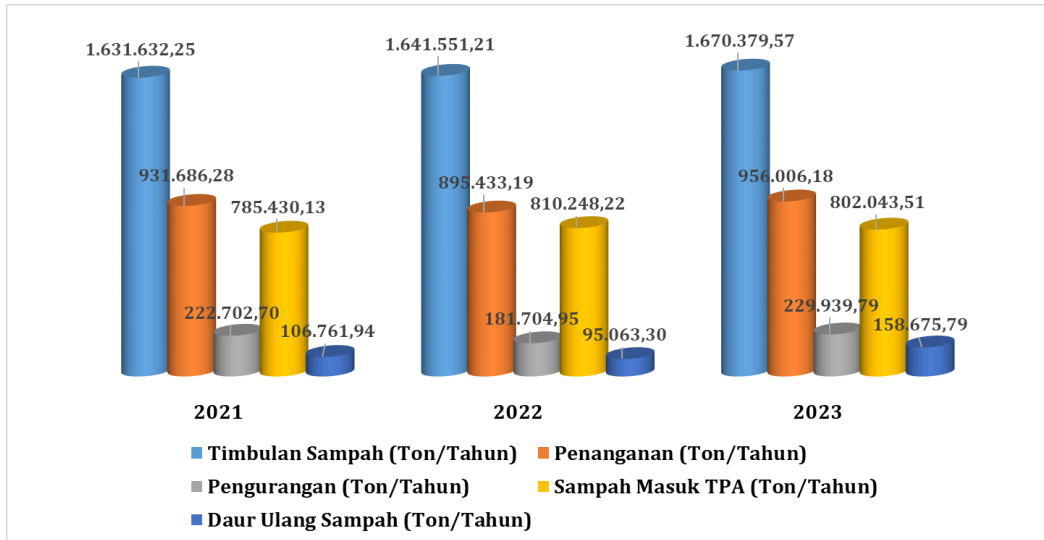
Tahun 2015 hingga 2023 akses sanitasi layak rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan serta berada diatas capaian Nasional. Pencapaian akses sanitasi layak sebesar 93,69 persen pada tahun 2023

membuka peluang percepatan peningkatan akses sanitasi aman yang berarti akan semakin besar tuntutan masyarakat untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik melalui layanan sanitasi aman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 Sulawesi Selatan ditargetkan mencapai 95 persen akses sanitasi layak termasuk 8 persen akses sanitasi aman rumah tangga, serta tidak ada lagi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas jamban dan tangki septik yang limbahnya dialirkan ke badan air seperti drainase, sungai, dan kolam.

**Timbulan Sampah Terkelola di Fasilitas Pengelolaan Sampah** Tahun 2021 hingga 2023 capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan sampah mengalami tren fluktuasi. Jumlah sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang aktif beroperasi sejumlah 739 unit belum mampu mencakup seluruh wilayah desa/kelurahan/kecamatan. Hal ini disebabkan karena luas wilayah beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang letaknya jauh dari TPA. Selain itu jumlah dan kondisi sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah yang tidak memadai menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum terlayani pengangkutan sampah. Pengelolaan sampah organik dan non organik dari rumah tangga merupakan faktor penting dalam peningkatan akses pengurangan sampah karena mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA. Jumlah sarana pengurangan sampah yang terdiri dari Bank Sampah dan TPS 3R di Sulawesi Selatan baru mencapai 181 unit serta belum mencakup seluruh wilayah kelurahan. Optimalisasi keberfungsian Bank Sampah dan TPS 3R terbangun diperlukan dalam rangka peningkatan akses pengurangan sampah rumah tangga.

Grafik II.4.

**Capaian Pengelolaan Sampah  
Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023**

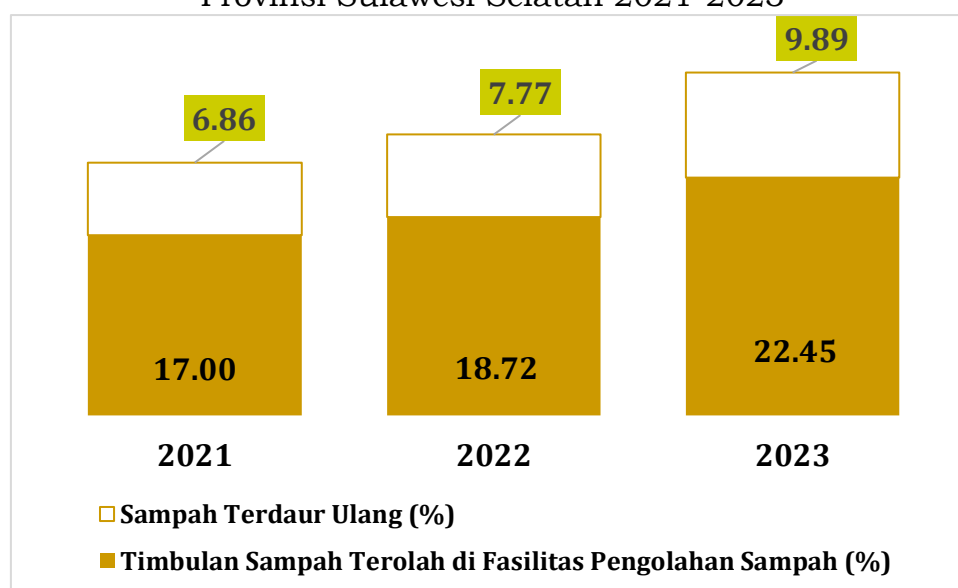


Sumber: SIPSN data diolah Bappelitbangda

Jumlah timbulan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menggambarkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang. Sistem pemrosesan TPA kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih ada yang menggunakan sistem open dumping disebabkan karena kapasitas TPA yang telah overload sehingga tidak dapat dilakukan proses penutupan tanah atau dengan metode controlled dan sanitary landfill. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sarana pengelolaan sampah di TPA seperti Excavator dan Bulldozer yang tidak berfungsi optimal. Perluasan lahan dan pembangunan TPA baru menjadi isu utama dalam pengelolaan sampah, mengingat rata-rata usia TPA yang lebih dari 10 tahun serta melebihi

kapasitas. Berikut gambaran timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Sulawesi Selatan.

Grafik II.5.  
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah  
Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023

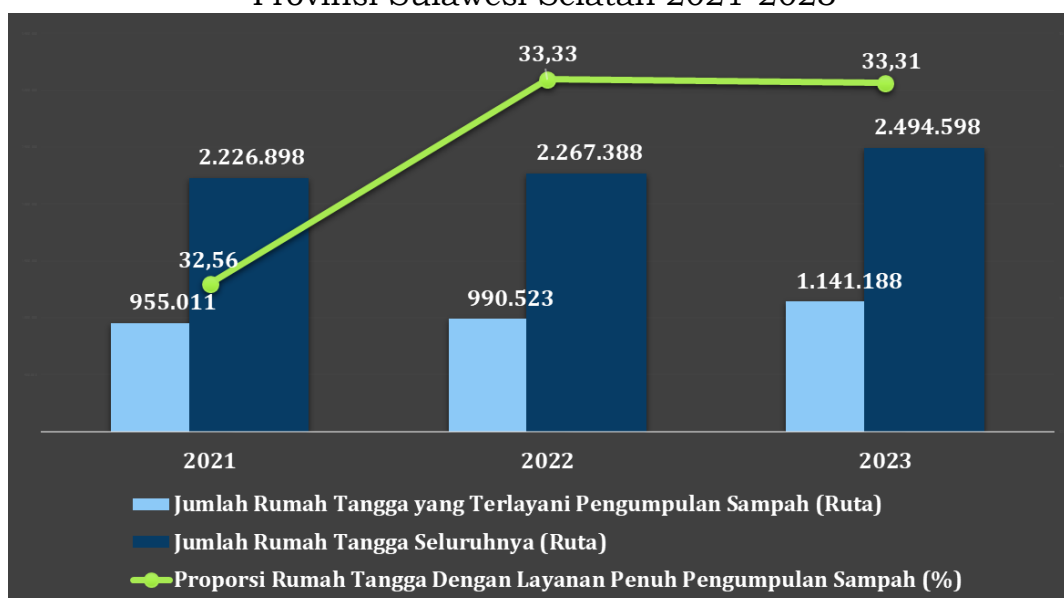


Sumber: SIPSN data diolah Bappelitbangda

Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah termasuk sampah yang terdaur ulang tahun 2021 hingga 2023 mengalami tren peningkatan meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang disebabkan oleh karena penanganan sampah di Sulawesi Selatan masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan sampah sangat terbatas pada pengelolaan sampah regional menjadi hambatan dalam peningkatan peran provinsi dalam pengelolaan sampah dimana saat ini Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki TPA Regional.

Indikator yang digunakan juga untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah yakni Pengumpulan sampah pada **rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah**, merupakan suatu kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah salah satunya adalah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baik dari pintu ke pintu rutin secara berkala maupun melalui penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara terpisah yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Tahun 2022 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Sulawesi Selatan mencapai 33,33 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengalami penurunan 0,02 poin persen dari tahun 2022 dengan capaian 33,31 persen. Adapun wilayah yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah rumah tangga adalah Kota Makassar yang mencakup seluruh wilayah kelurahan pada masing-masing kecamatan meskipun tidak layanan pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari. Sedangkan Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang cakupan layanan pengumpulan sampah rumah tangga yang paling rendah dari 24 Kabupaten/Kota yang hanya mencapai 2,40 persen atau 2.577 rumah tangga dari sejumlah 107.574 rumah tangga pada tahun 2023 serta mengalami penurunan cakupan layanan dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pengumpulan sampah yaitu Pick Up dan Motor Sampah di Kabupaten Luwu Utara.

Grafik II.6.  
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah  
Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023



Sumber: Pokja PKP Kabupaten/Kota data diolah Bappelitbangda

Kondisi geografis seperti letak geografis, topografi, jenis tanah, dan iklim dapat menentukan jenis bencana alam yang mungkin terjadi di suatu wilayah, dan memungkinkan untuk melakukan pemetaan zona-zona rawan bencana. Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai **Indeks Risiko Bencana** Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 IRB Sulawesi Selatan sebesar 144,47, ada penurunan sebesar 5,6 dari tahun 2022, namun termasuk dalam kategori risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Tabel II.2.

**Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**

Indeks Resiko Bencana											
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>IRB Sulawesi Selatan</b>	167	167	166,5	164,5	162,6	160,1	159,5	159,5	154,9	150,1	144,5

Sumber data : BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai, dan wilayah sungai serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Perubahan iklim memberi tekanan lebih pada intensitas bencana di Sulawesi Selatan. Kejadian banjir secara konsisten terjadi sepanjang tahun, memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan dan lahan kritis yang diperparah oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya.

Perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan pesisir. Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki panjang garis pantai sekitar 1.979 km<sup>2</sup> dengan luas perairan laut sekitar 48.000 km<sup>2</sup> akan sangat rentan terhadap banjir rob, abrasi, peningkatan tinggi permukaan laut dan gelombang

pasang. Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu. Perubahan iklim yang terjadi, berkurangnya tutupan hutan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil kajian kementerian PPN/Bappenas, bencana hidrometeorologi yang terjadi selama kurun waktu 2020-2024 berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 544 Triliun Rupiah. Untuk itu diperlukan upaya intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sehingga dapat meminimalkan dampak perubahan iklim dan kerugian ekonomi serta meningkatkan ketahanan (resilience) akibat perubahan iklim.

Pengelolaan kebencanaan di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir diperhadapkan pada beberapa hambatan dan tantangan meliputi : a) Informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia di beberapa kabupaten/kota utamanya pada daerah dengan ancaman bencana tinggi, b) Pengarusutamaan penanggulangan bencana yang responsive, inklusif, dan mensinergikan peran provinsi bersama kabupaten /kota belum terakomodasi dalam kerangka visi dan implementasi penanggulangan bencana daerah, penanganan dampak dan pengelolaan potensi perubahan iklim, c) Kapasitas kelembagaan, sumberdaya kebencanaan, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana masih perlu terus dioptimalkan, d) Pengelolaan dampak bencana yang mengganggu layanan sosial yang penting bagi anak-anak, termasuk pendidikan, kesehatan dan air, sanitasi dan kebersihan, dan d) Belum ada rencana kontigensi dan system terpadu untuk bencana non Alam khususnya penyakit.

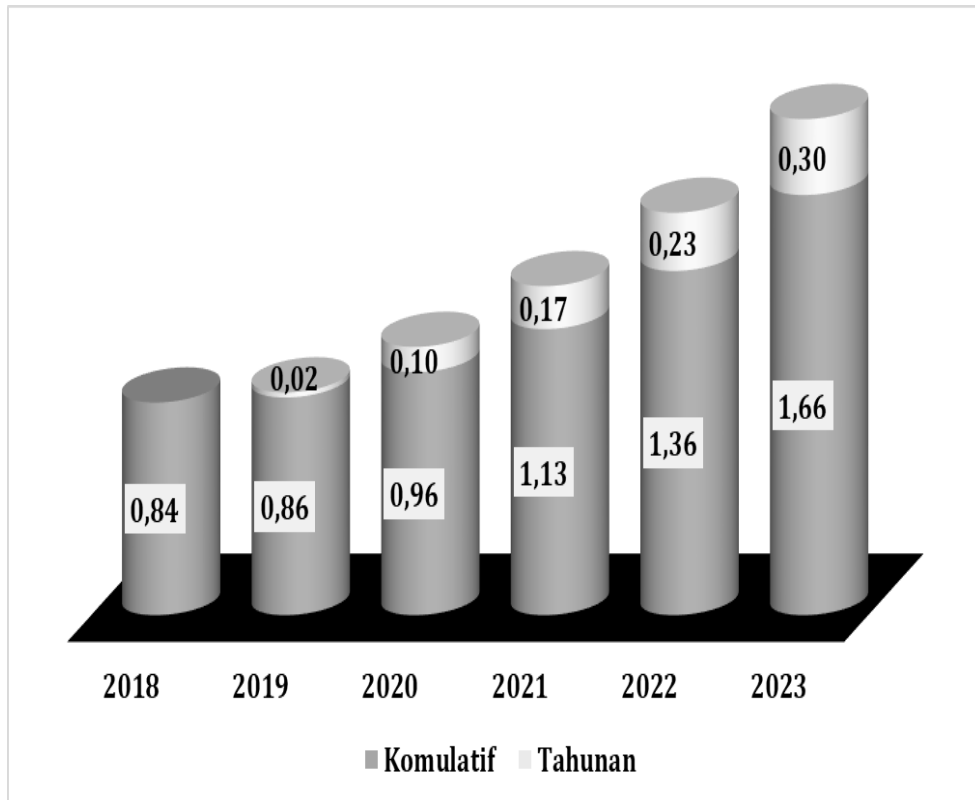
**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Dukungan tersebut diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur ini antara lain mengatur pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO<sup>2</sup> eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan emisi tahun 2022 adalah sebesar 1,198 juta ton CO<sub>2</sub> eq dengan realisasi penurunan emisi GRK sebesar 1,36 juta ton CO<sub>2</sub> eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2022 adalah 113,52 persen dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 704 kegiatan.

Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat tercapai setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2020 kabupaten/kota secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan melalui APBD masing-masing. Kegiatan yang telah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA adalah yang dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya untuk semua sektor, yaitu; sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi dan sektor blue carbon. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang aktif dan tepat waktu melaporkan aksi mitigasi ke aplikasi AKSARA, sehingga pada tahun 2021 berhasil menjadi salah satu

provinsi terbaik pelaporan AKSARA selama 1 dekade (2010-2020). Pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yaitu penghargaan khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon. Tahun 2023 penurunan emisi GRK mencapai 1,66 juta ton CO<sub>2</sub> eq mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

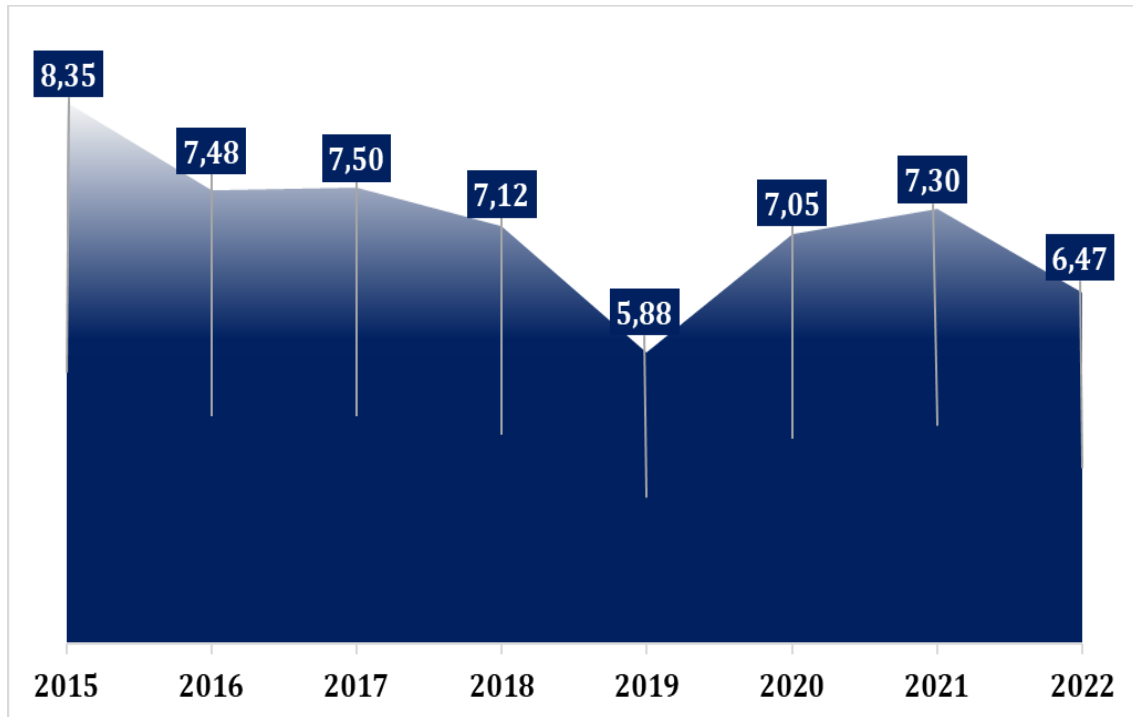
Grafik II.7.  
**Potensi Penurunan Emisi GRK ( Juta Ton CO<sub>2</sub> eq)  
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**



Sumber: Aplikasi AKSARA

Untuk tingkat **Intensitas Emisi** di provinsi Sulawesi Selatan mengalami tren fluktuasi kurun waktu 8 tahun terakhir masih jauh di bawah capaian Nasional namun cenderung lebih stabil. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi antara lain: a) lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/sector unggulan; b) masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sector ekonomi unggulan (untuk perkebunan monokultur, pertanian, pertambangan); c) rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sector ekonomi unggulan; d) kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan beberapa upaya antara lain mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sector ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Grafik II.8.  
**Tingkat Intensitas Emisi (Ton CO<sub>2</sub> eq/Miliar Rp.)  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2022**

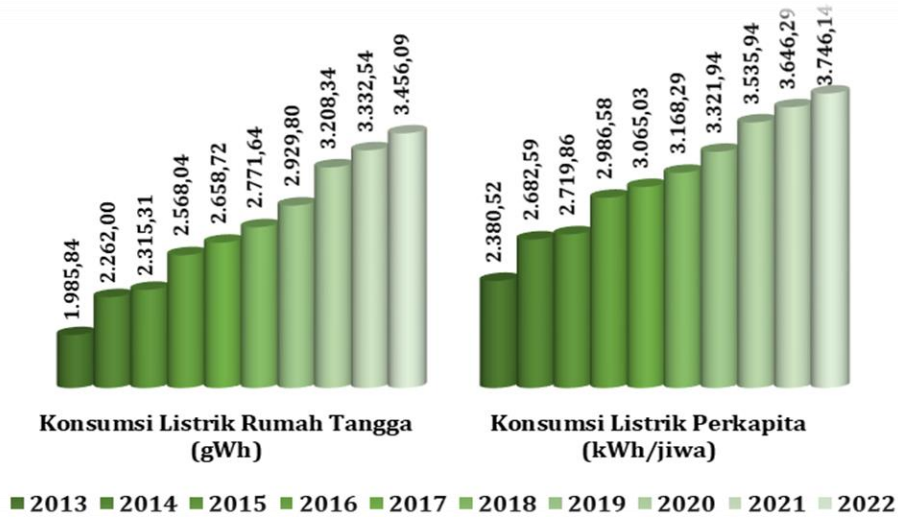


Sumber: BAPPENAS (data diolah Pokja Transformasi Ekonomi RPJPD Sulsel)

Selain beberapa indikator lingkungan diatas, **Energi, Air dan Kemandirian Pangan** menjadi bagian penting kaitannya dengan pengelolaan potensi geografi Sulawesi Selatan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu indikator yang di gunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan energi di Sulawesi Selatan adalah **Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)**. Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energi listrik rumah tangga perkapita mencapai 92,26 persen dari total konsumsi listrik per kapita, dan mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,23 persen yang mencapai 3.746,14 KWh/kapita pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya efisiensi energi di sektor rumah tangga, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan edukasi tentang penghematan energi di rumah tangga. Konsumsi listrik terbesar di Sulawesi Selatan setelah rumah tangga adalah sektor industri mencapai 1.359,73 GWh, kemudian sektor usaha 1.340,24 GWh, sosial/publik 390,34 GWh, gedung pemerintah 176,02 GWh, dan penerangan jalan umum 148,34 GWh pada tahun 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Grafik II.9.  
**Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2022**



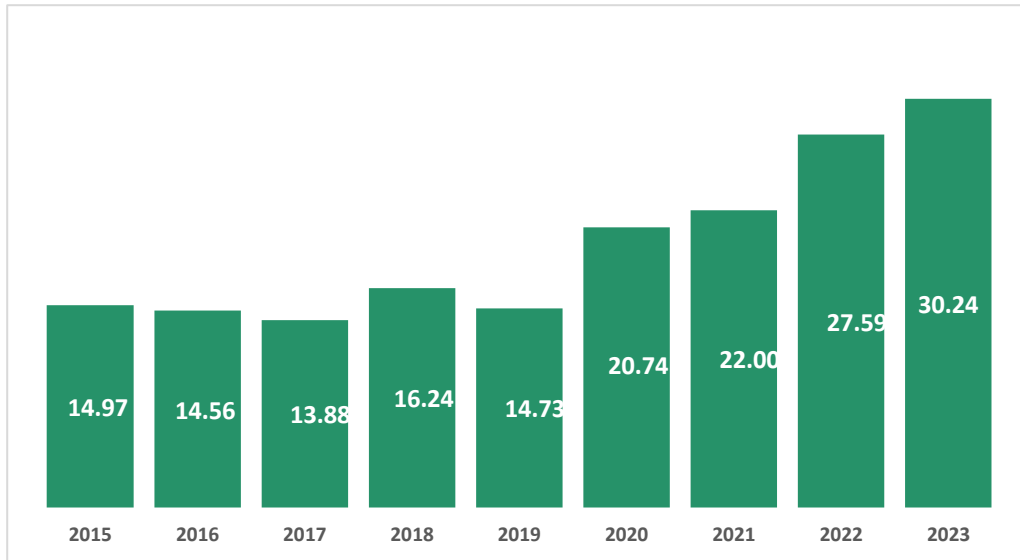
Sumber: PLN SULAWESI SELATANBAR, data diolah Bappelitbangda

Selain konsumsi listrik per kapita, **Intensitas energi primer** menjadi bagian dari gambaran kondisi ketersediaan energi di suatu wilayah. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. Intensitas energi primer merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya intensitas energi menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan energi primer seperti minyak bumi, gas, batubara, dan energi terbarukan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Untuk Skala Nasional Realisasi capaian intensitas energi primer pada tahun 2021 sebesar 133,9 SBM/miliar (tercapai 102,97%), sedangkan target intensitas energi primer pada tahun 2022 adalah sebesar 136,6 SBM/miliar Rp. Perkembangan realisasi capaian intensitas energi primer tahun 2022 yaitu pada triwulan 2 sebesar 144,2 SBM/miliar, triwulan 3 sebesar 156,1 SBM/miliar Rp, sedangkan pada bulan November 2022 capaian realisasi intensitas energi primer sebesar 155,1 SBM/miliar Rp, dan akhir tahun 2022 tercatat realisasi sebesar 160,5SBM/miliar Rp (tercapai sebesar 82,5%), sedangkan data untuk Sulawesi Selatan belum tersedia dikarenakan penghitungan capaian intensitas energi primer menjadi kewenangan pusat.

Nilai **Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer**, selama kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 30,24 persen, lebih tinggi dari capaian Nasional yang hanya mencapai 13,1 persen yang didukung melalui kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meskipun demikian, tantangan terberat dalam peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer adalah tingginya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan jenis energi hijau, sifatnya intermitten, dan kurangnya tenaga kerja terampil untuk EBT. Selain itu ketidakpastian regulasi dan kebijakan, dan ketergantungan pada sumber energi konvensional, serta pemanfaatan potensi energi EBT di Sulawesi Selatan, sangat mempengaruhi capaian kinerja kedepan.

Grafik II.10.  
**Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2015-2023**



*Sumber Data : Dinas ESDM, data diolah Bappelitbangda*

Selanjutnya, dari aspek daya dukung pangan menunjukkan kemampuan Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD 2025-2045 menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur (14.6%), Luwu Utara (14.4) dan Bone (10.1%) merupakan tiga kabupaten dengan ketersediaan pangan tinggi. Meskipun dari segi produksi tergolong sangat tinggi, namun beberapa permasalahan terkait pangan masih ditemukan di Sulawesi Selatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya potensi gagal panen yang diakibatkan oleh kekeringan dan dampak perubahan iklim lainnya.

Gambaran kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan dapat diketahui dari capaian **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)** selama beberapa tahun terakhir. Prevalensi ketidacukupan pangan menggambarkan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka setiap saat. Tahun 2017 hingga 2023 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) di Sulawesi Selatan berkisar pada angka 5 sampai 7, namun pada tahun 2020 dan 2022 mencapai angka 10. Peningkatan ketidacukupan pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi sebagai dampak pandemi global. Adapun peningkatan PoU di tahun 2022 lebih disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi kecukupan pangan, fluktuasi harga, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan layanan, terutama mereka yang berada dalam kondisi kerentanan sosial atau ekonomi. PoU Sulawesi Selatan kembali menurun pada tahun 2013 di angka 7,84 persen, dan berada dibawah PoU Nasional yang mencapai 8,53 persen. Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Banten adalah tiga provinsi dengan PoU terendah, dan Sulawesi Selatan hanya menempati ke 10 provinsi dengan PoU terrendah.

Tabel II.3.  
**Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Selatan  
 Tahun 2017-2023**

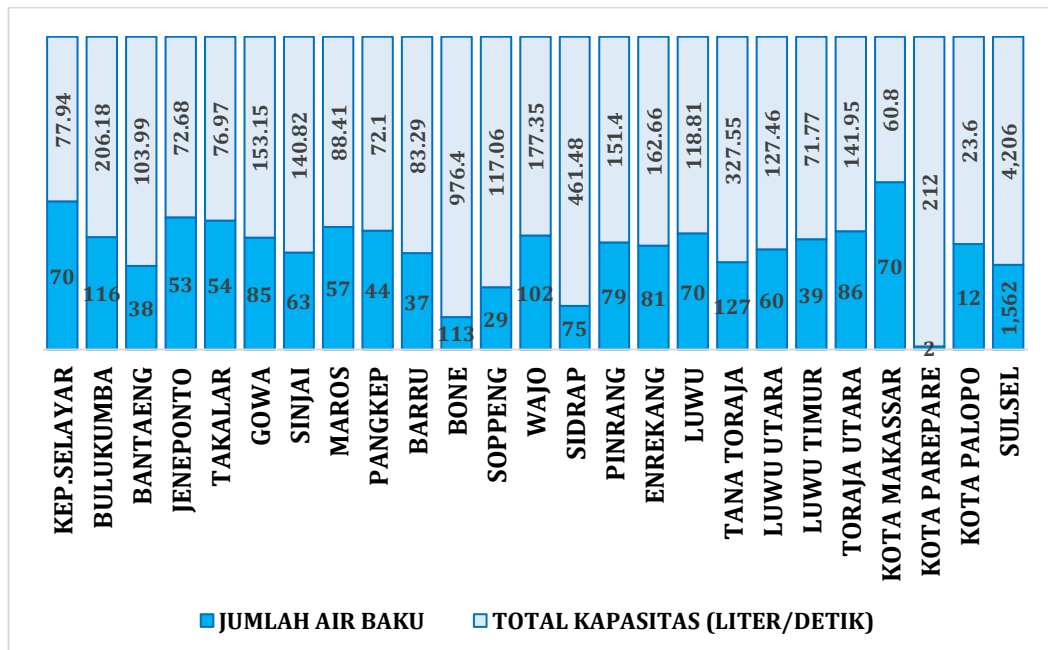
Prevalensi Ketidacukupan Pangan							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PoU Provinsi	5,43	6,22	7,65	10,14	7,93	10,79	7,84
PoU Nasional	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, selayaknya memiliki PoU terendah secara nasional. Beberapa hal yang mempengaruhi PoU Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses terhadap pasar, infrastruktur, dan sumber daya yang mendukung ketersediaan pangan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Olehnya itu perlu upaya untuk memperkuat sistem distribusi dan logistik pangan yang efektif sehingga pangan yang dihasilkan dapat tersalurkan ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, kondisi ketahanan air di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari indikator **Kapasitas Air Baku (m3/detik)**. Penyediaan air baku untuk pengelolaan air minum penduduk di Sulawesi Selatan yang bersumber dari Sungai, Mata Air, dan Waduk berjumlah 175 sumber air baku yang memiliki kapasitas 940.451,5 liter/detik dengan total kapasitas terpakai mencapai 11.721 liter/detik. Berdasarkan jenisnya, air baku yang digunakan oleh rumah tangga di Sulawesi Selatan baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan yaitu yang berasal dari PDAM, Sumur Gali, Sumur Bor Dalam, Mata Air, Air Tanah Dangkal, Air Tanah Dalam, dan Air Permukaan sejumlah 1.562 dengan total kapasitas 4.206 liter/detik yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan MCK serta sumber air minum rumah tangga.

Grafik II.11.  
**Kapasitas Air Baku Kabupaten/Kota  
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM)

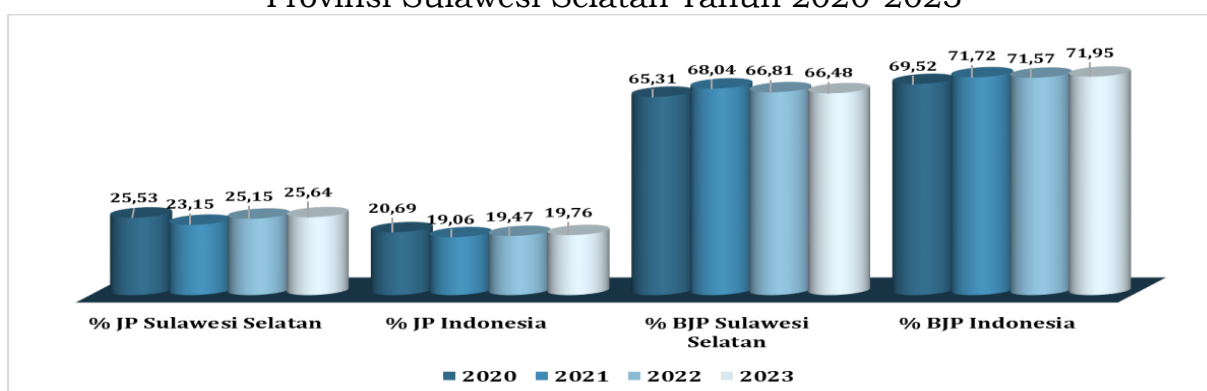
Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui ketahanan air adalah **Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**. Rumah tangga dengan akses Air Minum melalui Jaringan Perpipaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 25,64 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta lebih tinggi dari capaian Nasional. Layanan PDAM yang belum mencakup seluruh wilayah permukiman serta kinerja layanan BUMD Air Minum (PDAM) menjadi faktor yang menyebabkan akses air minum rumah tangga melalui jaringan perpipaan PDAM masih sangat rendah. Kinerja BUMD Air Minum di Sulawesi Selatan dari 23 BUMD kategori Sehat hanya berjumlah 12 BUMD, kategori Kurang Sehat 6 BUMD dan kategori Sakit 5 BUMD. Kinerja BUMD dapat mempengaruhi jumlah pelanggan yang disebabkan oleh kuantitas dan kualitas air yang didistribusikan. Menurunnya cakupan pelayanan dipengaruhi oleh permasalahan air baku yang semakin jauh dari pusat-pusat pelayanan, sebarannya secara kuantitas tidak merata, dan kapasitas di beberapa lokasi menurun.

Rendahnya cakupan layanan perpipaan PDAM menuntut masyarakat memilih akses air minum non perpipaan yang berasal dari sumur dan mata air terlindungi. Untuk meningkatkan akses air minum perpipaan non PDAM pemerintah membangun SPAM komunal berbasis masyarakat khususnya pada wilayah rawan air. Selain itu pembangunan SPAM Regional diharapkan mampu meningkatkan akses air minum aman perpipaan yang juga merupakan amanat SPM.

Populasi penduduk di Sulawesi Selatan yang terus mengalami peningkatan menyebabkan kebutuhan air minum meningkat. Perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang menjadi tantangan pemerintah Sulawesi Selatan dalam penyediaan air minum aman melalui jaringan perpipaan. Berdasarkan Roadmap Induk Air Minum Aman Nasional dimana pada tahun 2030 pemerintah menargetkan Sulawesi Selatan mencapai akses air minum aman sebesar 40 persen atau sejumlah 1.007.826 rumah tangga. Sedangkan target yang tertuang dalam RPJPN pada tahun 2045 ditargetkan 100 persen rumah tangga di Indonesia telah mengakses air minum aman dengan target 75 persen melalui jaringan perpipaan (JP) dan 25 persen melalui non perpipaan (BJP).

Grafik II.12.

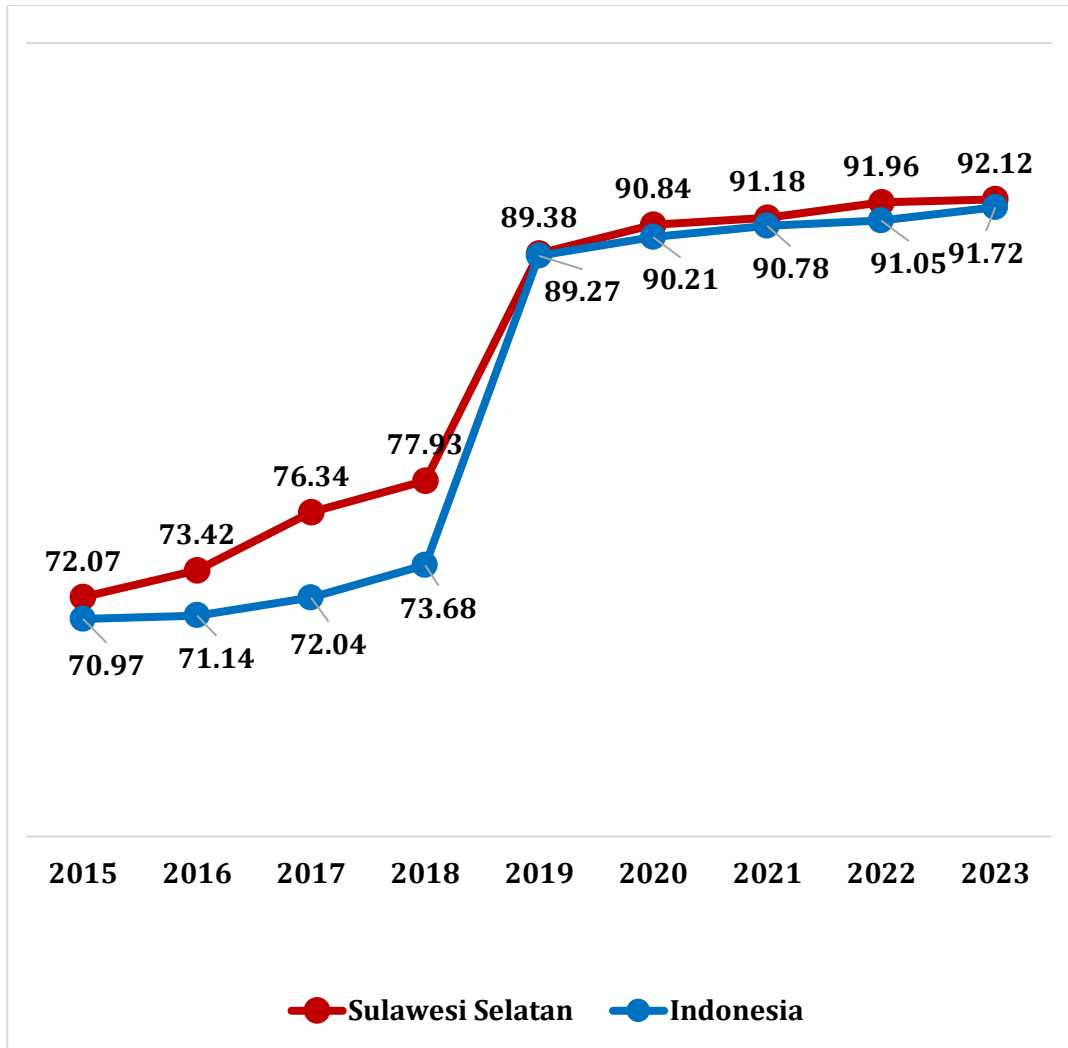
Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional data diolah BAPPENAS

Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hingga 2023 akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan mencapai 92,12 persen pada tahun 2023. Berdasarkan sumbernya air minum layak rumah tangga terbesar diperoleh dari air isi ulang sebesar 36,39 persen dan sumur bor/pompa sebesar 18,75 persen. Hal ini menggambarkan pemenuhan akses air minum layak rumah tangga masih bertumpu pada akses non perpipaan yang salah satunya disebabkan oleh karakteristik wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari wilayah pesisir dan kepulauan.

Grafik II.13.  
Akses Air Minum Layak Rumah Tangga  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023

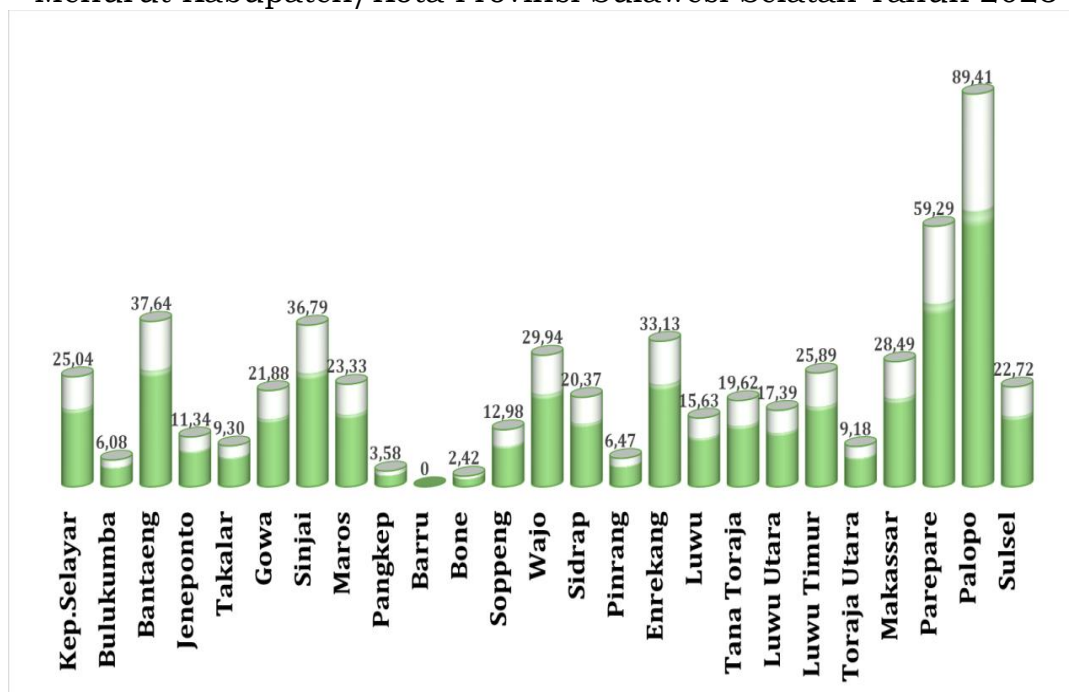


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional data diolah BAPPENAS

Saat ini pemerintah berupaya mengurangi penggunaan air tanah sebagai sumber air minum disebabkan tingginya pencemaran air tanah oleh lumpur tinja yang berasal dari penggunaan tangki septik yang tidak berstandar SNI atau tidak kedap. Belum dilakukan sensus terkait kepemilikan tangki septik layak/kedap sehingga penggunaan air tanah tidak dianjurkan untuk wilayah perkotaan. Ditambah lagi kurangnya pengawasan air minum melalui uji kualitas air melalui sumbernya dengan 19 parameter yang disebabkan karena belum semua kabupaten memiliki Labkesda/LabPKAM sehingga masih terdapat kabupaten yang belum melaksanakan surveilans kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT). Pengawasan kualitas air minum SPAM secara mandiri yang dilakukan oleh sanitarian hanya terlapor di tingkat puskesmas, sehingga diperlukan peran Dinas Kesehatan secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum. Berdasarkan data pengawasan kualitas air minum (PKAM), pada tahun 2023 rumah tangga dengan akses air siap minum perpipaan di Sulawesi Selatan mencapai 23,58 persen atau 451.228 sambungan rumah aman dari total 713.018 sambungan rumah.

Grafik II.14.

Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda

Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

### 2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Kondisi demografi atau kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan selama dua decade ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk, dari tahun 2013 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.

Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jumlah penduduk</b>	8342047	8432163	8512608	8598604	8674372	8748052	8819549	9073509	9139531	9225747	9362290
<b>LPP</b>	1,15	1,13	1,16	1,1	1,08	1,06	1,05	1,18	1,23	1,17	1,15
<b>Kepadatan penduduk per Km2</b>	182	184	186	188	190	191	193	198	200	197	207
<b>Rasio Jenis Kelamin</b>	95,34	95,4	95,72	95,54	95,6	95,66	95,72	98,59	98,65	98,69	98,73

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

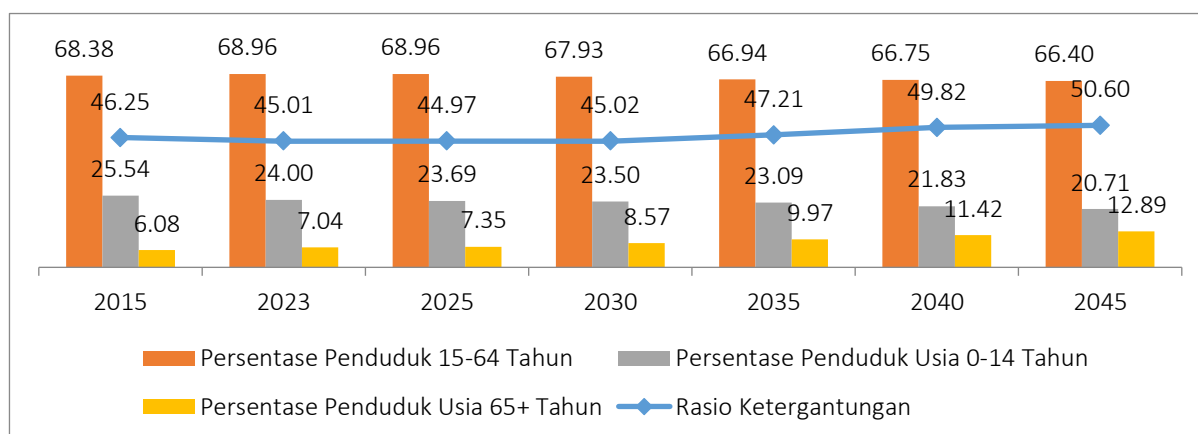
**Jumlah penduduk** di Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS pada tahun 2023 mencapai 9.362.290 jiwa dengan **laju pertumbuhan penduduk** tahun dari tahun 2010 sampai 2023 sebesar 1,15 persen, bertambah sekitar 1.020.243 jiwa selama 10 tahun. **Kepadatan penduduk** di tahun 2023 mencapai 207 jiwa per Km2 dengan **rasio jenis kelamin** sebesar 98,73 atau dengan kata lain terdapat sekitar 98,73 pria untuk setiap 100 perempuan, dengan jumlah laki-laki sebesar 4.581.647 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 4.644.100 jiwa.

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi **rasio ketergantungan** di Sulawesi Selatan. BPS Provinsi Sulawesi Selatan mencatat rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2023 sebesar sebesar 44,88 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 45 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Berdasarkan proyeksi penduduk, maka pada tahun 2045 diprediksi rasio ketergantungan di Sulawesi Selatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persentase penduduk usia lanjut menjadi sebesar 50,85. Rasio ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan beban yang lebih besar bagi populasi usia produktif, karena mereka perlu menyediakan dukungan bagi populasi yang lebih besar dari mereka yang tidak produktif secara ekonomi.

Berdasarkan struktur penduduk di Sulawesi Selatan, bonus demografi telah dimulai sejak tahun 2015, dan periode puncaknya diperkirakan terjadi antara tahun 2020 hingga 2035. Pada tahap ini, tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun, selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.15.

**Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2045**



Sumber: BPS data diolah

Gambaran kondisi kependudukan yang perlu pula untuk diperhatikan adalah **migrasi penduduk**. Provinsi asal migran muda yang masuk ke Sulawesi Selatan tertinggi berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor pendorong untuk melakukan migran ke Sulawesi Selatan dimana Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp.3.103.800,00 lebih besar dibandingkan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar Rp.2.981.379,00.

Hasil Long Form SP2020 menunjukkan bahwa angka migrasi seumur hidup antar provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir. Angka migrasi seumur hidup antarprovinsi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil Long Form SP2020 mencapai 4,08 persen, atau terdapat sekitar empat sampai lima dari 100 penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tinggal di luar provinsi tempat kelahirannya. Pada tahun 2022 terdapat 376.380 penduduk yang merupakan migran seumur hidup

antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur(33,31 persen), Kota Palopo (32,34 persen), dan Kota Parepare (28,49 persen) merupakan tiga kabupaten/kota yang memiliki proporsi penduduk berstatus migran atau angka migrasi masuk seumur hidup terbesar. Sedangkan kabupaten/ kota yang memiliki angka migrasi keluar terbesar adalah Kabupaten Tana Toraja (37,32 persen), Kota Palopo 37,30 persen) dan Kota Parepare (33,46 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa migrasi seumur hidup antarkabupaten lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dan berusia produktif. Jumlah migran seumur hidup berjenis kelamin laki-laki mencapai 50,09 persen terhadap seluruh migran. Dilihat berdasarkan kelompok generasi, migran seumur hidup antarkabupaten di Sulawesi Selatan didominasi oleh Generasi-Z dan generasi milenial. Gabungan migran seumur hidup yang berasal dari kedua kelompok ini mencapai 214 ribu jiwa atau 56,93 persen dari seluruh migran seumur hidup antar kabupaten

Hasil LF SP2020 menunjukkan bahwa angka migrasi risen antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,83 persen. Dengan demikian sekitar dua dari 100 penduduk Sulawesi Selatan merupakan mereka yang bermigrasi antarkabupaten pada lima tahun terakhir. Kota Palopo memiliki angka migrasi risen masuk antarkabupaten tertinggi (8,93 persen), diikuti oleh Kota Parepare (7,94 persen), dan Kabupaten Gowa (6,63 persen). Sementara itu, angka migrasi risen keluar yang tertinggi berada di Kota Palopo (7,51 persen) diikuti Kota Parepare (5,66 persen) dan Kabupaten Tana Toraja (5,21 persen). Migrasi risen antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh generasi milenial dan Generasi-Z. Gabungan migran risen yang berasal dari kedua kelompok ini mencapai 105 ribu jiwa atau 68,16 persen dari seluruh migran risen antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, jumlah komuter di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 113 ribu orang atau mencapai 1,13 persen dari keseluruhan jumlah penduduk umur 5 tahun ke atas. Angka tersebut dapat diartikan sebanyak 1 orang dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dan secara rutin pergi pulang di hari yang sama. Dirinci menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki yang melakukan komuter dua kali lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sedangkan menurut pengelompokan generasi, proporsi generasi milenial yang melakukan komuter paling tinggi dibandingkan generasi lainnya. Sekitar dua dari 100 orang generasi milenial merupakan pelaku komuter.

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi Aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

### **2.2.1. ASPEK KESEJAHTERAAN EKONOMI**

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Sulawesi Selatan dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya ikan.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif bahkan cenderung menurun dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013. Ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua

kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 13,63 persen; disusul Jasa Lainnya sebesar 11,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,28 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,63 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik dibawah.

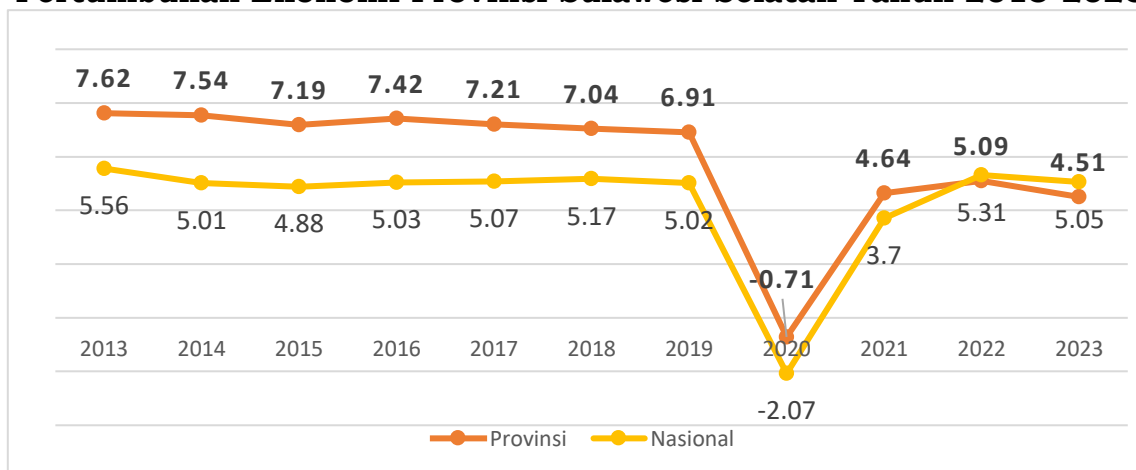
Laporan Perekonomian Provinsi yang dirilis oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa perlambatan perekonomian Sulawesi Selatan tersebut disebabkan oleh dampak El Nino yang menahan kinerja LU Pertanian dan Industri Pengolahan. Dari sisi eksternal, perlambatan disebabkan oleh aktivitas ekonomi negara mitra dagang yang masih tertahan.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada Triwulan IV 2023 dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan impor yang menurun. Namun demikian, penurunan pertumbuhan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi swasta, pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2023 terutama bersumber dari kontraksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, terjadinya fenomena El Nino berdampak pada penurunan produksi komoditas padi dan rumput laut. Lebih lanjut, penurunan produksi industri makanan dan industri logam dasar memengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan. Namun demikian, pertumbuhan LU Pertambangan dan LU Konstruksi menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Grafik II.16.

**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Perlambatan pertumbuhan ekonomi mulai terjadi sejak tahun 2018, dimana ekonomi hanya tumbuh 7,07 persen, lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena beberapa sektor ekonomi (lapangan usaha) yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sebut saja, sektor industri pengolahan yang hanya bertumbuh 0,94 persen di tahun 2018 yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam satu dekade terakhir. Padahal di tahun 2017, sektor industri pengolahan masih bertumbuh 5,03 persen. Perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terjadi karena dua jenis industri yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan mengalami perlambatan. Industri makanan dan minuman hanya bertumbuh 1,13 persen dan industri bahan galian bukan logam mengalami kontraksi -0,02 persen.

Padahal kedua jenis industri ini jika diakumulasikan menyumbang lebih dari 93 persen terhadap struktur industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor ini hanya bertumbuh 5,22 persen dan merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Ini terjadi karena subsektor tanaman hortikultura mengalami kontraksi -3,67 persen, sementara subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan masing-masing bertumbuh lemah di angka 3,36 persen dan 4,47 persen. Terjadinya kontraksi subsektor tanaman hortikultura akibat menurunnya produksi bawang merah, petsai (kubis Cina), jeruk, durian, dll. Pada saat yang sama, melambatnya pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan karena menurunnya volume produksi dan tingkat produktivitas beberapa komoditas unggulan seperti kakao dan kopi robusta. Sedangkan subsektor yang menjadi penopang pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2018 adalah subsektor perikanan dan subsektor peternakan yang masing-masing bertumbuh kuat 7,87 persen dan 13,13 persen. Peran subsektor perikanan menjadi semakin signifikan mengingat subsektor ini menyumbang lebih dari sepertiga terhadap total nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Perlambatan ekonomi terus berlanjut di tahun 2019.

Untuk pertama kalinya, sedikitnya dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah 7 persen, persisnya 6,91 persen. Sektor pertanian kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap perlambatan pertumbuhan. Sektor ini hanya tumbuh 2,78 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu dari empat sektor yang bertumbuh paling rendah di tahun 2019. Namun dibandingkan dengan sektor lainnya yang mengalami perlambatan, melambatnya sektor pertanian berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB. Beberapa lapangan usaha yang sebelumnya tumbuh dua digit juga mengalami perlambatan, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Begitu pula sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami perlambatan di tahun 2018, padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB.

Tabel II.5.

**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2023 (%)**

No	Kategori/Subkategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,86	5,56	5,22	2,78	-0,71	6,38	2,29	0,10
2	Pertambangan dan Penggalian	1,22	3,80	1,11	2,68	0,54	-0,59	0,30	13,66
3	Industri Pengolahan	8,23	5,03	0,94	9,92	-4,57	3,03	9,85	4,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,52	6,10	7,26	6,22	2,59	9,83	17,14	7,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	7,89	5,49	1,73	6,61	4,07	7,27	2,27
6	Konstruksi	7,02	8,74	8,55	8,92	1,56	4,14	1,58	5,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,57	10,42	11,53	9,04	-3,07	6,50	6,55	4,74
8	Transportasi dan Pergudangan	7,75	8,37	10,32	1,74	-21,46	5,17	22,36	8,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,47	11,94	12,71	6,42	-13,68	2,96	17,84	6,42
10	Informasi dan komunikasi	8,13	10,52	11,99	10,99	10,84	6,39	5,26	6,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,63	4,39	4,67	4,00	2,43	1,14	1,14	2,90
12	Real Estate	6,37	4,48	4,63	5,42	3,79	2,58	3,87	4,97
13	Jasa Perusahaan	7,88	8,44	10,02	10,53	-10,05	6,23	13,87	9,76

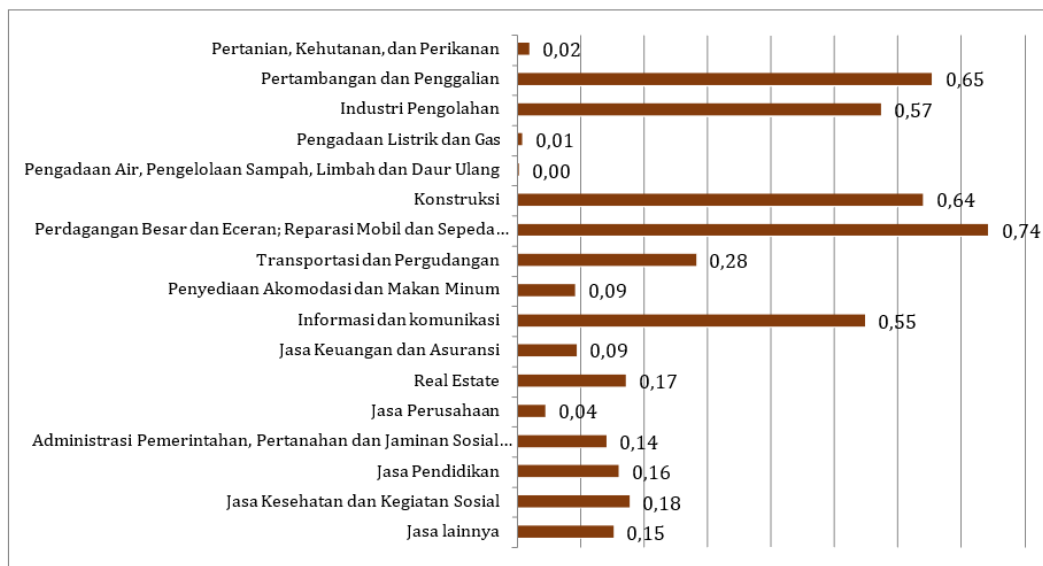
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,22	5,20	9,96	9,98	-0,04	2,92	1,97	3,37
15	Jasa Pendidikan	6,86	9,72	9,77	6,93	5,73	3,67	2,83	2,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,45	8,80	8,59	8,05	10,06	7,77	8,59	7,41
17	Jasa lainnya	9,81	9,58	13,13	9,73	-12,02	7,56	9,61	11,07
	PDRB ADHK	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,71	4,65	5,09	4,51

Sumber : BPS, Prov. Sulsel

Terdapat tiga sektor yang banyak menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yakni pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ditopang oleh adanya beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang mendorong perekonomian di daerah. Beberapa di antaranya seperti rumput laut, padi, jagung dan kakao memiliki konsentrasi produksi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan, bahkan terhadap rata-rata nasional. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan komoditas unggulan ini memerlukan luasan lahan yang besar, karena pengembangan historis cenderung berorientasi pada strategi ekspansi dibandingkan intensifikasi dan hilirisasi. Hal ini didukung dengan analisis forward linkage untuk pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih rendah.

Grafik II.17.

**Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (%)**



Sumber : BPS Prov. Sulsel

Menurunnya **kontribusi sektor industri pengolahan**, menyebabkan proses perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tidak bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri). Ini terjadi akibat sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan, yang menyebabkan sektor ini mengalami penurunan peran secara signifikan, baik terhadap PDRB maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB hanya sebesar 12,75 persen yang merupakan angka terendah sejak tahun 2010. Sedangkan terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini menyumbang -0,62 poin, kedua terendah setelah sektor transportasi dan pergudangan (-0,78%). Dengan kata lain, sektor industri pengolahan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kontraksi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020.

**Pertumbuhan ekonomi yang tinggi** secara umum berdampak positif pada PDRB per kapita. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan nasional meningkat dan ada potensi untuk meningkatkan pendapatan per individu (PDRB per kapita) jika pertumbuhan ini didistribusikan secara merata. Namun, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB per kapita tidak selalu merata atau langsung proporsional. Faktor-faktor seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan ekonomi, dan perubahan dalam struktur ekonomi (misalnya, beralih dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa yang lebih produktif) dapat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak pada PDRB per kapita.

**Pendapatan per kapita** di Sulawesi Selatan selama dua dekade cenderung meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2023 mencapai Rp. 69,70 juta. Ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang diperoleh oleh setiap penduduk di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan perkapita diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, distribusi pendapatan, kebijakan fiskal dan moneter, pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, kondisi infrastruktur, factor demografis, dan kondisi politik dan keamanan. Faktor-faktor ini tidak selalu bekerja secara terpisah, tetapi seringkali saling berinteraksi dalam menentukan tingkat pendapatan per kapita.

Tabel II.6.

**PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2023**

PDRB PERKAPITA (Juta)	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Provinsi</b>	31,03	35,34	39,95	43,82	47,82	52,64	57,18	55,67	59,65	65,59	69,7

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Prov. Sulsel*

PDRB perkapita Sulawesi Selatan pada tahun 2023 berada pada posisi ke 14 provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi. Dalam lingkup regional Sulawesi, masih berada dibawah Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 112,46 juta. Tiga provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi adalah DKI Jakarta (322,62 juta), Kalimantan Timur (215,76 juta), dan Kalimantan Utara (201,75 juta).

Selain itu, berdasarkan data BPS RI diinformasikan juga bahwa kontribusi PRRB Sulawesi Selatan terhadap PDB Nasional di tahun 2023 sebesar 3,18 persen dan berada di urutan ke 9 kontribusi tertinggi. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar adalah DKI Jakarta (16,77 persen), Jawa Timur (14,38 persen), dan Jawa Barat (12,79). Dalam lingkup regional KTI, Sulawesi Selatan memiliki persentase PDRB tertinggi dibanding provinsi lainnya di Sulawesi namun masih dibawah Kalimantan Timur (4,11 persen).

Kondisi ketenagakerjaan menjadi bagian dari gambaran aspek kesejahteraan ekonomi yang penting untuk disajikan, meliputi tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tabel II.7.

**Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TPT Provinsi</b>	5,1	5,08	5,95	4,8	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
<b>TPAK Provinsi</b>	60,49	62,00	60,94	66,11	60,98	63,93	63,80	63,40	64,73	66,18	65,66
<b>TPAK Perempuan</b>	42,18	45,33	44,31	47,47	43,76	47,19	46,71	48,16	49,42	50,46	49,62
<b>TPAK Laki-laki</b>	80,12	80,23	79,01	79,69	79,66	80,15	80,41	79,66	81,03	82,91	82,22

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).** Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. TPT Sulawesi Selatan menunjukkan tren fluktuasi sejak tahun 2013 hingga 2023, namun cenderung menurun. TPT tertinggi tercatat di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid 19. Lebih lanjut, proses pemulihan ekonomi juga mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Adanya ketimpangan antara kebutuhan lapangan kerja terhadap ketersediaan angkatan kerja serta disisi lain masih terdapat penduduk bekerja yang berpenghasilan rendah menjadi penyebab peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga perlu mendorong peningkatan lapangan kerja melalui sektor padat karya sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dalam tiga tahun terakhir, TPT periode Agustus Sulawesi Selatan terus menurun. TPT Sulawesi Selatan ditahun 2020 sebesar 6,31 persen, turun sebesar 1,98 poin di tahun 2023 menjadi 4,33 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Selama dua dekade TPT Sulawesi Selatan dibawah TPT Nasional(TPT Nasional Tahun 2023 mencapai 5,32).

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. TPAK di Sulawesi Selatan menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2013 hingga 2023 pada kisaran angka 60 hingga 66. TPAK Sulawesi Selatan di tahun 2023 turun menjadi 65,66 persen dibandingkan tahun 2022 yang telah mencapai 66,18 persen, dan berada dibawah angka nasional yang mencapai 69,48 persen.

Berita resmi statistik yang dirilis BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2023 menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 4.555.438 orang, turun 36.889 orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,48 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.315.849 orang, turun sebanyak 12.268 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi Makan dan Minum

(1,46 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Jasa Pendidikan (1,08 persen poin). Sebanyak 1.668.175 orang (38,65 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 0,53 persen poin dibanding Februari 2022.

Menurunnya TPAK di Sulawesi Selatan ini perlu disikapi dengan tepat oleh pemerintah daerah. Beberapa faktor pemungkin terjadinya penurunan TPAK Sulawesi Selatan diantaranya adalah kondisi ekonomi yang kurang stabil atau perlambatan ekonomi di Sulawesi Selatan yang mempengaruhi peluang kerja dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan juga pendidikan atau keterampilan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, penurunan TPAK terutama bersumber dari partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode ini.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan** mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja perempuan yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dibandingkan penduduk laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,22 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 49,62 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,85 persen poin. Kondisi ini berbeda di tingkat nasional, karena TPAK Perempuan Indonesia tahun 2023 justru naik menjadi **54,42 persen** dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 54,27 persen.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Fenomena di Sulawesi Selatan, dari waktu ke waktu TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kondisi ini terlihat pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 yang menunjukkan TPAK laki-laki lebih tinggi hingga sekitar 1,6 kali TPAK perempuan. Pada Agustus 2022, TPAK laki-laki mencapai 82,91 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 50,46 persen. Hal tersebut menggambarkan dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 83 orang, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 50 orang yang termasuk angkatan kerja yang menggambarkan bahwa laki-laki masih mendominasi dunia kerja.

Indikator aspek kesejahteraan ekonomi lainnya yang perlu dicermati adalah **Nilai Tukar Petani (NTP)**, yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Sulawesi Selatan sebagai provinsi lumbung pangan nasional, dengan kontribusi sektor pertanian menyumbang 21,69 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan di tahun 2023 bermakna bahwa sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Olehnya itu penting untuk mengetahui gambaran Nilai Tukar Petani untuk mengetahui apakah sektor pertanian sebagai sektor utama perekonomian regional, berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan petani. NTP menunjukkan NTP > 100, berarti indeks harga yang diterima lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Dengan mencermati NTP Gabungan beserta NTP sub sektor pembentuknya, dapat memberikan gambaran daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi.

NTP Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan bulan November 2023 sebesar 113,74 atau naik 0,09 persen dibandingkan dengan NTP bulan Oktober 2023 sebesar 113,64. NTP setiap subsektor pada periode waktu yang sama adalah NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 108,40; Subsektor Tanaman Hortikultura (NTPH) sebesar 122,27; Subsektor Tanaman Perkebunan

Rakyat (NTPR) sebesar 132,23; Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 108,15; dan Subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 109,91. Pada tahun 2023 **Nilai Tukar Nelayan Perikanan** lebih tinggi dibandingkan **Nilai Tukar Petani Pangan**.

NTN yang relative lebih tinggi dibandingkan NTP dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah produk yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan kemungkinan memiliki permintaan yang lebih stabil atau lebih tinggi dibandingkan dengan produk pertanian pertanian, produk laut seringkali memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian pangan, beberapa hasil lau memiliki akses yang lebih baik ke pasar ekspor internasional, dan teknologi pengelolaan sektor perikanan yang lebih dapat meningkatkan produktifitas dan hasil akhir produk.

Tabel II.8.

**Nilai Tukar Petani Gabungan dan Nilai Tukar Petani menurut Sub Sektor di Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2023**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Juni)
<b>NTP Pangan</b>	101,4	98,4	103,7	100,4	99,17	102,3	100,5	95,85	93,79	91,34	<b>97,55</b>
<b>NTP Hortikultura</b>	106,9	108,7	115,6	115,2	107,8	106,1	113,9	103,8	105,5	125,4	<b>129,5</b>
<b>NTP Perkebunan</b>	107,5	108,7	105,4	98,04	93,64	95,64	95,62	97,71	117,7	120,5	<b>123,5</b>
<b>NTP Peternakan</b>	106,5	105,5	107,4	109,8	109,7	110,9	113,6	103,3	98,89	105,5	<b>108,9</b>
<b>NTN Perikanan</b>	105,7	104,8	101,4	100,7	105,1	105	106,7	99,46	107,6	109,4	<b>112</b>
<b>NTN Perikanan Tangkap</b>	102,5	106,9	103,6	103,9	111	107,6	107,2	103,6	107,6	108,5	<b>113,3</b>
<b>NTN Perikanan Budidaya</b>	108,1	103,2	99,74	98,39	100,8	103,1	106,3	96,52	107,6	110,1	<b>111,1</b>
<b>NTP Gabungan</b>	105	104,2	106,4	103,9	101,7	103,3	104,4	97,56	100,4	101,1	<b>106,1</b>

### 2.2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan dapat diketahui dari kesejahteraan sosial budaya yang ditunjukkan oleh beberapa kondisi bidang kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender.

#### **Kondisi Kesehatan Masyarakat**

Gambaran kondisi kesehatan di Sulawesi Selatan diwakili oleh beberapa indikator dengan capaian dari tahun 2013 hingga 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.9.

**Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>UHH Provinsi</b>	70,08	70,43	70,57	73,11	73,40	73,63
<b>UHH Laki-laki</b>	68,2	68,54	68,68	71,08	71,27	71,41
<b>UHH Perempuan</b>	72,1	72,42	72,56	75,25	75,64	75,96
<b>Jumlah kematian ibu</b>	139	144	133	195	174	184
<b>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>	92	94	86	129	119	133
<b>Prevalensi Stunting pada Balita (%)</b>	35,6	30,59	30,59	27,4	27,2	27,4

<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)</b>	91,99	90,97	92,44	95,04	94,80	91,52
<b>Tingkat prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk</b>	208	214	160	162	228	288
<b>Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)</b>	49	61	50	61	71	58

Sumber Data : BPS dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari **Umur Harapan Hidup**, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,63 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). UHH penduduk perempuan sebesar 75,96 lebih tinggi dibandingkan UHH penduduk laki laki- laki yang hanya sebesar 71,41. Penting untuk dicatat bahwa umur harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan dapat mencerminkan perbaikan secara keseluruhan dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga dapat menyoroti kesenjangan kesehatan antara jenis kelamin yang memerlukan perhatian dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan program intervensi yang lebih baik.

**Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)** merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan maternal dalam suatu wilayah. Tingginya AKI bisa mencerminkan beberapa kondisi atau masalah dalam sistem kesehatan dan masyarakat, seperti **keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, kualitas perawatan kesehatan, faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, kesehatan umum populasi** termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular serta akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan gizi yang memadai, serta efektivitas pengaturan kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan.

Menurunkan jumlah kematian ibu merupakan salah satu target utama dari target pembangunan berkelanjutan (SDGs-Sustainable Development Goals). Sensus Penduduk 2020 memberikan informasi bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki AKI sebesar 192 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di angka 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Hasil SP 2020 juga menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan kematian ibu di perdesaan yang jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yakni 67,06 persen banding 32,94 persen. Perhitungan angka kematian ibu (AKI) di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 133 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian ibu sebesar 184.

Ketimpangan kematian ibu yang terjadi di perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perkotaan memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang banyak, ketersediaan tenaga kehatan di perdesaan yang masih sangat kurang, dan rendahnya kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan ketika terjadi komplikasi persalinan atau darurat medis, dibandingkan perdesaan. SP 2020 mencatat sebesar 57 persen kematian maternal dialami oleh rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan terakhirnya pendidikan dasar. Pembangunan kualitas remaja menjadi isu penting dikarenakan berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2021,

persentase perempuan berumur dibawah 19 tahun yang pernah melahirkan di Sulawesi Selatan (23,35persen) lebih tinggi dari nasional (21,36 persen). Tingkat fertilitas remaja yang tinggi tidak hanya berakibat pada aspek fisik namun juga pada aspek sosial. Berbagai penelitian terkait fertilitas remaja menyebutkan bahwa tingkat fertilitas yang tinggi akan berakibat pada peningkatan angka kematian ibu, tingkat pendidikan yang rendah, dan meningkatkan kemiskinan (UNFPA, 2022).

Selain kematian ibu, **Prevalensi Stunting** menjadi indikator untuk memperoleh gambaran kesejahteraan sosial masyarakat. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (*stunting, wasting, underweight, overweight*) yang determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2028 hingga tahun 2023. Meskipun prevalensi stunting menurun, tapi terbilang masih cukup lambat. 2 tahun terakhir hanya turun 0,2%. Angka ini juga masih diatas rata-rata nasional yang hanya 21,6% dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya pada regional Sulawesi masih lebih tinggi dari Gorontalo 23,8 persen dan Sulawesi Utara 20,5 persen.

Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyaki. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

Indikator lainnya yang menjadi gambaran kondisi pada aspek kesejahteraan sosial dari sektor kesehatan adalah angka Prevalensi Tuberkulosis. **Prevalensi Tuberkulosis** merujuk pada jumlah kasus TBC yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam jumlah kasus per 100.000 orang per tahun. Prevalensi merupakan indikator penting dalam epidemiologi untuk memahami tingkat penyebaran dan risiko terkena TBC dalam suatu populasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, Sulawesi Selatan merupakan satu dari delapan provinsi penyumbang Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk di Sulawesi Selatan cenderung menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2021, namun meningkat di tahun 2022 dan mencapai 288 di tahun 2023. Dari penemuan kasus di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa secara absolut terjadi peningkatan penemuan kasus namun hal ini tidak berarti telah mencapai keberhasilan dalam upaya pengendalian TBC. Masih dibutuhkan banyak upaya inovatif untuk menuntaskan permasalahan TBC di Sulawesi Selatan mulai dari penemuan terduga TBC, penegakan diagnosis dengan penggunaan teknologi yang lebih cepat, penanganan pasien dan pendampingannya sampai sembuh.

**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** dilakukan melalui program DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) yaitu pendekatan terstandar dalam penemuan dan pengobatan tuberkulosis (TB) yang direkomendasikan oleh WHO. Program ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien TB yang ditemukan menerima pengobatan yang tepat dan diawasi dengan baik. Secara umum, proporsi kasus TB yang terdeteksi dalam

program DOTS mengacu pada jumlah kasus TB yang secara aktif diidentifikasi, didiagnosis, dan ditangani melalui program ini dibandingkan dengan total kasus TB yang ada dalam populasi. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%) di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 berfluktuasi, penurunan terjadi di tahun 2020 menjadi 50% seiring adanya wabah covid 19. Tahun 2023 juga mengalami penurunan penemuan kasus dengan adanya peningkatan estimasi kasus TBC secara nasional berdasarkan Global TB Report WHO meningkat menjadi 1.060.000 kasus dan ini juga diikuti estimasi kasus di Sulawesi Selatan meningkat menjadi 47.075 kasus sehingga proporsi kasus yang ditemukan hanya 58%. Berbagai upaya masih perlu ditingkatkan khususnya dalam penemuan kasus dalam bentuk skrining secara aktif, intensif dan massif pada kelompok masyarakat berisiko terhadap penularan TBC. Hal ini penting dalam upaya mencapai eliminasi TBC di Sulawesi Selatan tahun 2030.

**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional** menjadi salah satu indikasi gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care).

Kepesertaan jaminan Kesehatan nasional penduduk Sulawesi Selatan meningkat dari 69,84 persen di tahun 2017 menjadi 97,53 persen di tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pemungkin, diantaranya adalah meningkatnya **kesadaran dan pendidikan masyarakat**, aksesibilitas terhadap fasilitas pendaftaran dan layanan kesehatan termasuk di daerah pedesaan atau terpencil, implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menjelaskan lonjakan signifikan dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga 2023. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam upaya untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan finansial bagi penduduk Sulawesi Selatan.

#### **Kondisi Perlindungan Sosial**

Gambaran aspek kesejahteraan sosial budaya pada lingkup perlindungan sosial di Sulawesi Selatan dicerminkan dari kondisi Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, dan Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**Tingkat Kemiskinan** di Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2023 mengalami tren cenderung menurun. Selama dua dekade, kemiskinan di Sulawesi Selatan menurun sebesar 1,62 persen, dari 10,32 persen di tahun 2013 menjadi 8,7 persen di tahun 2023 atau dari jumlah penduduk miskin sebanyak 863,20 ribu jiwa di tahun 2013 menjadi 788,85 ribu jiwa pada tahun 2023. Posisi kemiskinan Sulawesi Selatan Tahun 2023 berada di bawah nasional, namun masih berada pada urutan ke 17 provinsi dengan kemiskinan tertinggi dari 35 provinsi di tahun ini.

Berita resmi statistik menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang, meningkat 11,41 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk

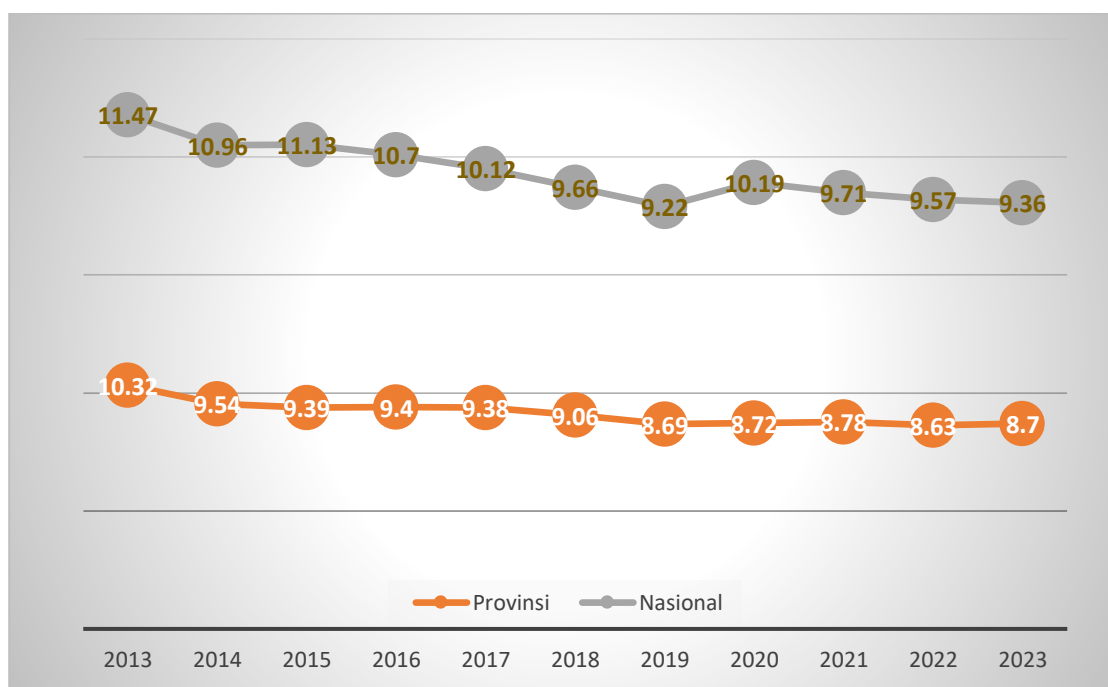
miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 5,01 persen, dan persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,91 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang (dari 207,81 ribu orang pada September 2022 menjadi 211,48 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 2,9 ribu orang (dari 574,51 ribu orang pada September 2022 menjadi 577,37 ribu orang pada Maret 2023).

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi yang dirilis Bank Indonesia menyebutkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2023 sejalan dengan kenaikan indeks harga bahan makanan dan nonmakanan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan rentan dipengaruhi pergerakan harga.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Pada Maret 2023, **kedalaman kemiskinan di Sulawesi Selatan** mengalami kenaikan. **Garis Kemiskinan** pada bulan tersebut tercatat sebesar **Rp 436.025,- per kapita per bulan**, dengan komposisi **Garis Kemiskinan Makanan** sebesar **Rp 325.418,- (74,63 persen)** dan **Garis Kemiskinan Bukan Makanan** sebesar **Rp 110.607,- (25,37 persen)**.

Grafik II.18.

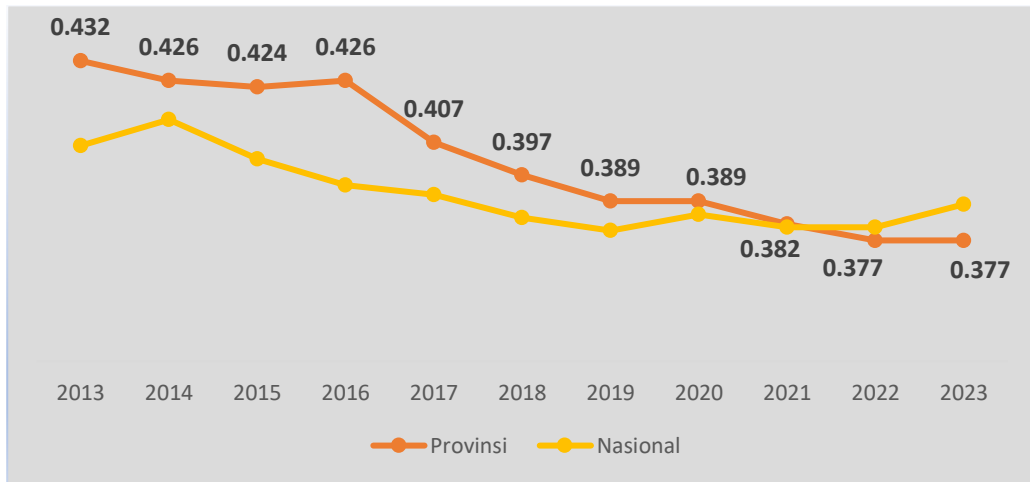
**Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gini Rasio** Sulawesi Selatan mengalami tren fluktuatif pada tahun 2013 hingga 2019, namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2023. Hal ini mengindikasikan perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan sebesar 0,377. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 akan tetapi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377. Secara nasional, Gini Ratio Sulawesi Selatan menempati urutan ke tujuh dengan ketimpangan tertinggi.

Grafik II.19.  
**Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**



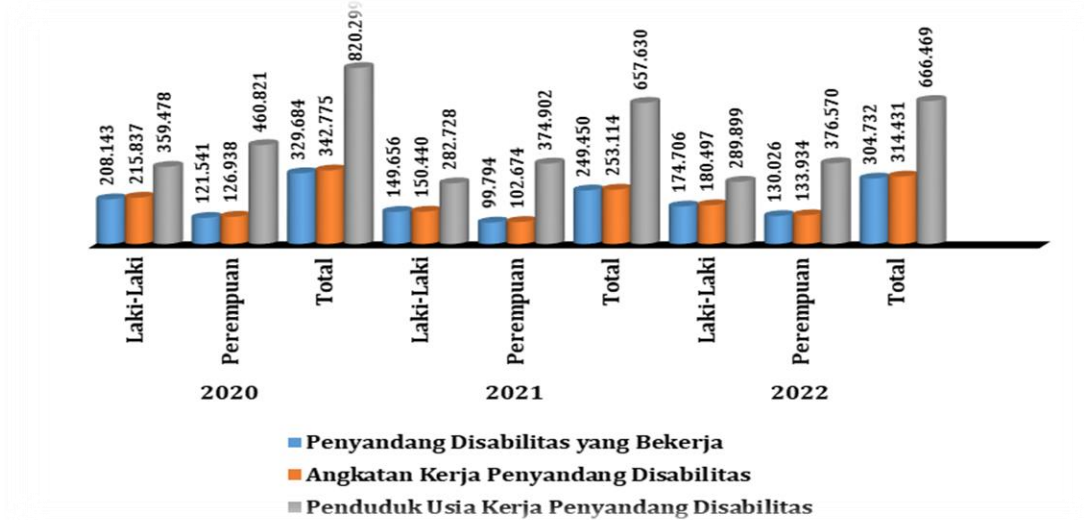
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,386, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,86 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,32 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,40 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

**Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal** merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja tahun 2021 terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan persentase penyandang disabilitas laki-laki yang bekerja lebih besar daripada perempuan.

Grafik II.20.

**Jumlah Disabilitas yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022**



Sumber: Ketenagakerjaan Dalam Data, Tahun 2022

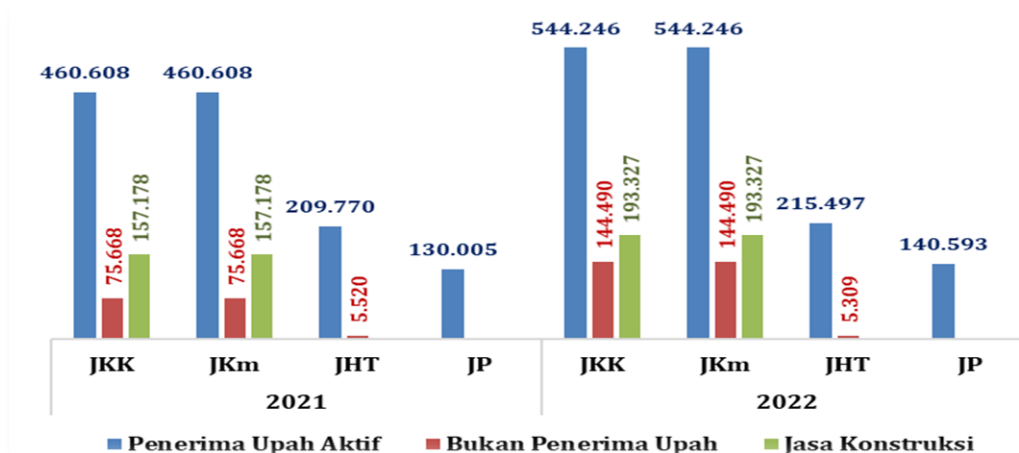
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal penting untuk diketahui, karena hal ini mencerminkan inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan implementasi dari hak asasi manusia dan kesetaraan, sekaligus membantu mengurangi stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas dan mendorong perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja.

**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif sendiri terdiri dari segmen Penerima Upah (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi. Tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang terdapat pada 22.417 perusahaan terdaftar yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 544.246 jiwa yang mencakup JKK dan JKm mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 83.638 jiwa. Jumlah peserta yang tercakup dalam JHT tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 211 jiwa. Sedangkan jumlah kepesertaan jaminan pensiun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10.534 jiwa dari tahun sebelumnya.

Grafik II.21.

**Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022**



Sumber: Ketenagakerjaan Dalam Data, Tahun 2022

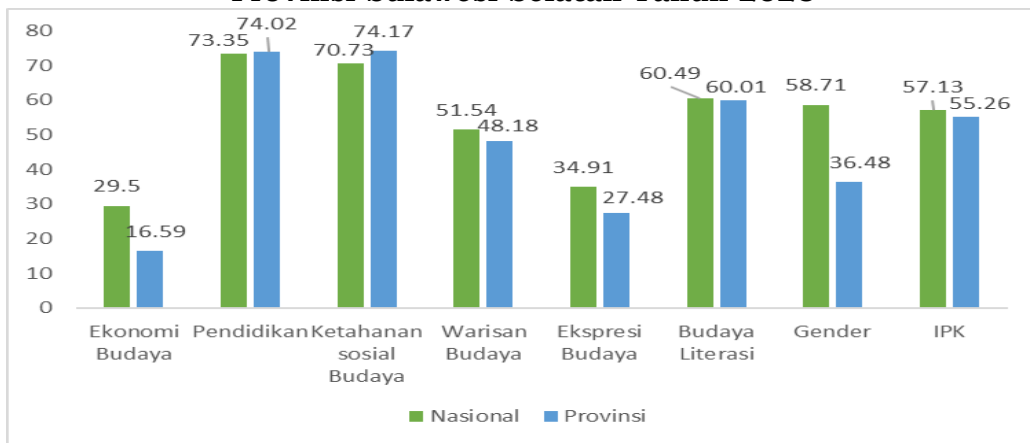
### Kondisi Bidang Keagamaan dan Kebudayaan

Kondisi bidang keagamaan dan kebudayaan menjadi gambaran aspek kesejahteraan bidang sosial budaya . melalui indikator indeks pembangunan kebudayaan dan indeks kerukunan umat beragama.

**Indeks Pembangunan Kebudayaan** merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Posisi Capaian Sulawesi Selatan pada skala Pulau Sulawesi masih diatas dari Provinsi lain di Pulau Sulawesi, namun masih dibawah Nasional. Hal ini dapat dilihat pada Skor IPK Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 49,82 pada tahun 2018 menjadi 55,26 pada tahun 2023.

Grafik II.22.

#### Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dari ke tujuh dimensi tersebut, terdapat 2 dimensi yang capaiannya diatas nasional yaitu dimensi Pendidikan meningkat 0.67 poin terhadap capaian nasional dan Ketahanan Sosial Budaya berada pada poin 74.17 capaian ini meningkat sebesar 3.44 poin dari capaian nasional sementara kelima dimensi lainnya provinsi Sulawesi Selatan berada dibawah capaian nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapaitas dan jaringan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari, intensitas pertunjukkan seni, penggunaan produk tradisional, dan peningkatan keterlibatan penduduk dalam pertunjukkan seni maupun upacara adat, serta peningkatan sinergitas antara lembaga dan instansi untuk pemajuan kebudayaan. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

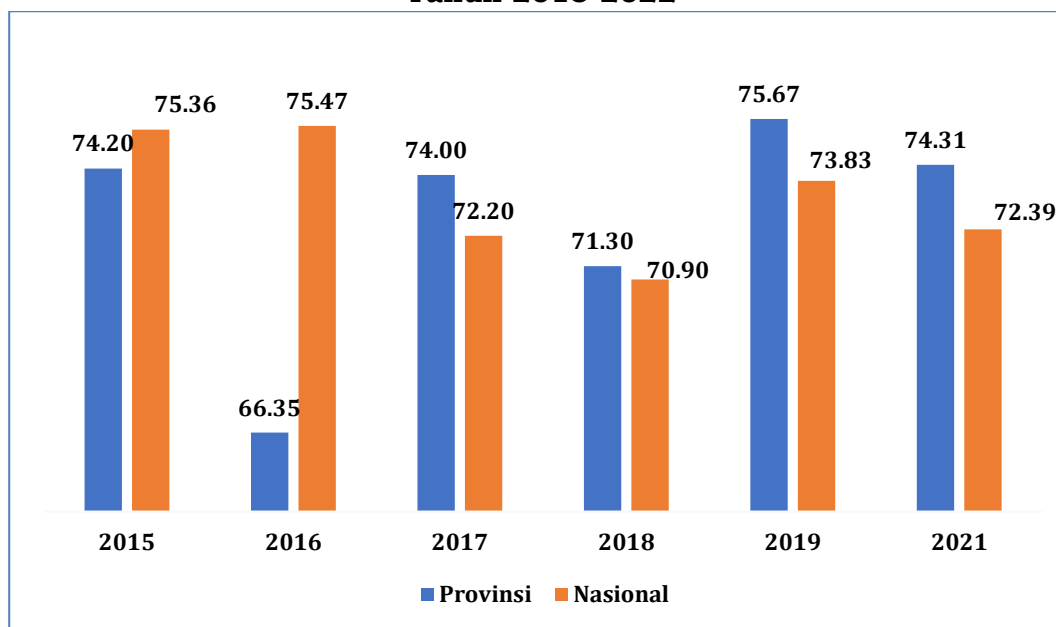
**Indeks Kerukunan Umat Beragama** menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Berdasarkan data selama 7 tahun terakhir semenjak dilakukannya perhitungan indikator ini, capaian Sulawesi Selatan berfluktuasi dan cenderung meningkat. Budaya masyarakat Sulawesi Selatan yakni Sipakatau, Sipakainga dan Sipakalebbi merupakan salah satu faktor pendorong terbentuknya kerukunan umat beragama. Hal ini dikuatkan dengan fakta sejarah dan perkembangan paham keagamaan masyarakat di Sulawesi Selatan, tidak pernah tercatat terjadi konflik sosial keagamaan di Sulawesi Selatan, yang ada berkembangnya paham keagamaan yang diduga menyimpang/ sesat dan berpolemik di masyarakat.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dibangun dari 3 indikator tunggal yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Perbandingan capaian setiap indikator pembentuk IKUB pada tahun 2018 dan 2021 menunjukkan penurunan toleransi dan kerjasama umat beragama di Sulawesi Selatan. Posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah perlintasan khususnya di Kawasan Timur Indonesia juga menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya paham keagamaan yang kurang moderat yang cenderung ekstrem serta tidak toleran kepada kelompok lainnya. Selain itu berkembangnya eksremisme, klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengetahuan antar masyarakat dan wilayah juga berkontribusi terhadap penurunan toleransi dan kerjasama beragama di Sulawesi Selatan.

Grafik II.23.

**Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2015-2022**



Sumber: Kementerian Agama

**Kondisi Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender**

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Sulawesi selatan dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan pemuda, dan indeks ketimpangan gender.

**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga** dipengaruhi oleh Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur, Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi, dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari (70,74) di tahun 2020 menjadi (74,30) naik (3,56) point pada tahun 2022.

Dibandingkan dengan provinsi lain pada regional Sulawesi, pada tahun 2020 IKK Sulawesi Selatan peringkat 2 setelah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan pada tahun 2021 IKK Sulawesi Selatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi pada regional Sulawesi bahkan di wilayah Indonesia Bagian Timur. IKK Sulawesi Selatan meningkat di tahun 2021 (74,30) dan berada di peringkat 11 nasional dan diatas IKK Nasional (73,43).

Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan Kualitas Keluarga di Sulawesi Selatan, karena pada tahun 2022 angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan mencapai 9,33 persen, berada di atas rata rata nasional yang hanya 9,23 persen. Selain itu, Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Orang tua mencapai 7,30 diatas rata rata nasional 4,67 persen, dan Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,06 persen menjadi 5,43 persen di tahun 2021 dan berada di atas rata rata nasional. Data ini menunjukkan kondisi bahwa kualitas pengasuhan anak dan melemahnya nilai-nilai dan pemenuhan kewajiban orang tua/keluarga terhadap anak, masih menjadi tantangan kedepan.

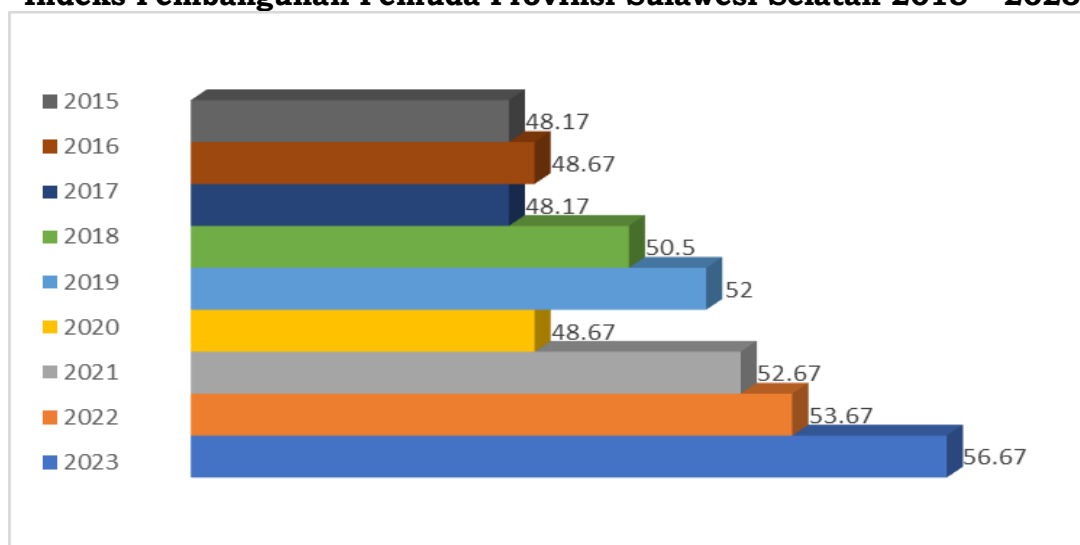
**Indeks Perlindungan Anak** merupakan alat ukur sejauhmana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan data IPA tahun 2018 sampai 2022, pertumbuhan capaian indeks di Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2021, berada pada posisi negatif yaitu -5,07 persen. Namun pada tahun 2022 pertumbuhannya kembali positif yaitu 3,64 persen. Posisi ini sama dengan pencapaian pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid 19. Jika dilihat dalam skala regional Sulawesi, dengan pengecualian Sulut (64,59), posisi Sulawesi Selatan masih di atas regional Sulawesi, dimana indeks Sulawesi Tengah sebesar 56,74; Sulawesi Tenggara 55,31; Gorontalo 57,90; dan Sulawesi Barat 52,70. Dalam skala Indonesia IPA Sulawesi Selatan masih dibawah nasional yakni Sulawesi Selatan 60,37 dan Indonesia 63,30.

Jika dilihat berdasarkan indikator pembentuknya pada setiap kluster, terdapat beberapa capaian indikator yang perlu mendapat perhatian kedepan, antara lain: a) Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dan Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar yang cenderung turun; b) Persentase anak umur 7-17 tahun yang mengakses internet menurut tujuan mengakses, paling banyak adalah untuk mendapatkan hiburan sebesar 81,47 persen, bukan untuk tujuan pembelajaran; c) Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, mencapai 5,43 persen (lebih tinggi dari persentase nasional yang hanya 3,69 persen); d) Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu 6,17 di tahun 2021 (angka nasional 3,75); e) Persentase perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih di atas angka nasional, bahkan mengalami peningkatan di tahun 2022; f) Persentase anak stunting dan Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya <1400 kkal, masih lebih tinggi dari persentase nasional; g) Persentase Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang dilakukan anak-anak sangat menurun dari 41,03 persen di tahun 2020 menjadi 27,17 persen di tahun 2021; i) Meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring, serta j) Pentingnya dukungan kesehatan mental dan psikosial termasuk membangun resiliensi yang ditujukan bagi anak anak dari usia dini hingga usia 18 tahun.

**Indeks Pembangunan Pemuda** menjadi ukuran untuk pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dimaksudkan untuk menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda-pemuda untuk cerdas dalam mengambil peran dan peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Selatan dan nilai rata-rata nasional relatif baik. Hal ini terlihat pada domain pendidikan yang lebih tinggi di Sulawesi Selatan yaitu 73 sedangkan capaian nasional sebesar 70 (selisih 3 poin). Domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki nilai lebih tinggi yaitu 75 sedangkan capaian nasional 70 (selisih 5 poin). Disisi lain domain lapangan kerja dan kesempatan kerja memiliki nilai yang sama yaitu 45. Sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi masing-masing memiliki selisih 3 poin.

Grafik II.24.

**Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan 2015 – 2023**



Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Tantangan untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil cukup tinggi yaitu 13,54 persen, sedangkan capaian nasional sebesar 12,63 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Solusi yang dapat dilakukan adalah Pemerintah Sulawesi Selatan dapat melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif dan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, pada domain lapangan kerja dan kesempatan kerja. Indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih yang masih rendah yaitu 0,34 sedangkan rata-rata nasional yaitu 0,53. Untuk meningkatkan persentase pemuda wirausaha kerah putih maka diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda dan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha.

Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mendorong persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan karena memiliki capaian di bawah rata-rata nasional yaitu 69,74 persen sedangkan capaian nasional yaitu 71,44 persen. Rekomendasinya adalah pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda dan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat provinsi.

Selain itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi yaitu indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih rendah yaitu 20,69 persen sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 24,71 persen. Rekomendasi untuk meningkatkan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal adalah adanya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Selain itu, indikator angka perkawinan usia anak juga masih tinggi yaitu 7,48 sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 6,92. Rekomendasi kebijakan, yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi. Selain itu juga perlu adanya penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menuju Indonesia emas 2045, IPP diharapkan menjadi input dalam finalisasi Desain Besar Kepemudaan Nasional sebagai peta jalan kepemudaan. Bonus demografi harus dipastikan berhasil dan memperkuat posisi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, karenanya upaya pembangunan pemuda saat ini terus dipercepat pemerintah. IPP merepresentasikan seberapa besar pemerintah telah melakukan intervensi program dan kegiatan menjadi takaran keberhasilan intervensi dan domain yang memiliki angka capaian rendah dan perlu penanganan ekstra. Dari indikator itu juga menjadi langkah untuk menyusun rencana yang menentukan kegiatan secara optimal.

Gambaran kesetaraan gender di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kondisi **Indeks Ketimpangan Gender**. Indeks Ketimpangan gender di Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 hingga 2023 secara konsisten menurun. IKG Sulawesi Selatan tahun 2018 turun 0,102 poin pada tahun 2023, dari 0,492 menjadi 0,366. Hal ini mengindikasikan menurunnya ketimpangan gender di Sulawesi Selatan, dan bahkan masih lebih baik jika dibandingkan nasional.

Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi pemberdayaan dan kesehatan reproduksi. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 5,70 persen tahun 2022 menjadi 4,20 persen pada tahun 2023. Selain itu indikator wanita melahirkan anak lahir hidup pertama kurang dari usia 20 tahun juga menurun dari yang semula 29,30 persen menjadi 27,90 persen di tahun 2023.

Grafik II.25.

**Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas, mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan meningkat dari 38,38 persen menjadi 40,59 persen, sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 41,53 persen menjadi 43,64 persen. Sedangkan indikator keterwakilan di parlemen pada tahun 2023 menunjukkan penurunan persentase perempuan dari 27,06 persen menjadi 25,88 persen di tahun 2023. Adapun kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di tahun 2023 semakin lebar terlihat dari penurunan TPAK perempuan yang lebih dalam daripada penurunan TPAK laki-laki.

### **2.3. ASPEK DAYA SAING**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan kedalam 12 pilar daya saing meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

**Indeks Daya Saing Daerah** Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 3,7 meningkat 0,35 poin dari tahun 2022, dan lebih tinggi dari skor nasional yang hanya mencapai 3,44. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan skor IDSD tertinggi diluar Jawa dan Bali, menempati urutan 7 provinsi tertinggi setelah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dari 12 pilar pembangun indeks daya saing daerah, capaian pilar yang paling rendah adalah pilar ke tujuh (pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam system produksi) sebesar 2,61, diikuti pilar ke 2 (infrastruktur yang dapat mendukung aktifitas perekonomian daerah yang bernilai tambah) sebesar 3,33 poin, dan pilar ke 8 (pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja) pada poin 3,35. Adapun capaian tertinggi pada pilar ke 10 (ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam) sebesar 4,68 poin.

Aspek daya saing daerah adalah berbagai faktor dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Penyajian gambaran kondisi daerah terkait aspek daya saing dibagi dalam 4 hal yaitu Daya Saing Ekonomi Daerah, Daya Saing Sumber Daya Manusia, Daya Saing Infrastruktur Wilayah, dan Daya Saing Iklim Investasi.

#### **2.3.1. DAYA SAING EKONOMI DAERAH**

Daya saing ekonomi daerah memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dapat bersaing dalam konteks ekonomi regional, nasional, maupun global. Daya saing ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi.

Gambaran kondisi daerah dalam lingkup daya saing ekonomi yang dijelaskan pada bagian ini meliputi kondisi PDRB industri pengolahan, kepariwisataan, kewirausahaan dan koperasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, ekspor barang dan jasa, pajak dan retribusi, serta inflasi.

Tabel II.10.

**Kondisi Capaian Indikator Produktifitas Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan**

**Tahun 2013-2023**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)</b>	13,71	13,98	13,88	14,06	13,82	12,87	13,17	12,76	12,49	12,76	12,85
<b>Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)</b>	1,38	1,38	1,34	1,32	1,37	1,41	1,41	1,25	1,21	1,32	1,34
<b>Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara</b>	na	13341	13091	16862	18335	14126	17771	3598	0	5914	17354
<b>Proporsi Usaha Kecil</b>	na	na	na	na	na	12	12	10	10	11	na
<b>Rasio Kewirausahaan</b>	na	na	na	na	na	2,6	2,6	2,9	3,0	3,25	na
<b>Return on Aset (ROA) BUMD (%)</b>	na	na	na	na	na	na	na	na	2,34	2,19	2,15

Sumber Data : BPS data diolah dan Data Sektoral Provinsi

**Rasio PDRB Industri Pengolahan** menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi. Perkembangan industri pengolahan selama dua dekade cenderung menurun, dari 13,71 di tahun 2013 menjadi 12,85 pada tahun 2023. Namun demikian, dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami perbaikan yang didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor industri logam dasar sebesar 136,32 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar, dan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 32,41 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB mengalami tren fluktuasi dimana mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019, meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya.

Di bidang pariwisata, keberadaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai salah satu dari lima belas pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya **jumlah wisatawan manca negara** yang cenderung meningkat dari tahun 2014 sejumlah 13.341 orang menjadi 17.354 orang pada tahun 2023. Pada masa pandemi Covid 19 terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebagai dampak pemberlakuan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB). Meskipun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan cenderung meningkat, namun pariwisata unggulan Sulawesi Selatan masih perlu lebih dioptimalkan karena masih terbatas ragam atraksi, aksesibilitas dan amenities serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan.

Sektor pariwisata memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada lapangan usaha **Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**. Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung fluktuatif pada kisaran 1,2 hingga 1,4. Pada tahun 2013 hingga 2019 terus meningkat hingga angka 1,41, kemudian di tahun terjadinya pandemi Covid 19 menurun pada angka 1,21, dan kembali membaik pada 2 tahun terakhir menjadi 1,34 pada tahun 2023.

**Ekonomi kreatif** dikembangkan sebagai respons terhadap perubahan dalam struktur ekonomi global yang semakin didorong oleh inovasi, kreativitas, dan keahlian intelektual. Ini mencakup berbagai industri dan aktivitas ekonomi seperti seni pertunjukan, media, desain, periklanan, mode, arsitektur, dan lainnya yang menghasilkan nilai tambah dari ide-ide dan ekspresi kreatif. Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kemenparekraf, pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin, pelaku ekraf laki-laki sebesar 63,52 persen dan pelaku ekraf Perempuan sebesar 36,48 persen. Sub sektor ekonomi kreatif terbanyak di bidang kuliner sebesar 24,59 persen, seni pertunjukan sebesar 15,83 persen, dan musik sebesar 14,62 persen, serta di bidang lainnya sebesar 44,96 persen. Jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak berada di Kota Makassar mencapai 60,44 persen, 13,03 persen di Gowa dan di Maros sebesar 3,08 persen.

Kondisi kewirausahaan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan meskipun demikian **rasio kewirausahaan** Sulawesi Selatan pada tahun 2022 baru mencapai 3,25 persen, dibawah capaian Nasional yang mencapai sebesar 3,95 persen. Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan perlu didukung dengan program pelatihan bagi wirausaha, akses pembiayaan, serta pendampingan untuk UMKM naik kelas.

Secara umum, kewirausahaan di Sulawesi Selatan cukup dinamis dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kewirausahaan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah pengembangan infrastruktur untuk pengembangan usaha, peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, insentif kepada pelaku usaha, perluasan akses permodalan, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang lebih intensif kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

**RoA (Return on Assets) BUMD** mencerminkan seberapa baik aset yang dimiliki BUMD digunakan untuk menghasilkan laba. RoA BUMD menghitung seberapa efektif BUMD dalam menghasilkan keuntungan (laba bersih) dari total aset yang dimilikinya. RoA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang lebih rendah bisa mengindikasikan bahwa BUMD mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. RoA BUMD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 2,34, turun menjadi 2,15 di tahun 2023. Kenaikan laba bersih dari tahun 2021 ke tahun 2023 hanya sebesar 2 persen, sementara kenaikan total asset mencapai 11 persen.

BUMD Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam laporan keuangan BUMD ini adalah PT. Sulsel Citra Indonesia (PT. SCI), PT. Jamkrida Sulsel, PT. Bank Sulselbar, PT. Sulsel Andalan Energi, dan Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 5 BUMD ini, perolehan laba bersih tertinggi dicapai PT Bank Sulselbar sebesar Rp. 651.826.055.112 dan PT Sulsel Andalan Energi laba bersihnya paling rendah (Rp. -6.643.238). BUMD dengan total asset terbesar

dicapai oleh PT Bank Sulselbar sebesar Rp. 30.799.458.215.010 dan Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tidak memiliki asset yang tercatat atau total asetnya 0.

Tabel II.11.

**Total Aset dan Laba Bersih BUMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023**

Tahun	2021	2022	2023
<b>Total Aset BUMD (Rp)</b>	28.140.903.504.716	30.005.771.679.628	31.150.786.587.564
<b>Lab Bersih BUMD (Rp)</b>	659.446.348.948,99	660.114.664.580,59	670.926.810.102,06
<b>RoA BUMD</b>	2,34	2,19	2,15

Sumber Data : Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited, Biro Ekbang Provinsi

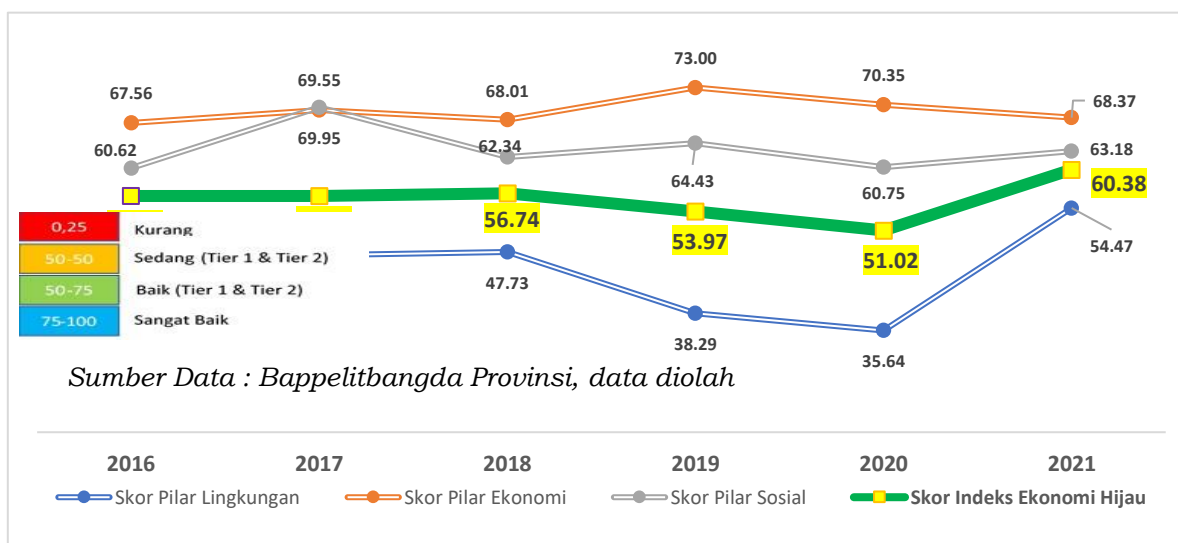
Daya saing ekonomi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator diatas perlu dibangun dalam kerangka keberlanjutan dalam ekosistem **ekonomi hijau dan ekonomi biru**.

**Indeks Ekonomi Hijau** mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan berada pada level baik atau capaian efektivitas transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju ekonomi hijau semakin membaik dari tahun 2016 ke tahun 2021. Nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan tahun 2015 hingga 2018 mengalami tren peningkatan, meskipun pada tahun 2019 hingga 2020 sempat menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai nilai indeks 60,38 poin.

Grafik II.26.

**Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2021**



Capaian Green Economy Index (GEI) Sulawesi Selatan pada tingkat regional menunjukkan trend yang semakin baik, namun progresnya masih lebih rendah dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Capaian GEI Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh pilar ekonomi, dimana nilai indikator intensitas emisi dan intensitas energi final merupakan indikator yang paling tinggi pengaruhnya. Untuk indikator capaian kualitas air memiliki capaian yang masih rendah diantara pilar yang lainnya. Kapasitas pendanaan yang bersumber dari pendanaan alternatif berbasis lingkungan masih rendah sehingga perlu mengintegrasikan kebijakan indeks ekonomi hijau pada semua sektor untuk memperoleh dukungan pendanaan.

Pada konteks paradigma keberlanjutan (sustainability paradigm), terminologi "**Ekonomi Biru**" dapat menyempurnakan konsep Ekonomi Hijau karena memuat prinsip keberlanjutan yang lebih luas dan komprehensif. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environment (melestarikan lingkungan).

Indonesia sebagai negara nusantara (negara kepulauan) yang hampir seluruh batas negaranya adalah laut, maka semua ekosistem alami di dalam wilayah Indonesia, termasuk ekosistem perairan darat, berada di dalam lingkup konsep negara kepulauan tersebut. Dalam konteks ekosistem alami Indonesia, ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan sumber daya akuatik di laut dan darat yang mempengaruhi nilai, keberlanjutan fungsi alami, dan distribusi manfaatnya.

Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Saat ini, IBEI dihitung di tingkat provinsi dan dirata-ratakan untuk mendapatkan angka nasional.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perhitungan terhadap IBEI provinsi dan rata-rata nasional, dimana rata-rata IBEI di tingkat nasional sebesar 43,98 pada tahun 2023, naik dari posisi tahun 2022 sebesar 41,28. Nilai IBEI distandardisasi antara 1 hingga 100, dimana semakin tinggi skor menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jika dilihat per pilar, nilai rata-rata untuk pilar sosial adalah 53,21, pilar lingkungan sebesar 28,94, dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan skor yang cukup signifikan antar pilar IBEI. Lebih lanjut, rendahnya skor pada pilar ekonomi mengindikasikan belum optimalnya penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya perairan. Begitupun dengan rendahnya skor pada pilar lingkungan menunjukkan pengelolaan ekonomi biru yang belum ramah terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun kontribusi tinggi dari pilar sosial berasal dari tingginya kinerja sub-pilar kesehatan, terutama konsumsi protein dan ikan.

Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dengan nilai IBEI sebesar 80,86 pada tahun 2023, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor IBEI masing-masing sebesar 71,63 dan 68,50. Berdasarkan pilar, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan signifikan lebih tinggi pada pilar sosial, yaitu sebesar 85,5, sedangkan pilar ekonomi dan lingkungan masing-masing hanya sebesar 52,0 dan 50,2. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan.

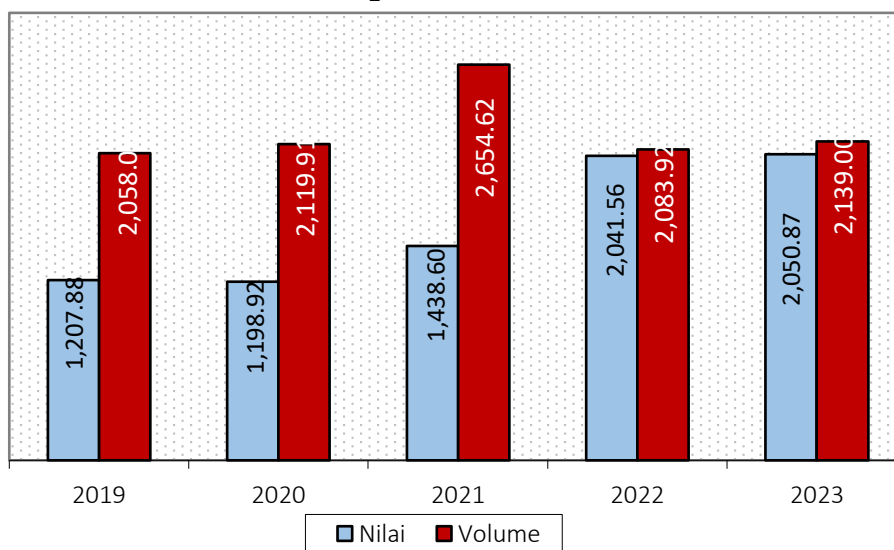
Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, skor pilar ekonomi mencapai 74,3 atau yang tertinggi di Indonesia, terutama karena ditopang oleh sub-pilar manufaktur berbasis kelautan. Artinya, hilirisasi produk perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif tertinggal dibanding Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, untuk mengetahui daya saing ekonomi daerah diranah global ditunjukkan dengan **volume ekspor**. Nilai ekspor Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 meningkat sebesar US\$ 842,99 juta, dimana nilai ekspor tahun 2019 mencapai US\$ 1.213,62 juta menjadi US\$ 2.050,87 juta pada bulan November 2023. Merunut pada realisasi ekspor Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, peningkatan volume ekspor pada tahun tertentu tidak selalu menghasilkan kenaikan nilai ekspor yang proporsional atau sama-sama signifikan. Hal ini dimungkinkan terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena terjadi perubahan harga komoditas, peningkatan volume ekspor terjadi pada produk yang memiliki nilai lebih rendah per unit atau produk dengan nilai ekspor yang rendah dibandingkan dengan produk lain yang biasanya diekspor, fluktuasi nilai tukar mata uang, meningkatnya biaya produksi atau biaya logistic, dan persaingan pasar global.

Saat ini Sulawesi Selatan juga telah mengekspor lebih dari 250 jenis komoditas dan produk andalan yang meliputi produk Perikanan, Pertanian, Produk Industri serta Produk Tambang ke beberapa Negara tujuan ekspor, dan masih banyak komoditas potensial ekspor lainnya yang dapat diolah menjadi produk ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor dikawasan Asia, Australia, Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Komoditas dan Produk yang berkontribusi Ekspor Sulawesi Selatan, dari Sektor Tambang 74,80%, Sektor Pertanian dan Perikanan berkontribusi 13,95% dan Sektor Industri 11,258%.

Grafik II.27.

**Nilai dan Volume EKspor Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Beberapa tantangan untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa diantaranya: a) peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia pelaku ekspor UMKM; b) identifikasi pengembangan produk unggulan dan potensial ekspor di kabupaten/kota; c) peningkatan fasilitasi aksesibilitas angkutan ekspor cargo laut dan udara secara langsung ke negara tujuan; d) konektivitas akses pasar melalui jalur laut dan udara; serta f) optimalisasi ekspor ke negara mitra dagang yang menjalin kerjasama perdagangan FTA dengan Pemerintah.

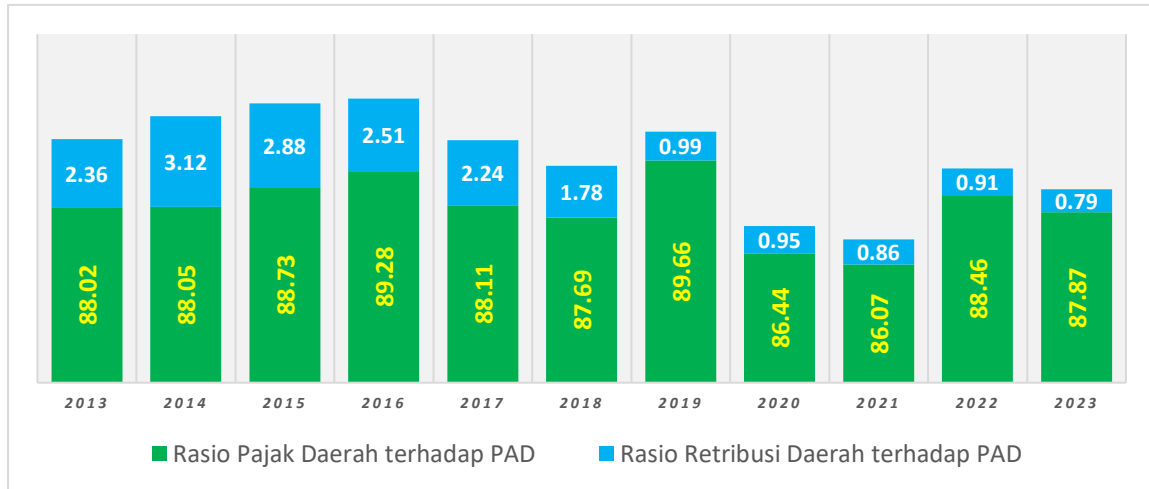
Daya saing ekonomi daerah berhubungan erat dan dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro daerah, dalam konteks pengembangan ekonomi regional. Daya saing ekonomi daerah yang baik dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ini, jika berkelanjutan dan stabil, dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah. Stabilitas ekonomi makro berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, seperti inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang konsisten, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan daya saing ekonomi daerah. Gambaran stabilitas ekonomi makro daerah di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kondisi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi.

**Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber ini. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak, dan rasio yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah.

Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari tarif layanan dan kegiatan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah, dan rasio yang rendah dapat menunjukkan potensi untuk meninjau kembali tarif retribusi atau meningkatkan kepatuhan. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah membantu pemerintah daerah dalam memahami seberapa efektif dan beragam sumber-sumber penerimaan daerah. Analisis rasio ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah.

Selama sepuluh tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dalam rentang 86 persen hingga 89 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 89,66 persen, dan rasio terendah pada tahun 2021 sebesar 86,07 persen. Pada tahun 2023 mencapai 87,87 persen atau turun 0,59 persen dibanding tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan terdapat potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan. Disisi lain, pengelolaan retribusi daerah selama dua dekade terus menurun kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan, dari 2,36 persen pada tahun 2013 menjadi 0,79 persen di tahun 2023. Peningkatan ratio retribusi terhadap PAD perlu menjadi perhatian, utamanya dalam hal peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan retribusi, seperti kurangnya efisiensi dalam penagihan, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggar, atau masalah administratif dalam proses pengumpulan.

Grafik II.28.  
**Rasio Pajak & Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2013-2023**



Sumber Data : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

**Tingkat Inflasi** adalah ukuran yang penting untuk memahami tingkat perubahan daya beli uang dan stabilitas ekonomi yang mengacu pada tingkat pertumbuhan harga-harga umum barang dan jasa di suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan data BPS, pada Desember 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 114,14 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen.

Pada tahun 2023 inflasi dapat dikendalikan pada angka 2,81. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga yaitu sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 1,19 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi (y-on-y) pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang

Hal penting lainnya yang perlu dicermati pada aspek daya saing ekonomi daerah adalah Pembangunan perkotaan dan perdesaan. Daya saing ekonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan **pembangunan perkotaan dan perdesaan**. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan adalah meletakkan perkotaan dan perdesaan sebagai spektrum pembangunan yang setara. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi perdesaan tetap dapat mempertahankan karakteristik, lokalitas dan prinsip keberlanjutan lingkungan di desa.

Gambaran terkait perkembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan antara lain diindikasikan oleh **Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Metropolitan** terhadap provinsi. Perkembangan perkotaan terkhusus pada Kota Makassar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 34,67 persen, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, Adapun kontribusi terbesar pada sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 20,03 persen, selanjutnya lapangan usaha industry pengolahan sebesar 18,83 persen, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 18,20 persen.

Tabel II.12.

**Kontribusi PDRB Kota Makassar Tahun 2019-2023 ADHB**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	35,29	35,23	34,86	34,47	34,67

Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. SulSel, Tahun 2023

Pembangunan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing ekonomi daerah karena perdesaan merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Pembangunan perdesaan yang terarah dan terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Gambaran Pembangunan perdesaan di Sulawesi Selatan diukur dengan **Persentase Desa Mandiri**. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa.

Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri). Indeks desa baru disepakati secara nasional sebagai dasar perhitungan persentase desa mandiri di bulan Maret Tahun 2024. Untuk memberikan gambaran desa mandiri di Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir, digunakan indikator Indeks Desa Membangun yang disajikan pada tabel dibawah. Perkembangan desa mandiri di Sulawesi Selatan meningkat tajam dari 2,66 persen menjadi 20,78 persen pada tahun 2023. Desa mandiri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan.

Tabel II.13.

**Persentase Desa Mandiri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023**

STATUS DESA	2019	2020	2021	2022	2023
MANDIRI	6	25	112	235	471
MAJU	148	311	483	786	873
BERKEMBANG	1444	1473	1354	1028	757
TERTINGGAL	564	386	268	195	162
SANGAT TERTINGGAL	93	60	38	11	3
<b>TOTAL</b>	<b>2255</b>	<b>2255</b>	<b>2255</b>	<b>2255</b>	<b>2266</b>

Sumber Data : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

### 2.3.2. DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA

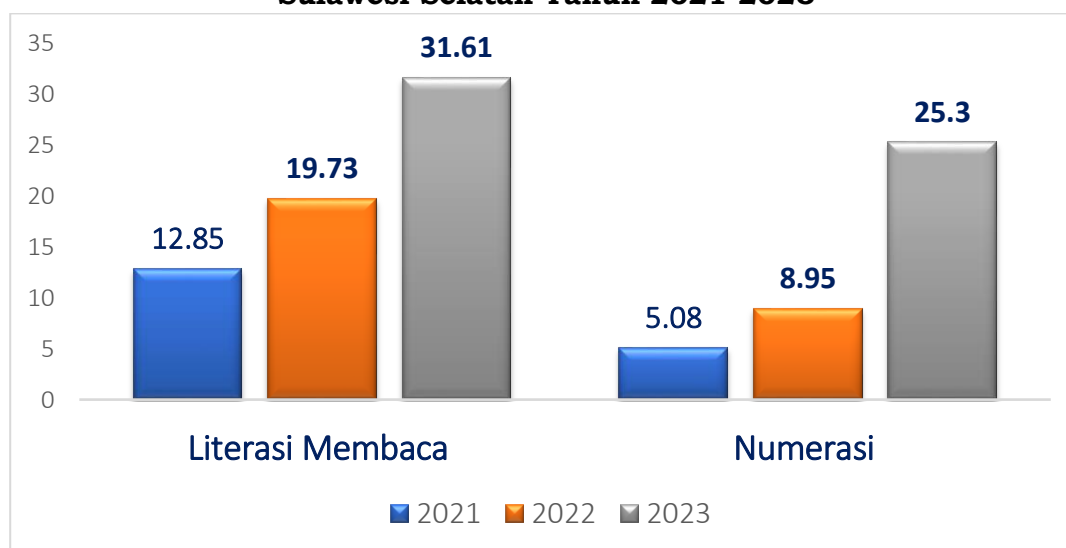
Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumberdaya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia suatu negara atau daerah. Gambaran aspek daya saing sumberdaya manusia di Sulawesi Selatan dicerminkan dari beberapa indikator pendidikan.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari **hasil pembelajaran** melalui **capaian literasi membaca dan numerasi** suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan persentase pada kemampuan literasi membaca sebesar 6,88 persen yaitu dari 12,85 persen menjadi 19,73 persen. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kemampuan literasi membaca sebesar 11,88 persen yaitu dari 19,73 persen menjadi 31,61 persen. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan, yaitu 3,87 persen pada tahun 2022 dan 16,35 persen pada tahun 2023.

Grafik II.29.

**Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023**



Sumber Data : diolah bapelitbangda, tahun 2024

Data ini berbeda dengan persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi yang masih 0 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa, belum ada kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum sejak tahun 2021 sampai tahun 2023.

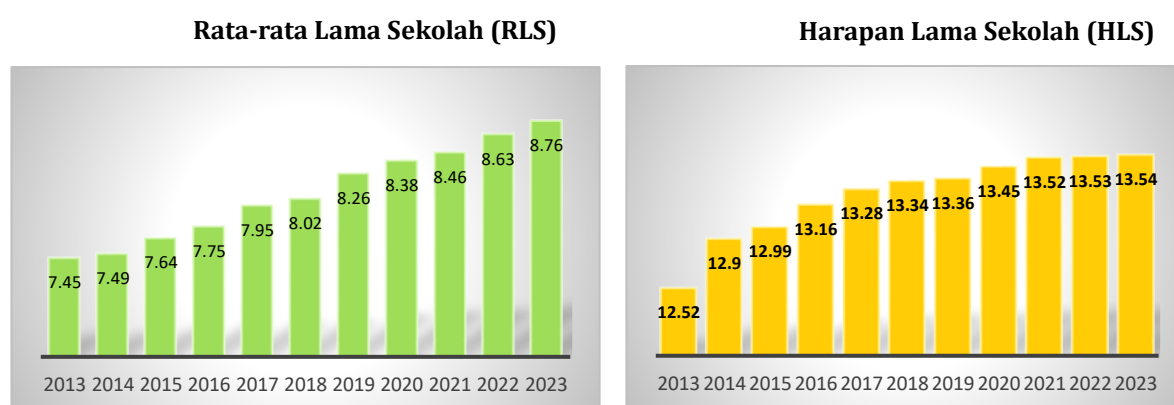
Peningkatan persentase kabupaten/kota dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi dipengaruhi oleh mutu dan relevansi pembelajaran, tata kelola satuan pendidikan serta kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, peningkatan tata kelola satuan pendidikan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan.

**Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**, merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam suatu populasi atau negara. Kedua indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa lama individu-individu dalam suatu populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka Rata-rata lama sekolah dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu.

Berdasarkan data capaian tahun 2013 – 2023, **rata-rata lama sekolah** di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 7,45 tahun menjadi 8,76 tahun pada tahun 2023. Artinya rata-rata penduduk Sulawesi Selatan berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional di tahun 2023, terdapat perbedaan 0,01 poin dengan RLS Indonesia yang mencapai 8,77 tahun. Dalam konteks global, standar pendidikan yang tinggi di beberapa negara maju seperti Jepang atau negara-negara Eropa dapat memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 12 tahun. Selain itu, perlu dicatat bahwa rata-rata lama sekolah hanya memberikan gambaran tentang tahun-tahun bersekolah rata-rata yang dicapai oleh penduduk, namun tidak memberikan informasi tentang kualitas pendidikan yang diterima atau tingkat pencapaian dalam pendidikan.

Grafik II.30.

**Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah, karena jika lebih banyak anak tidak sekolah maka dapat menyebabkan penurunan rata-rata lama sekolah dalam populasi. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang ditempuh oleh seluruh populasi dengan jumlah individu dalam populasi tersebut. Jika ada sejumlah besar anak yang tidak sekolah, mereka akan memberikan kontribusi nol terhadap total tahun sekolah, yang kemudian menurunkan rata-rata secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, persentase anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 meningkat selama 3 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah. Persentase tertinggi anak yang masih bersekolah adalah tahun 2019 yang mencapai 98,53 persen, namun menurun ditahun berikutnya hingga pada tahun 2022 turun hingga 90,9 persen. Dampak Pandemi Covid 19 menyisakan persoalan meningkatnya anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan hingga saat ini.

Pada Juni 2024, terdapat laporan yang dirilis oleh Pusdatin Kemendikbud bahwa jumlah Anak Putus Sekolah (Drop Out) dari jenjang kelas 1 hingga 12 di Sulawesi Selatan mencapai 33.755 anak. Di tahun yang sama, jumlah anak yang Lulus tapi Tidak Melanjutkan Sekolah dari SD ke jenjang SLTP sebesar 25.570, dan jumlah anak yang Lulus tapi Tidak Melanjutkan Sekolah dari jenjang SLTP ke SLTA sebanyak 30.316 anak. Jumlah ini jika ditambah dengan anak yang Belum Pernah Bersekolah yang mencapai 106.377, maka diperoleh jumlah keseluruhan ATS di Sulawesi Selatan mencapai 196.018 anak per Juni 2024.

Tabel II.14.

**Persentase Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Usia 7-18 Tahun di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Jenis Kelamin	Satuan	Anak Tidak Sekolah (Usia 7-18)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Tidak/Belum Pernah Sekolah</b>	%	0,46	0,37	0,39	0,41	0,34
<b>Laki-laki</b>	%	0,59	0,45	0,45	0,46	0,41
<b>Perempuan</b>	%	0,33	0,28	0,33	0,36	0,27
<b>Tidak Bersekolah Lagi</b>	%	8,75	1,45	8,59	8,91	9,27
<b>Laki-laki</b>	%	10,08	1,71	9,11	9,67	9,71
<b>Perempuan</b>	%	7,41	1,18	8,06	8,15	8,83
<b>Masih Bersekolah</b>	%	90,8	98,19	91,02	90,68	90,39
<b>Laki-laki</b>	%	89,34	97,84	90,44	89,87	89,88
<b>Perempuan</b>	%	92,26	98,53	91,6	91,49	90,9

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menginformasikan bahwa anak tidak sekolah merupakan permasalahan yang kompleks dan meliputi sejumlah isu yang terkait satu sama lain (sosial-ekonomi, kondisi geografis, gender, disabilities) yang menyebabkan anak tidak bersekolah atau putus sekolah. Beberapa penyebab ATS di Sulawesi Selatan adalah karena bekerja (mendapatkan upah atau tidak mendapatkan upah), jarak sekolah yang relative jauh dari permukiman penduduk, terbatasnya kemampuan biaya sekolah, menyandang disabilitas, perundungan (bullying) anak-anak di sekolah, menikah di usia anak, pengaruh lingkungan dan pertemanan, pandangan sebagian masyarakat bahwa sekolah tidak penting, anak tidak mau sekolah, anak tidak pernah terlayani PAUD, dan anak tidak punya akte kelahiran.

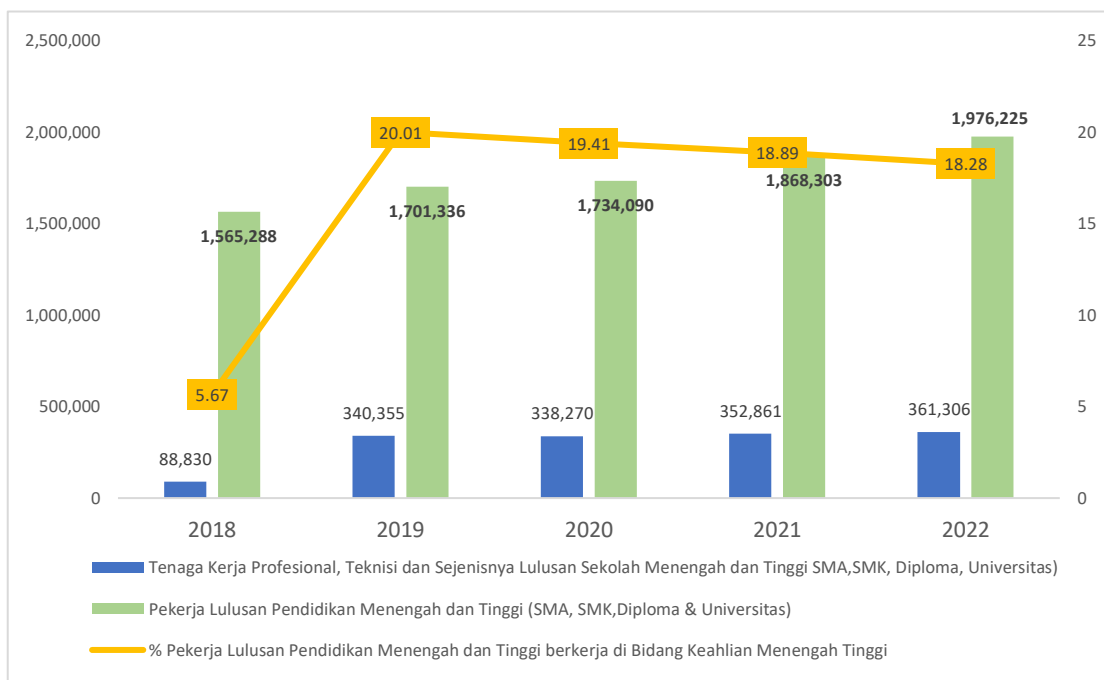
**Harapan Lama Sekolah** selama dua dekade meningkat dari 12,52 tahun (2013) menjadi 13,54 tahun pada 2023. Secara umum, harapan lama sekolah yang mencapai 13,54 tahun dapat diinterpretasikan sebagai target atau tujuan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat atau individu di Sulawesi Selatan. Angka ini menunjukkan ekspektasi bahwa individu diharapkan untuk menghabiskan sekitar 13,54 tahun dalam sistem pendidikan formal. Semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin tinggi pula kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas hidup melalui investasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, angka 13,54 tahun menunjukkan tingkat ambisi yang signifikan terhadap pendidikan di Sulawesi Selatan.

**Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi** menggambarkan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Melalui indikator ini, dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Profil tenaga kerja berdasarkan pendidikan dapat kita lihat pada grafik dibawah.

Tahun 2018 hingga 2022 jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi (SMA, SMK, Diploma, Universitas) mengalami tren peningkatan. Sedangkan jumlah tenaga kerja profesional, teknisi dan sejenisnya lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Sehingga proporsi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi mengalami tren penurunan karena jumlah tenaga kerja profesional, teknisi dan sejenisnya tidak signifikan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi.

Grafik II.31.

**Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

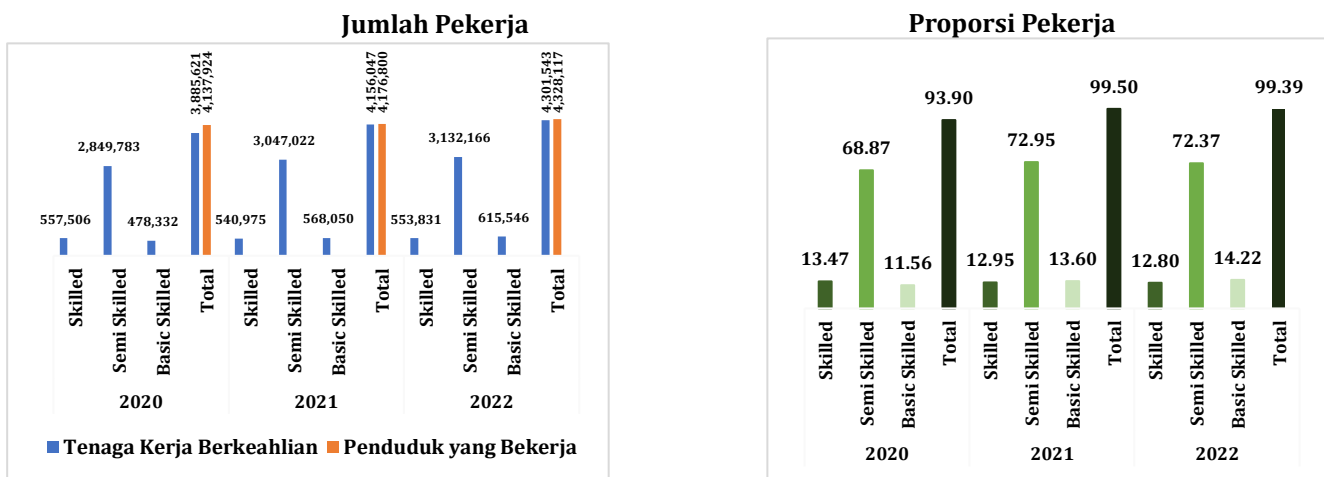


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data Sakernas (Ketenagakerjaan Dalam Data) tahun 2020 hingga 2022 jumlah tenaga kerja yang berkeahlian kategori skilled adalah mereka yang bekerja sebagai Manager, Profesional serta Teknisi dan Asisten Profesional yang digolongkan sebagai Skilled Labor mengalami tren menurun . Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja berkeahlian kategori semi skilled yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan, Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pekerja Pengolahan, Kerajinan serta Operator dan Perakit Mesin cenderung berfluktuasi. Sementara untuk tenaga kerja berkeahlian kategori basic skilled yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Pekerja Kasar mengalami tren peningkatan selama kurun . Sejalan dengan menurunnya jumlah tenaga kerja yang berkeahlian kategori skilled tahun 2020 hingga 2022 proporsi tenaga kerja yang bekerja di bidang keahlian mengalami tren penurunan terhadap jumlah penduduk yang bekerja yang mengalami tren peningkatan.

Grafik II.32.

**Jumlah & Proporsi Pekerja yang berkerja di Bidang Keahlian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Sumber: Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 6 (Sakernas, Februari 2022)

**Kapabilitas inovasi** memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Selain itu juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, dan kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru, serta mengimplementasikan perubahan yang signifikan dan berdampak positif. Dalam perhitungan indeks ini beberapa parameter yang digunakan adalah keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merk dagang. Nilai Kapabilitas Inovasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 3,7 berada diatas nilai nasional (3,2), dan menempati urutan ke 8 tertinggi secara nasional. Capaian tahun 2023 ini meningkat dari nilai tahun sebelumnya yang baru mencapai 3,48.

Perkembangan lingkungan strategis global menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang mumpuni dalam penguasaan teknologi digital. Daya Saing Digital dibangun dari sejumlah indikator besar, yaitu kondisi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). pengeluaran TIK, perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan, infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah. Skor daya saing digital pada kisaran angka 0-100, dimana semakin tinggi skornya daya saing digital suatu wilayah dianggap semakin kompetitif.

Berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI), **Daya Saing Digital** Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 42,9, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 39,8. Namun, meski terjadi peningkatan skor, posisi Sulawesi Selatan secara nasional justru menurun di posisi ke 12 pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022 yang berada pada posisi ke 10 tertinggi.

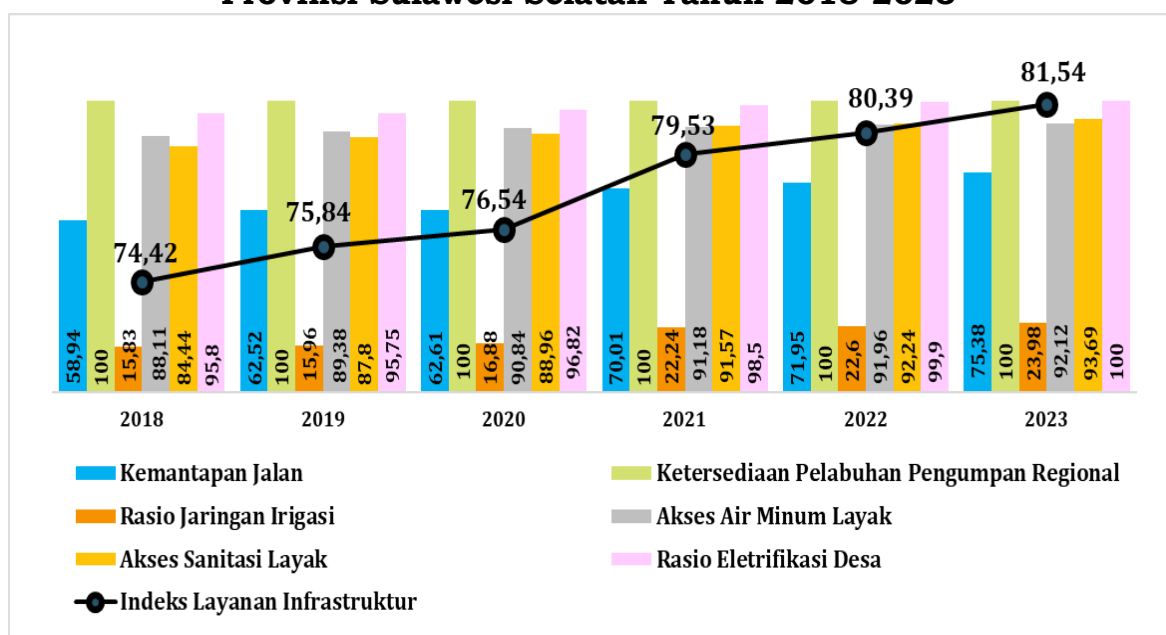
### 2.3.3. **DAYA SAING FASILITAS/ INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di wilayah Sulawesi Selatan digambarkan dari capaian indeks infrastruktur dan hunian penduduk.

**Indeks Layanan Infrastruktur**, Nilai Indeks Layanan Infrastruktur Sulawesi Selatan pada kurun waktu 6 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan nilai indeks dengan nilai indeks mencapai 85,33 poin pada tahun 2023. Peningkatan nilai indeks juga dipengaruhi dengan meningkatnya keseluruhan komponen pembentuk indeks layanan infrastruktur. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Layanan Infrastruktur antara lain: 1) Tersedia dan berfungsinya simpul transportasi berupa pelabuhan pengumpan regional pada pusat kegiatan wilayah (PKW); 2) Meningkatnya kualitas dan layanan jaringan irigasi yang melayani lahan pertanian di Sulawesi Selatan yang diindikasikan dengan persentase luas lahan budidaya pertanian yang terlayani oleh jaringan irigasi mencapai 23,98 persen pada tahun 2023; 3) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kondisi jalan pada tahun 2023 yaitu jalan provinsi kondisi baik sepanjang 948.74 Km (47,1 persen) dan jalan provinsi kondisi sedang sepanjang 569,51 Km (28,27 persen); 4) Meningkatnya Akses Air Minum Layak mencapai 92,12 persen pada tahun 2023, 5) Meningkatnya Akses Sanitasi Layak mencapai 93,69 persen pada tahun 2023, serta 6) Rasio Elektrifikasi Desa mencapai 100 persen pada tahun 2023. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Grafik II.33.

#### **Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

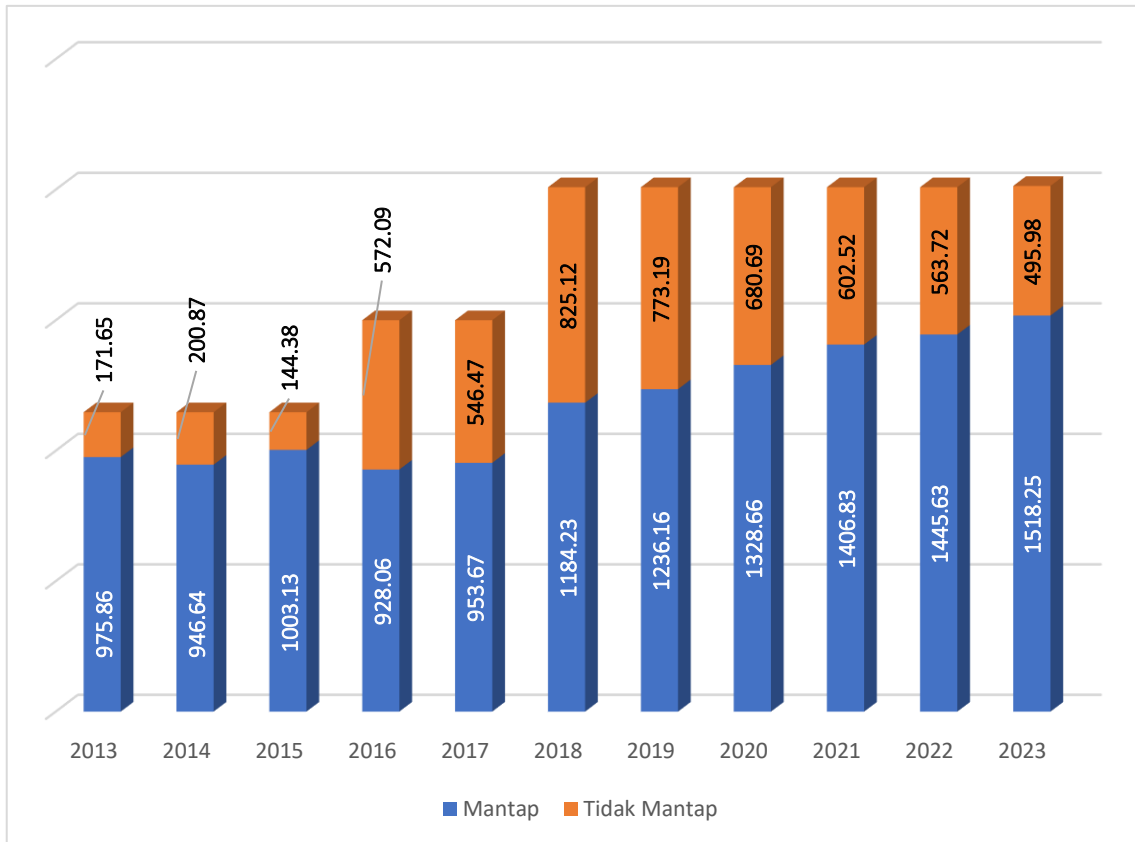


Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama konektivitas pendukung daya saing wilayah, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir panjang jalan kewenangan provinsi di provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertambahan dari 1.147,51 Km pada tahun 2013 bertambah sepanjang 866,72 Km menjadi sepanjang 2.014,23 Km pada tahun 2023 dengan kemantapan jalan yang berfluktuasi, namun sejak tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan kinerja yang tergambarkan dari kemantapan jalan provinsi yang terus meningkat.

Grafik II.34.

**Kemantapan Jalan Provinsi  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023**

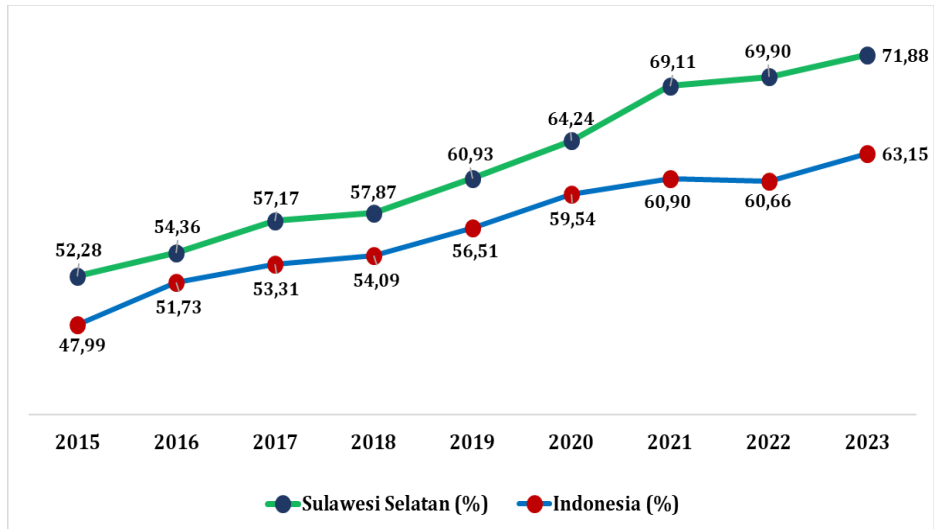


Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel, diolah tahun 2024

**Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.**

Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Tahun 2015 hingga 2023 capaian akses **rumah tangga dengan hunian layak** mengalami tren peningkatan serta lebih tinggi dari capaian Nasional. Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Tahun 2015 hingga 2023 capaian akses rumah tangga dengan hunian layak mengalami tren peningkatan serta lebih tinggi dari capaian Nasional. Kewenangan provinsi dalam pemenuhan akses hunian layak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Namun demikian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui peningkatan RTLH khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan hunian layak dilakukan dengan upaya kemudahan dalam akses pembiayaan (KPR) serta mendorong pengembang perumahan untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai khususnya akses air minum dan sanitasi layak.

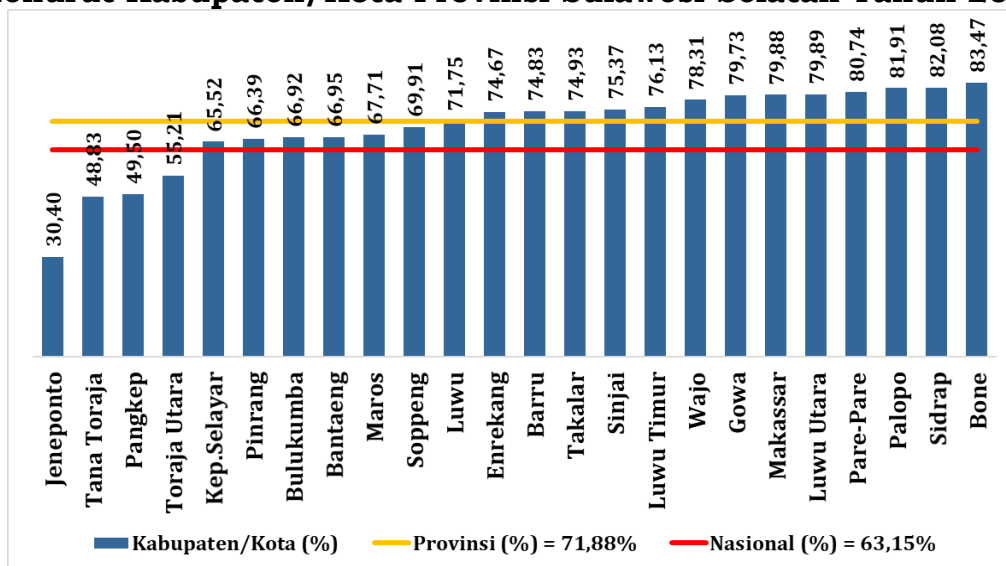
Grafik II.35.  
**Akses Rumah Layak Huni**  
**Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2023**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional data diolah BAPPENAS

Pada tahun 2023 rumah tangga yang menempati rumah dengan atap berupa genteng, kayu/sirap, dan seng sebesar 96,83 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu sebesar 89,52 persen. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin, tegel, teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah sebesar 99,25 persen. Luas perkapita  $\geq 7m^2$  menjadi salah satu syarat bagi hunian layak. Diasumsikan jika terdapat 4 anggota dalam satu keluarga, maka luasan rumah yang layak harus  $> 28m^2$ . Luas perkapita RLH  $\geq 7m^2$  sebesar 94,06 persen mengalami tren fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya seiring dengan berkembangnya pembangunan perumahan khususnya di wilayah perkotaan dengan konsep minimalis dengan harga terjangkau. Akses air minum dan sanitasi layak menjadi syarat rumah layak huni karena merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Gambaran akses Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

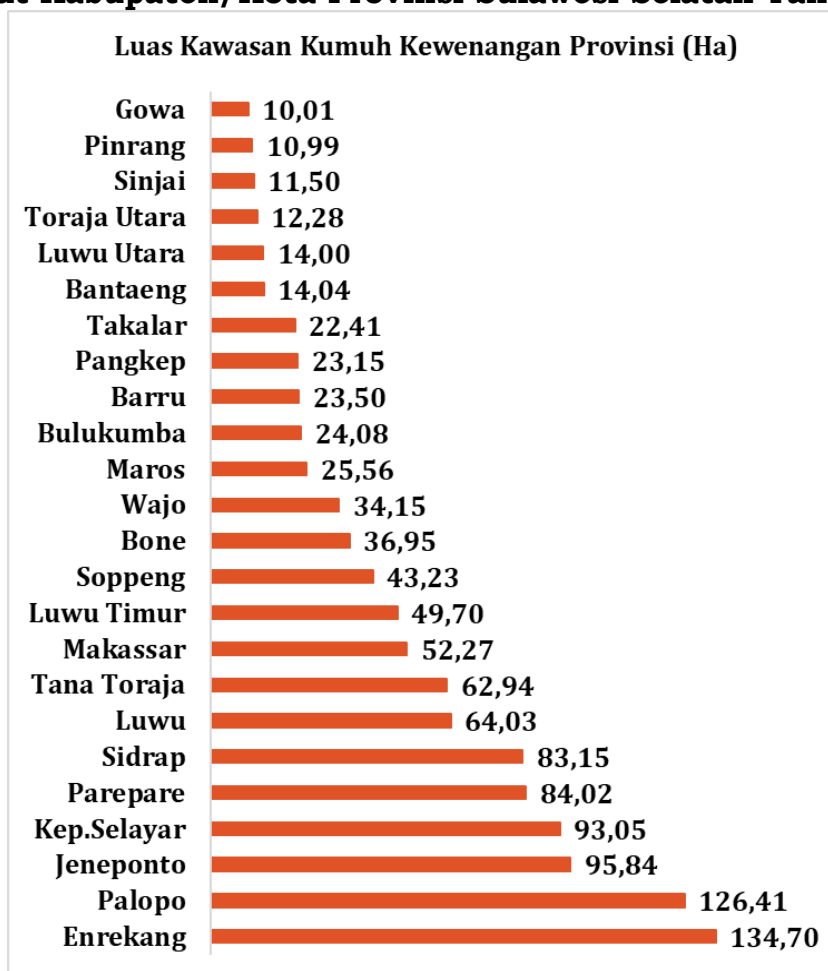
Grafik II.36.  
**Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak**  
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional data diolah BAPPENAS

Grafik II.37.

**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



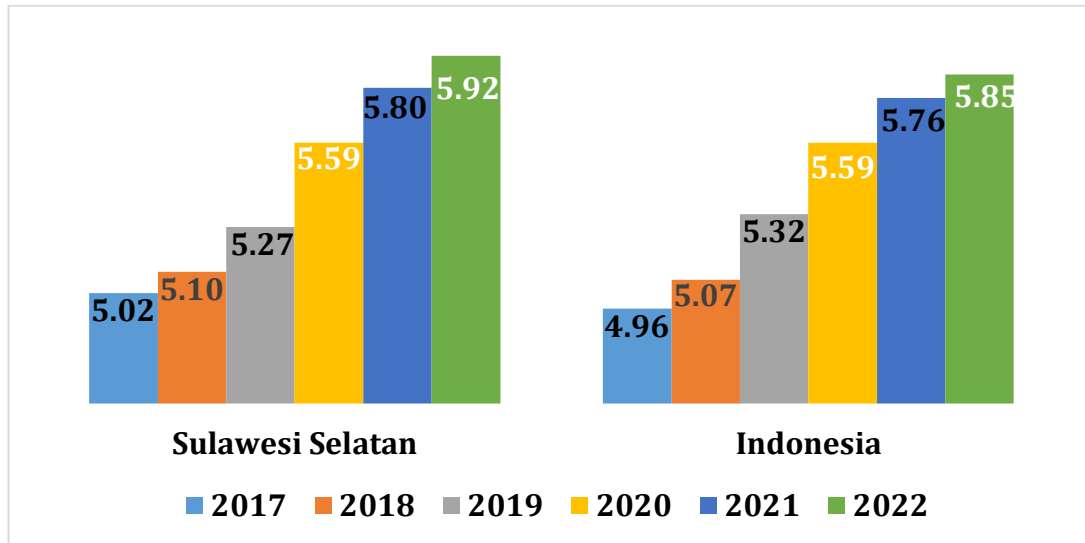
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 969/VI/TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Sulawesi Selatan luas kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 1.151,97 Ha yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi rumah tangga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu peningkatan kualitas kawasan kumuh dilakukan melalui penyediaan jalan lingkungan dan drainase lingkungan serta penyediaan sarana persampahan berupa motor sampah.

Gambaran terkait **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi** merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu negara atau wilayah. Indeks TIK memberikan gambaran holistik tentang tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, yang digambarkan oleh peningkatan nilai Indeks Pembangunan TIK. Pada tahun 2017, nilai Indeks Pembangunan TIK tercatat sebesar 5,02 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan nilai mencapai 5,92 kategori Sedang. Secara keseluruhan, peningkatan indeks yang terjadi dalam lima tahun sebesar 0,18 poin. Nilai Indeks Pembangunan TIK Sulawesi Selatan yang disusun oleh tiga subindeks, yaitu Akses dan infrastruktur TIK 6,05 poin, Penggunaan TIK 5,62 poin, dan keahlian TIK 6,3 poin.

Grafik II.38.

**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2022**

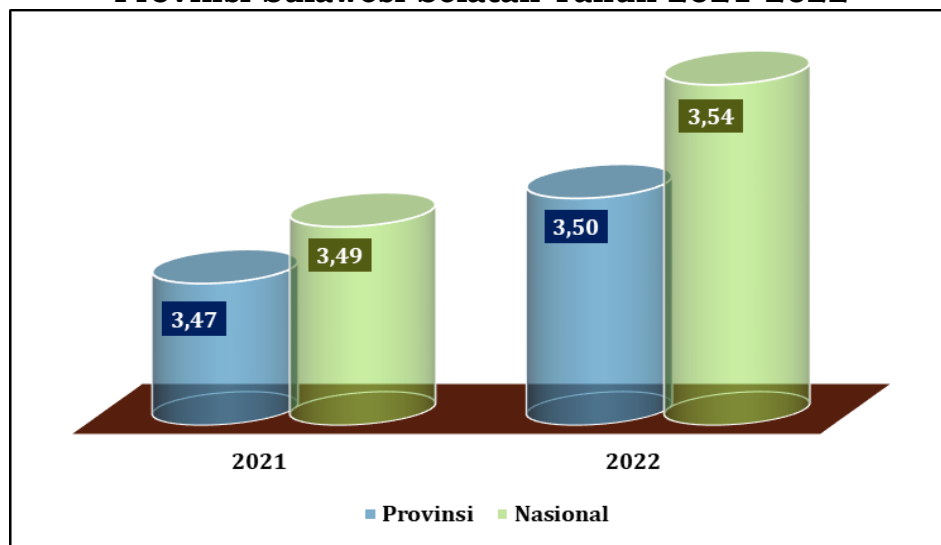


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Pengukuran **Indeks Literasi** Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020) yang dilaksanakan melalui survey dengan jumlah responden sejumlah 345 orang di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Tahun 2022 nilai Indeks Literasi Digital Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,03 poin namun masih berada di bawah nilai Indeks Nasional.

Grafik II.39.

**Indeks Literasi Digital  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022**



Sumber: Kementerian KOMINFO

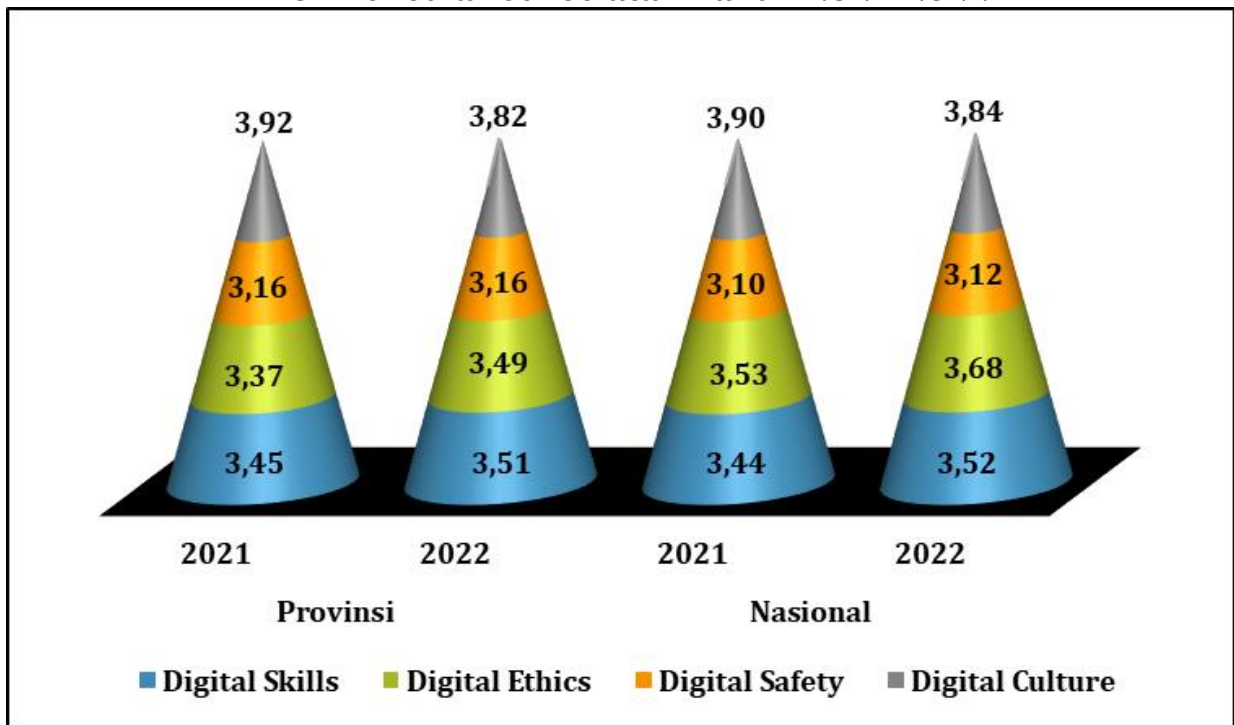
Berdasarkan pilar indeks literasi digital nilai indeks Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terdapat dua pilar yang meningkat dari tahun 2021, yaitu pilar Digital Skill naik sebesar 0,06 poin dan pilar Digital Ethics naik sebesar 0,12 poin. Sedangkan pilar Digital Safety sama dengan tahun 2021 dengan nilai indeks 3,16, namun Pilar Digital Culture menurun sebesar 0,10 poin. Digital culture yang merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan,

membiasakan . . .

membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Penelitian ini juga mengukur perilaku masyarakat dalam mengakses internet yang mencakup kepemilikan media sosial, durasi, waktu, dan frekuensi mengakses internet, alasan masyarakat bermedia sosial, dan rujukan yang mereka akses untuk mengklarifikasi hoaks. Untuk kepemilikan akun media sosial di Sulawesi Selatan media yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp dan Facebook.

Grafik II.40.

**Pilar Indeks Literasi Digital  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022**



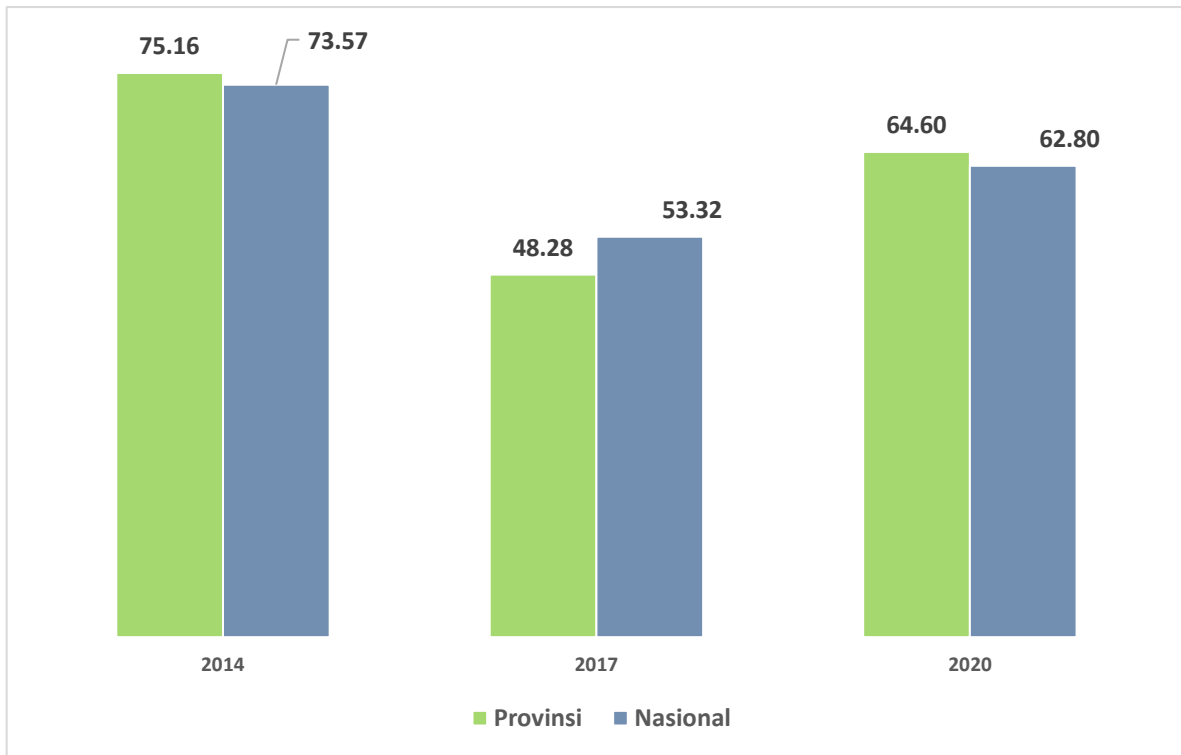
Sumber: Kementerian KOMINFO

**2.3.4. DAYA SAING IKLIM INVESTASI**

Daya saing iklim investasi adalah seberapa menariknya suatu wilayah atau negara bagi investor untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang transparan, stabilitas politik dan ekonomi, serta infrastruktur yang memadai. Gambaran daya saing iklim investasi di Sulawesi Selatan digambarkan pada aspek keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta demokrasi substansial yang dicerminkan pada indikator sebagai berikut.

**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya** adalah seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan mampu menggambarkan pembangunan bidang keamanan terutama dalam mengukur rasa aman bagi masyarakat.

Grafik II.41.  
**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan**



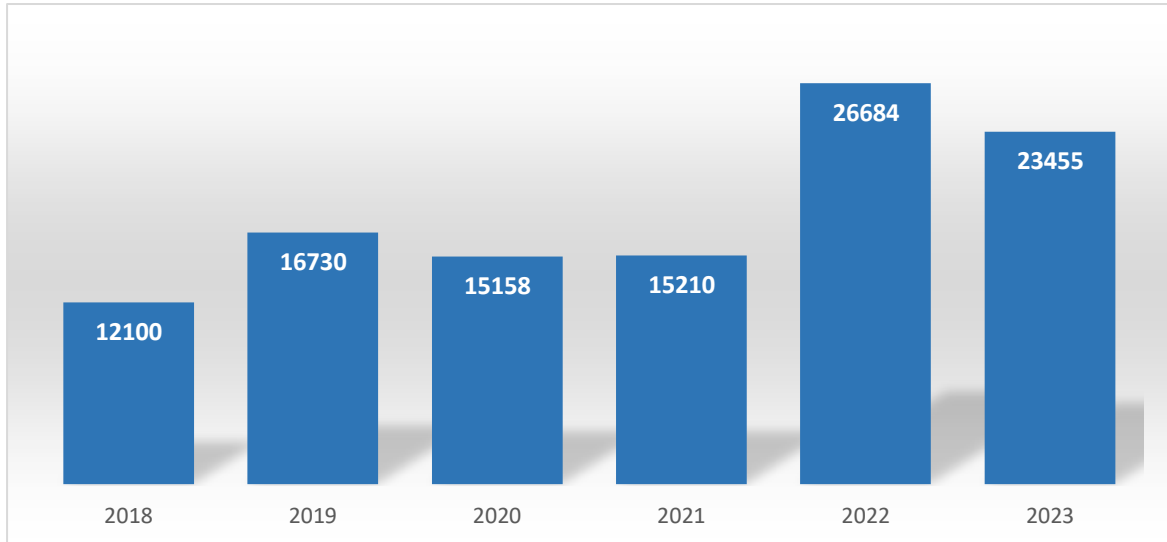
Sumber: Statistik Ketahanan Sosial (Susenas Modul Hansos)

Berdasarkan data Susenas Modul Hansos proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Hasil Modul Hansos tahun 2020 proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya di Sulawesi Selatan menunjukkan 64,6 persen masyarakat merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya lebih tinggi dari capaian Nasional. Jika kita bandingkan menurut wilayah tempat tinggal, rumah tangga di perdesaan merasa lebih aman saat beraktivitas dibandingkan perkotaan. Rasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, untuk wilayah perkotaan sebesar 62,07 persen dan untuk wilayah perdesaan sebesar 66,5 persen.

Kejadian tindak kriminal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data tindak kriminal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap **jumlah kasus kejahatan** yang dilaporkan. Kondisi ini kurang mendukung iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi di Sulawesi Selatan. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10.951 kasus atau 41 persen dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 127 kasus atau 0,5 persen dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022. Capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2022 sebesar 61,18 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,94 persen.

Grafik II.42.

**Jumlah Kasus Kejahatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**



Sumber Data : Polda Sulsel

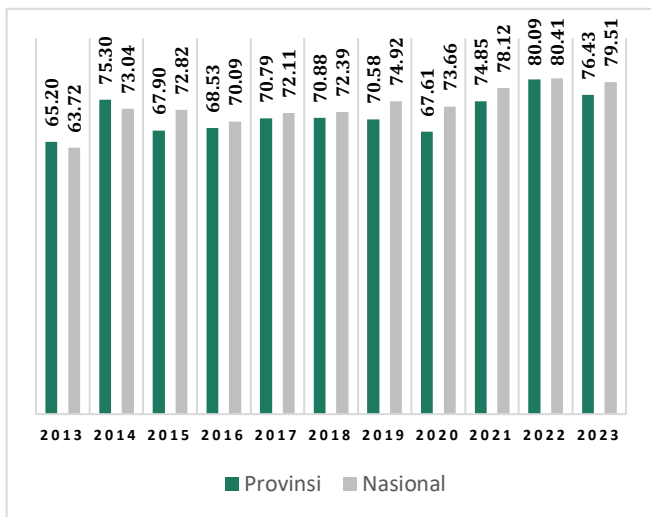
**Indeks Demokrasi Indonesia**, merupakan indeks komposit yang mengukur praktek demokrasi di Indonesia dalam 3 aspek (kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi). Gambaran capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir berfluktuatif sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi di Sulawesi Selatan berkisar pada angka 65 hingga 80. Capaian terendah di tahun 2013 sebesar 65,20, dan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 80,09. Pada tahun 2023 turun 3,66 poin menjadi 76,43, berada pada tingkat demokrasi kategori “Sedang” (Indeks 60-80), dan dibawah capaian nasional. Peningkatan nilai Indeks Demokrasi di Sulawesi Selatan didukung oleh peningkatan variabel aspek kebebasan yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, dan peran DPRD, disajikan pada grafik berikut.

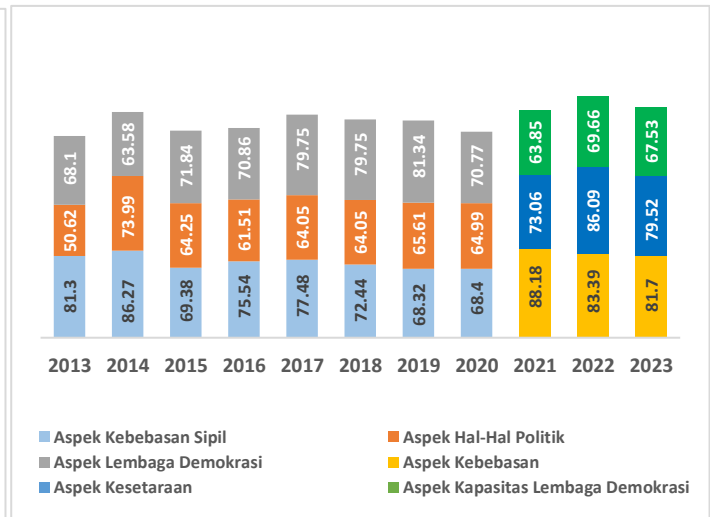
Grafik II.43.

**Indeks dan Aspek Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2023**

**Indeks Demokrasi**



**Aspek Indeks Demokrasi**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Nasional

Indeks demokrasi yang semakin membaik secara signifikan akan mempengaruhi daya saing investasi di Sulawesi Selatan, karena indeks demokrasi yang tinggi berhubungan dengan stabilitas politik dan hukum yang lebih baik. Stabilitas ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih prediktif dan aman bagi investor, karena mereka dapat memproyeksikan risiko politik yang lebih rendah dalam jangka panjang. Selain itu, indeks demokrasi yang baik juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovasi dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing investasi daerah.

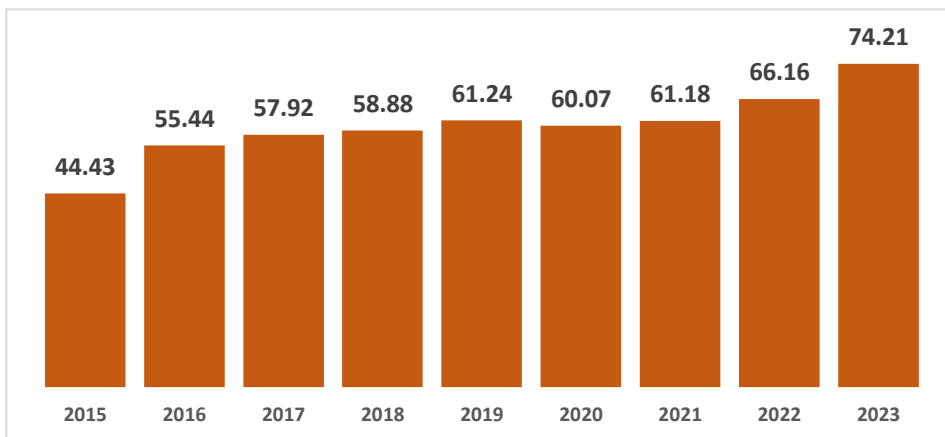
#### 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Secara keseluruhan, pelayanan umum yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Sulawesi Selatan tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator-indikator pelayanan pemerintahan

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap roadmap nasional. **Indeks Reformasi Birokrasi** menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2023 secara umum meningkat dari tahun 2015 sebesar 44,43 poin menjadi sebesar 74,21 poin pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 29,78 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Namun demikian koordinasi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut

Grafik II.44.

#### Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023



Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024

Selain dari sisi pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja pemerintah dalam pelayanan umum juga tercermin pada kinerja pemerintah dalam admintrasi publik dan pemerintahan yang diukur pada indikator-indikator sebagai berikut.

Tabel II.15.

**Capaian Indikator Pelayanan Publik, SPBE, dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023**

<b>Indikator /Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	4,00	4,02	4,10	4,34	4,34
<b>Indeks SPBE</b>	2,90	3,08	2,05	2,35	3,09
<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	690	2530	49,24	55,43	53,09

*Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024*

**Indeks Pelayanan Publik**, merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nilai Indeks Nilai Pelayanan Publik mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan capaian 4,00 poin pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,34 poin pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 0,34 poin. Peningkatan nilai IPP tersebut diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada 2 Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu DPM-PTSP dan Sistem Manunggal Satu Atap/ SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, penyediaan sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta telah mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik. Namun, masih terdapat beberapa indikator terkait komitmen dan jaminan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. seperti perkembangan teknologi informasi yang harus dibarengi dengan digitalisasi pelayanan serta inovasi pelayanan.

Pelayanan publik juga dapat dilihat kualitasnya melalui **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, untuk capaian tahun 2021 sebesar 2,05 atau kategori Cukup. Nilai SPBE dengan target sebelumnya tidak terpenuhi disebabkan oleh: a) Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020; b) Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE; c) Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE; d) Provinsi Sulsel masih belum memiliki tata kelola yang mengatur terkait pada pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra dan penggunaan system penghubung layanan dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan. Tahun 2022 capaian Indeks SPBE mencapai 2,35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan nilai Indeks SPBE didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategis yang mengatur SPBE.

Tahun 2023 nilai Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta merupakan capaian tertinggi kurun waktu 5 tahun terakhir dengan capaian 3,09 predikat Baik. Hal ini didukung oleh keunggulan pada penerapan Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Penyelenggara SPBE, Audit TIK, Layanan Publik Berbasis Elektronik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Inovasi di tingkat daerah memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan dan kemajuan suatu wilayah dan merupakan gambaran kekuatan kondisi institusi di daerah. **Indeks Inovasi Daerah**, merupakan sejumlah inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil

melakukan . . .

melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya.

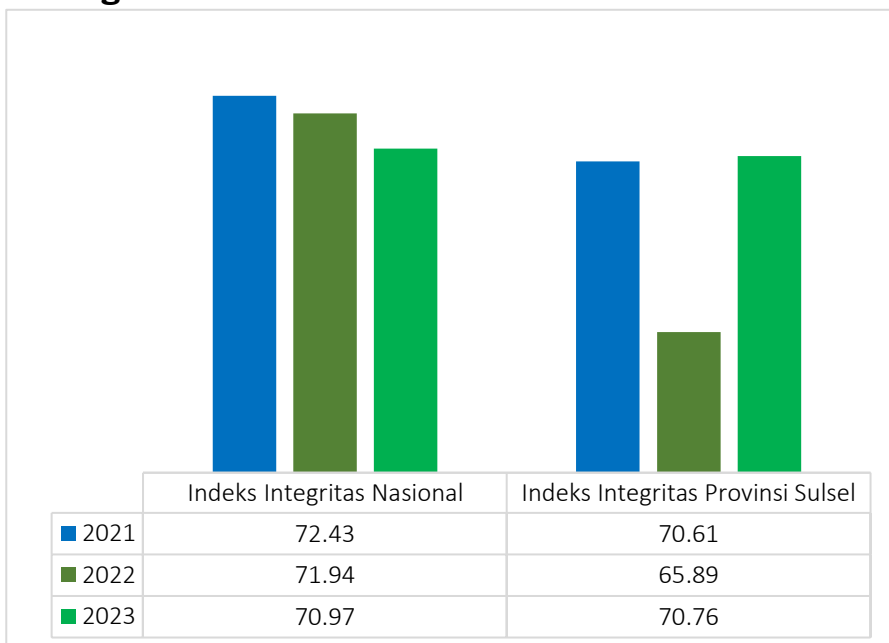
Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 nilai IID Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 2.530 poin yang menggunakan metode perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) skala 0-1000. Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode perhitungan IID pada dengan menggunakan skala 0-100, dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat pada kurun waktu tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun 2023 turun 2,34 poin atau sebesar 53,09 poin. Capaian ini menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi dengan nilai memperoleh nilai IID tertinggi untuk wilayah regional Sulawesi, namun baru mencapai peringkat ke 16 dari seluruh provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan indeks inovasi daerah tertinggi yang dicapai Sumatera Selatan pada poin 83,28, maka IID Sulawesi Selatan masih jauh lebih rendah. Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, maka inovasi yang dijalankan oleh perangkat daerah harus didukung oleh bukti yang memadai misalnya regulasi, anggaran, serta kelengkapan administrasi lainnya.

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, **Indeks Reformasi Hukum** adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Untuk pengukuran kinerja terkait Reformasi Hukum sajian data baru pada dua tahun terakhir ini sesuai dengan Permenkumham pada tahun 2023 berada pada angka 87,77 poin (Sangat Baik) atau meningkat 7,52 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang hanya 80,25 poin. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan kesesuaian tahapan pembentukan Perda dengan Perkada sesuai dengan peraturan perundangan terkait pembentukan Peraturan Daerah.

Selain dari sisi pelaksanaan reformasi hukum, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi publik juga dilihat dari nilai integritas pemerintah daerah yang diukur melalui **Indeks Integritas Nasional yang** diperoleh dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK untuk memetakan korupsi dan kemajuan Upaya pencegahan korupsi di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data SPI, capaian Indeks Integritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 masih berada di bawah nasional dan cenderung fluktuatif dimana Nilai Indeks Integritas Nasional hanya tumbuh sebesar 0,15 poin selama 3 tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan berbagai upaya yang komprehensif dalam pencegahan korupsi melalui optimalisasi penyediaan informasi layanan publik, penguatan mekanisme akuntabilitas pemerintahan serta mendorong budaya integritas di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Grafik II.45.

**Indeks Integritas Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2023**



Sumber Data : KPK, diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024

**2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025**

Pembangunan di Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkesinambungan. Olehnya itu evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting untuk menjadi dasar perumusan masalah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode RPJPD 2025-2045. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, diperoleh informasi sebagai berikut.

**2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**

Evaluasi RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap target indikator kinerja Sasaran Pokok setiap Tahapan Pembangunan Lima Tahun RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan setiap periode lima tahun dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja RPJPD Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Sulawesi Selatan per tahapan dalam periode RPJPD Sulawesi selatan tahun 2005-2025.

Evaluasi terhadap hasil RPJPD dalam rangka mencapai misi beserta indikator dan target kinerjanya, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan terdapat 10 Sasaran Pokok dengan 12 indikator, dimana 7 (tujuh) indikator tercapai, dan 5 (lima) indikator belum tercapai.
- Pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar terdapat 7 (tujuh) Sasaran Pokok dengan 7 (tujuh) indikator, dimana terdapat 4 (empat) tercapai, 1 (satu) belum tercapai, dan 2 (dua) tidak tersedia data realisasinya.
- Pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif terdapat 3 (tiga) Sasaran Pokok dengan 3 (tiga) indikator, dimana terdapat 1 (satu) indikator tercapai, 1 (satu) indikator belum tercapai, dan 1 (satu) indikator tidak tersedia data realisasinya.

- Pada Misi 4 yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan terdapat 18 Sasaran Pokok dengan 24 indikator, dimana terdapat 18 indikator tercapai, 3 (tiga) indikator belum tercapai, dan 3 (tiga) indikator tidak tersedia data realisasinya.
- Pada Misi 5 yaitu Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional terdapat 2 (dua) Sasaran Pokok dengan 2 (dua) indicator, dimana dua indikator tersebut semuanya tercapai.

Selengkapnya rangkuman ketercapaian indikator pada setiap misi pembangunan RPJPD Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel II.16.  
**Ringkasan Ketercapaian Misi Pembangunan  
RPJPD Sulawesi Selatan 2005-2025**

Misi	Jumlah total indikator	Kategori Ketercapaian Indikator			Capaian Realisasi Kinerja	Nilai Capaian Realisasi
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak ada Data		
<b>Misi 1</b>	12	7	5	-	89,53	Sangat Tinggi
<b>Misi 2</b>	7	4	1	2	100,00	Sangat Tinggi
<b>Misi 3</b>	3	1	1	1	99,52	Sangat Tinggi
<b>Misi 4</b>	24	18	3	3	100,00	Sangat Tinggi
<b>Misi 5</b>	2	2	-	-	100,00	Sangat Tinggi
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>97,81</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Beberapa indikator kinerja pembangunan yang belum mencapai target berdasarkan data capaian tahun 2022 sebagai data tahun evaluasi, sehingga masih perlu menjadi prioritas pada RPJPD 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel II.17.  
**Indikator Kinerja RPJPD 2005-2025 yang Belum Tercapai di Tahun 2023**

No.	Indikator RPJPD 2005-2025	Target Akhir RPJPD Tahun 2025	Capaian Tahun Evaluasi Data Capaian Tahun 2023
<b>1</b>	Indeks Pembangunan Manusia	75,22	74,60
<b>2</b>	Harapan Lama Sekolah	16,83	13,54
<b>3</b>	Persentase rata-rata pertumbuhan penduduk	0,77	1,15
<b>4</b>	Persentase keragaman budaya dan kekayaan budaya yang memperoleh pembinaan/ pelestarian	100%	14%

5	PDRB per kapita	124,5 Juta	69,70 Juta
6	Gini Ratio	0,340	0,377
7	Tingkat Kemiskinan	5,2-3,4 %	8,70%
8	Nilai Tukar Petani	126	106,1
9	Persentase kemantapan jalan, kapasitas/kualitas baik, dan konektivikasi	92,07%	75.37%
10	Luas lahan budidaya yang terairi jaringan irigasi	953.141 Hektar	805.142 Hektar

Sumber : Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2045

## 2.5.2.Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang kurangnya meliputi; indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi terhadap proses perencanaan dan proses pembangunan ke depannya.

### 2.5.2.1. Rekomendasi untuk Proses Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Proses perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun) memiliki karakteristik tersendiri untuk dapat menentukan visi jangka panjang suatu daerah terlepas dari periodisasi kepala daerah yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Untuk itu, dibutuhkan proses perencanaan yang dapat mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan berdasarkan tren yang terus berkembang dan kebutuhan yang akan terus tumbuh. Berdasarkan evaluasi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa poin rekomendasi untuk proses penyusunan rencana jangka panjang berikutnya, antara lain:

1. Penyusunan visi pembangunan jangka panjang perlu dibangun dengan pertimbangan tren dan kebutuhan di masa yang akan datang serta karakteristik dan konteks kewilayahan.
2. Pendetailan visi menjadi tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan pertimbangan waktu pencapaian sasaran pokok.
3. Penentuan misi pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan kebutuhan pada tingkat lokal dan nasional serta merespon terhadap berbagai konteks global dengan memprioritas terhadap aspek keberlanjutan, perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi hijau.
4. Tantangan ke depan membutuhkan kemampuan rencana untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Untuk itu, fleksibilitas yang terukur perlu dirancang agar dapat mengakomodasi perubahan yang

terjadi. Kemungkinan terjadinya kejadian tidak terduga seperti bencana alam maupun pandemi harus dipersiapkan dari awal perencanaan.

5. Proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak secara partisipatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Ruang diskusi dengan kelompok perempuan, minoritas, rentan, dan miskin perlu menjadi perhatian khusus untuk mewujudkan proses perencanaan yang inklusif.
6. Penentuan *means of verification* atau cara mengukur ketercapaian indikator harus mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi dengan sasaran pokok yang akan diukur. Data yang dibutuhkan perlu disajikan secara time series sehingga dapat menggambarkan dinamika selama 20 tahun pembangunan.

Perumusan indikator yang relevan untuk setiap sasaran pokok RPJPD Sulawesi Selatan harus mampu menggambarkan kondisi sasaran pokok yang ingin dicapai. Hal ini mengharuskan, pada beberapa konteks tertentu, indikator yang dirumuskan ke depan bersifat *outcome* yang dapat menggambarkan seluruh populasi dan tidak hanya menggambarkan *output* capaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan sasaran pokok tersebut.

#### **2.5.2.2. Rekomendasi untuk Perencanaan Pembangunan 20 tahun Sulawesi Selatan 2025-2045**

Telaah terhadap ketercapaian dan faktor pendorong dan penghambat masing-masing misi pembangunan RPJPD Sulawesi Selatan 2005-2025 menjadi bahan pembelajaran untuk mempertajam perencanaan pembangunan jangka panjang berikutnya. Setiap telaah tersebut berisikan catatan usulan tindaklanjut yang spesifik terhadap muatan setiap sasaran pokok pada masing-masing misi pembangunan. Selain usulan tindaklanjut terhadap proses perencanaan ke depannya, juga dirumuskan secara mendetail berbagai usulan tindaklanjut pembangunan untuk setiap sasaran pokok. Catatan ini dapat menjadi masukan konkrit untuk langkah pembangunan selanjutnya sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan 20 tahun yang lalu.

Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 mencatat beberapa hal penting dalam setiap pencapaian misi yang perlu diperkuat untuk keberhasilan pembangunan kedepan, meliputi hal sebagai berikut :

1. Perlu pemerataan pengembangan kewilayahan dan kebijakan pembangunan yang mendukung peningkatan IPM yang inklusif dan responsive gender, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlu pemetaan terhadap kelompok masyarakat paling rentan terhadap akses pendidikan dan kesehatan (disabilitas, perempuan, anak dari keluarga berpenghasilan rendah, keluarga 3T, tenaga pendidik, anak PMKS).
3. Perlu pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan serta pendidikan dan peningkatan konektivitas kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan terhadap kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan dengan transportasi umum.
4. Mendorong peningkatan kapasitas daya saing angkatan kerja sesuai dengan sektor unggulan daerah, termasuk penguatan perlindungan perempuan di sektor ekonomi informal.
5. Memperkuat kapasitas angkatan kerja agar terserap ke dalam lapangan kerja sektor ekonomi hijau.
6. Perlu peningkatan pemuda yang aktif yang berkualitas yang didukung dengan kebijakan dan sarana prasarana yang memadai,
7. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan perencanaan untuk mengarusutamakan gender dalam perencanaan.

8. Perlu pengendalian pertumbuhan penduduk sesuai kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
9. Perlu peningkatan dukungan terhadap pelestarian kebudayaan daerah.
10. Optimalisasi pengelolaan hibah keagamaan dan penguatan forum komunikasi antar umat beragama sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
11. Penguatan insentif untuk kelembagaan sektor ekonomi seperti UMKM dan koperasi perlu dilakukan agar dapat menunjang pertumbuhan bidang usaha sesuai dengan potensi daerah.
12. Aksesibilitas dan kemudahan permodalan untuk memulai usaha membuka ruang berkembang bagi UMKM dan koperasi, terutama dengan mendorong ruang permodalan bagi kelompok marjinal, perempuan, dan disabilitas.
13. Fasilitasi dan pendampingan dengan sistem *mentoring* dapat meningkatkan akses pelaku UMKM untuk memajukan usaha dan pemasaran.
14. Pemetaan kebutuhan akan pelatihan dibutuhkan agar dapat merancang kurikulum dan program yang tepat sasaran bagi pengembangan usaha UMKM.
15. Peningkatan partisipasi pemuda dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan melalui penguatan peran ruang komunal seperti perpustakaan, gedung serba guna, ruang terbuka publik, dan tempat ibadah.
16. Pemetaan potensi kerja sama antar daerah berdasarkan isu pembangunan daerah dan pengembangan nexus kerja sama berbasis pangan, energi, dan air.
17. Penguatan jejaring kerja sama pengembangan penelitian dengan dunia usaha untuk dapat mengakselerasi pengembangan usaha kreatif, wirausaha sosial (*social entrepreneurship*), dan pemanfaatan teknologi.
18. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan keamanan data pemerintah dan optimalisasi dan penindakan terhadap gangguan kamtibmas.
19. Pengembangan mekanisme pengelolaan data terpadu lintas instansi pemerintah untuk penanganan kamtibmas.
20. Peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pejabat pengelola keuangan dan bendahara umum daerah guna meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan serta meningkatkan penerimaan kas daerah.
21. Optimalisasi sistem informasi pengaduan layanan publik dan meningkatkan ketanggapan respons pemerintah daerah terhadap pengaduan masyarakat.
22. Pemerataan akses terhadap pembangunan melalui pemerataan konektivitas antarwilayah dengan pusat pertumbuhan regional dan lokal.
23. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan vokasi serta pemberdayaan tenaga kerja, khususnya untuk perempuan, masyarakat yang berada di wilayah 3T, tenaga kerja yang berada di sektor kerja tak digaji, informal, dan UMKM dan tenaga kerja disabilitas.
24. Perlu meningkatkan kualitas dan keterjangkauan jaringan pengaman sosial.
25. Penguatan kerjasama pemerintah daerah, kelompok masyarakat, mitra pembangunan dan kalangan akademisi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok rentan, meningkatkan akses dan adopsi teknologi dan digitalisasi dalam aktivitas perekonomian masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, dan menguatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana.
26. Pengembangan konektivitas antarwilayah dengan jaringan energi listrik dan transportasi publik yang berwawasan lingkungan (rendah karbon, memanfaatkan energi baru terbarukan, sesuai dengan kearifan lokal).
27. Pengendalian terhadap degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan melalui penguatan pengendalian dan pengawasan tata ruang, peningkatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung, dan peningkatan kapasitas

masyarakat yang inklusif dalam hal kebencanaan dan perlindungan sumber daya alam

28. Peningkatan pengelolaan dan konektivitas pelabuhan sebagai gerbang pertumbuhan, dan
29. Peningkatan kapasitas pengelolaan Pelabuhan.

Selain itu, terdapat beberapa catatan pembangunan 20 tahun Sulawesi Selatan yang ditemukan di lintas misi dan mendasar serta menjadi rekomendasi dalam pembangunan 20 tahun kedepan sebagai berikut :

1. Perlunya pemerataan konektivitas antarwilayah terhadap pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur kewilayahan, transportasi massal, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
2. Perlunya peningkatan inklusivitas pembangunan, perlindungan di sektor ekonomi informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak untuk kelompok masyarakat termarginalkan yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
3. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemuda yang berkualitas dalam pembangunan.
4. Perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan hijau untuk menjaga keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Perlunya penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan keagamaan, akademisi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan kearifan lokal.
6. Perlunya pemberdayaan pelaku usaha UMKM dan tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas menuju *value-driven local industries* dan *highly-skilled workforce* serta peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan permodalan dan layanan ketenagakerjaan.
7. Perlunya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pengembangan ekosistem kelembagaan, regulasi, iklim investasi, perencanaan hingga monitoring dan evaluasi yang kondusif, pemanfaatan sistem informasi dan basis data serta penguatan kerjasama untuk mendorong inovasi pembangunan.

## **2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**

Perencanaan pembangunan memerlukan informasi demografi baik informasi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Informasi demografi masa datang berupa proyeksi penduduk dapat memberikan berbagai informasi yang akan mempengaruhi perkembangan social dan ekonomi sehingga membantu dalam pembuatan kebijakan yang bisa diterapkan di berbagai scenario.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar harus menjadi prioritas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prasarana dan sarana dasar yang memadai merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah. Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana Sulawesi Selatan untuk dua puluh tahun ke depan didasarkan pada hasil proyeksi demografi yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

### 2.6.1. PROYEKSI DEMOGRAFI

Proyeksi demografi memberikan mengenai ukuran dan struktur umur penduduk Sulawesi Selatan di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 berdasarkan Data BPS sebesar 9,312 juta orang yang dengan menggunakan scenario tren maka jumlah penduduk bertambah sebanyak 1,726 juta orang menjadi sebanyak 11,038 juta orang pada tahun 2045.

Tabel II.18.

**Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan**

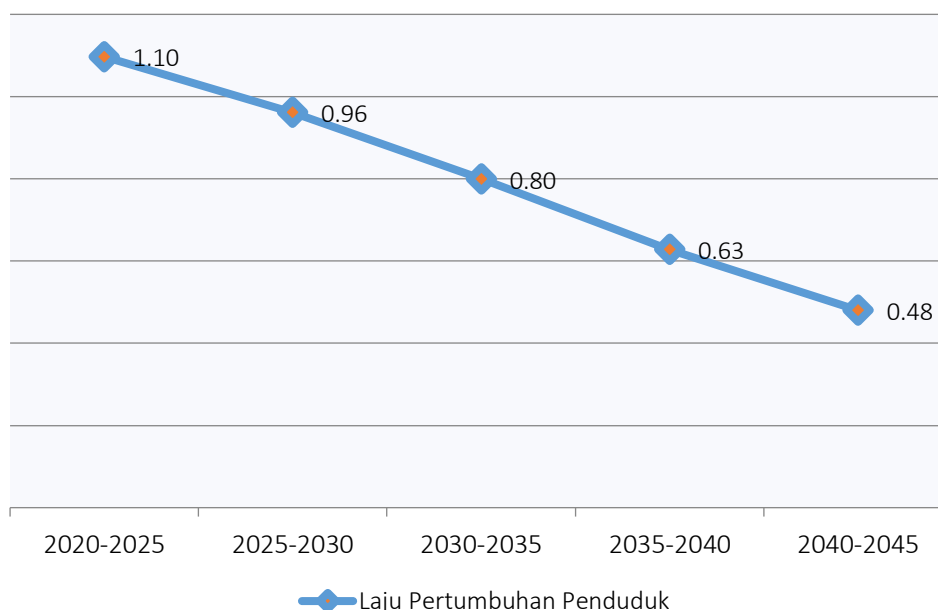
Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023

Meskipun penduduk Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2025-2045 terus bertambah, namun laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda. Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan pada periode 2020-2025 sebesar 1,10 persen secara bertahap melambat menjadi 0,62 persen pada periode 2035-2040 dan menjadi 0,48 persen pada periode 2040-2045.

Grafik II.46.

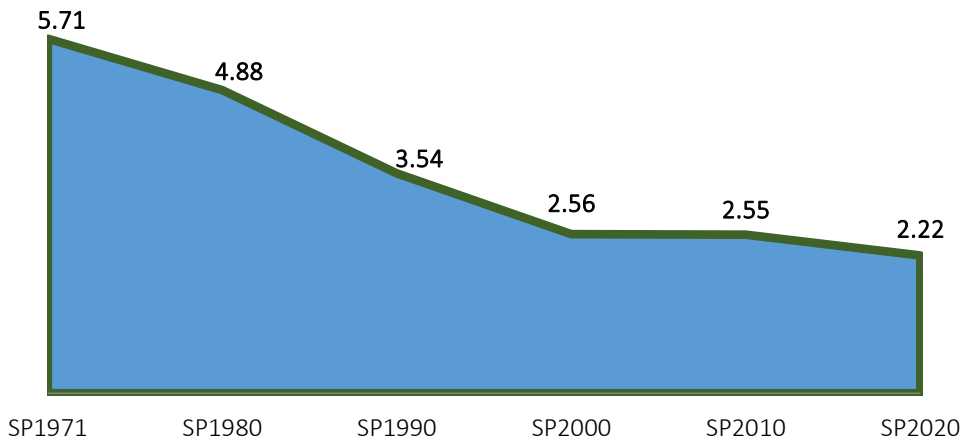
**Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Proyeksi, 2020-2045**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Perlambatan laju pertumbuhan penduduk antara lain disebabkan keberhasilan menurunkan tingkat fertilitas. Angka Kelahiran Total (TFR) Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2000 – 2020 menunjukkan penurunan dari angka 2,56 pada tahun 2000 menjadi sebesar 2,22 pada tahun 2020 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2 (dua) anak selama masa reproduksinya.

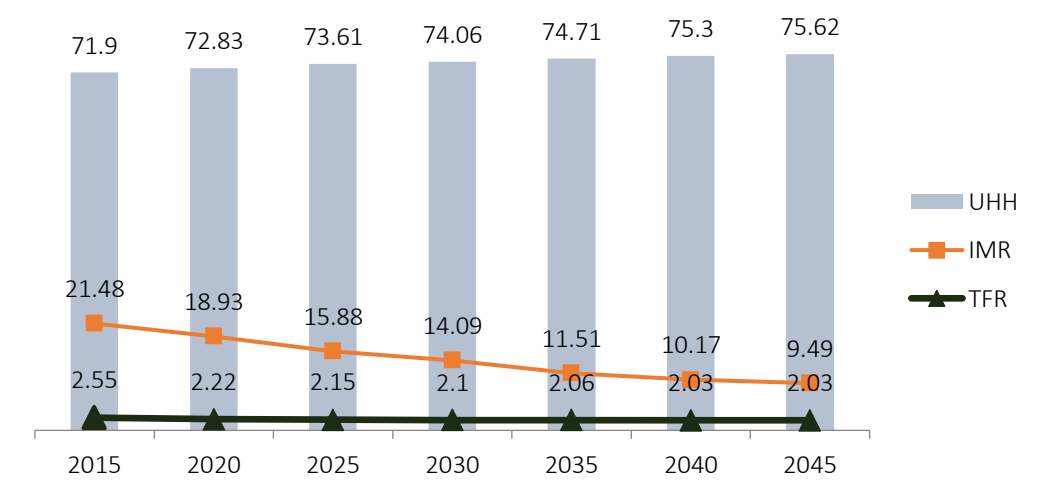
Grafik II.47.  
**Nilai TFR Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Proyeksi 1971-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 diolah

Berdasarkan hasil proyeksi, TFR Sulawesi Selatan akan terus menurun sampai dengan tahun 2045 yang diproyeksikan akan mencapai angka 2,01, seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat yang tergambarkan pada Angka Kematian Bayi (IMR) sebesar 9,49 dan Usia Harapan Hidup Saat lahir (UHH) sebesar 75,62 tahun.

Grafik II.48.  
**Nilai TFR Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Proyeksi 2015-2045**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Penurunan tingkat fertilitas dan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat dan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat mendorong perubahan struktur penduduk Sulawesi Selatan. Piramida penduduk Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2015-2023 masih terpusat pada penduduk usia 15 – 64 tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2040 Sulawesi mulai sudah memasuki era *ageing population* dimana jumlah penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas pada tahun 2045 sudah mencapai 18 persen dari populasi penduduk tahun 2045 atau setara dengan 1.979.364 jiwa. Hal ini menandakan bahwa bonus demografi di Sulawesi Selatan yang dimulai pada tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2039 dengan tahun puncak pada tahun 2024 dengan rasio ketergantungan sebesar 44,89.

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan di Sulawesi Selatan. Sensus penduduk 2020 mencatat rasio ketergantungan sebesar 45,84 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15 -64 tahun) menanggung 46 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas pada tahun 2020. Berdasarkan proyeksi penduduk, maka pada tahun 2045

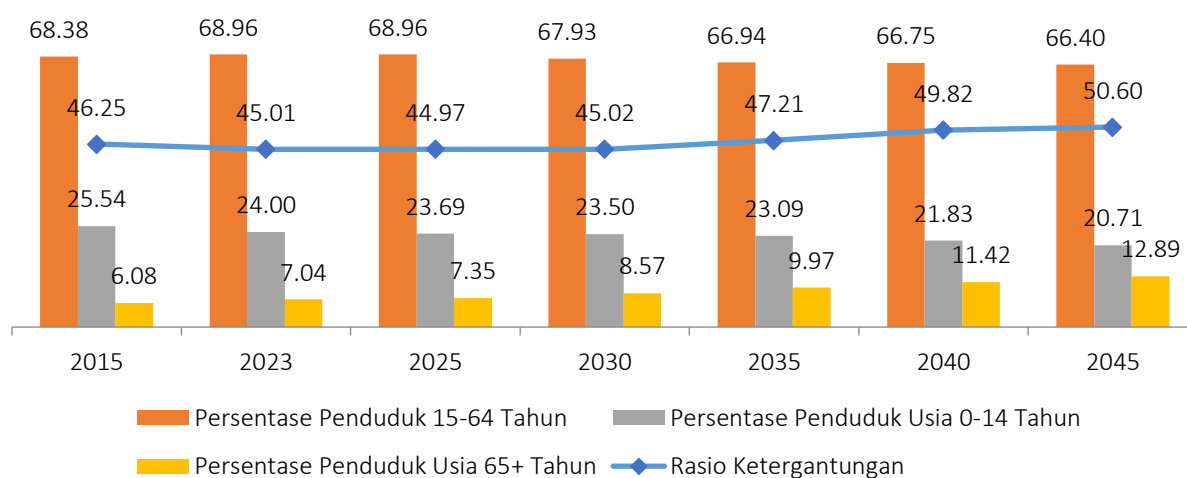
diprediksi . . .

diprediksi rasio ketergantungan di Sulawesi Selatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persentase penduduk usia lanjut menjadi sebesar 50,85 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15 -64 tahun) menanggung 51 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas pada tahun 2020.

Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk, dikarenakan luas wilayah yang bersifat tetap. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebesar 45.691,45 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 9.312.303 jiwa sehingga kepadatan penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebesar 204 jiwa/Km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi sebesar 242 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Grafik II.49.

**Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2045**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Memperhatikan proyeksi dan distribusi penduduk Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota, maka kepadatan penduduk di kota jauh lebih besar dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.19.

**Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2045**

	2023			2045		
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
<b>Kabupaten</b>	7.524.154	45.123,53	167	9.019.387	45.123,53	200
<b>Kota</b>	1.787.865	567,92	3.148	2.018.632	567,92	3.554

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Ketersediaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender atau pembangunan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan spesifik perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, disamping untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin perempuan dengan laki-laki.

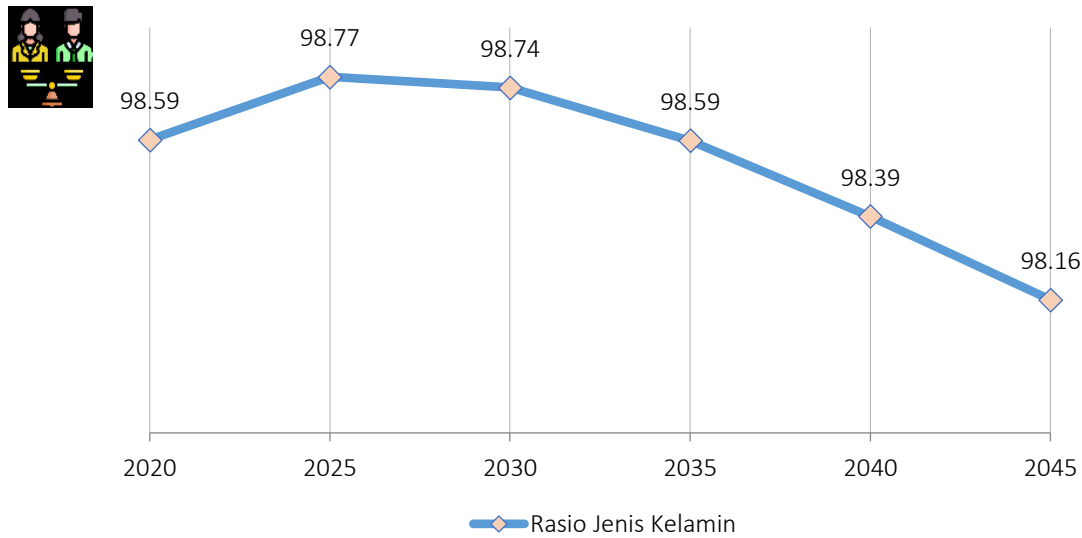
Tabel II.20.  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	4.601.250	4.751.880	4.985.060	5.184.550	5.344.310	5.467.800
Perempuan	4.710.769	4.811.250	5.048.840	5.258.560	5.431.890	5.570.220
Jumlah Laki-Laki+ Perempuan	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Rasio	98,63	98,77	98,74	98,59	98,39	98,16

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023

Rasio jenis kelamin Sulawesi Selatan tahun 2045 menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki laki dan jumlah penduduk wanita sebesar 98,16 yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki laki.

Grafik II.50.  
**Rasio Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Proyeksi,  
 2020-2045**



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka rasio jenis kelamin di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2045 diproyeksikan menurun yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk perempuan melebihi penambahan jumlah penduduk laki laki dengan laju pertumbuhan diproyeksi sebesar 0,01 persen per tahun yang dapat dipengaruhi oleh rata rata perkiraan Umur Harapan Hidup saat lahir perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dan/atau angka kematian bayi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian bayi laki-laki.

Tabel II.21.  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
 Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>0-14 Tahun</b>	2.234.646	2.235.461	2.329.113	2.386.767	2.336.140	2.270.078
<b>15-64 Tahun</b>	6.421.427	6.507.284	6.733.848	6.918.522	7.143.207	2.278.665
<b>&gt; 65 Tahun</b>	655.946	693.841	849.943	1.030.450	1.222.283	1.413.116
<b>Jumlah Total</b>	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2023

### 2.6.2. PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRSARANA PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public utamanya yang terkait dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Sarana dan prasarana pelayanan public berperan besar dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, prevalensi stunting hingga pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public, khususnya yang terkait layanan dasar masyarakat di Sulawesi Selatan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan yang mengatur perencanaan struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani yang meliputi:

#### a) **Kebutuhan Perumahan**

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak masyarakat untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 129, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami *backlog* atau kesenjangan terkait pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Penentuan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah sampai saat ini memiliki pengertian yang berbeda antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menetapkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah berdasarkan rumah layak huni dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghitung

kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan berdasarkan status kepemilikan rumah.

Kebutuhan rumah di Sulawesi Selatan, yang didasarkan pada pertambahan jumlah penduduk maka pada tahun 2023 diproyeksikan, jumlah rumah yang terbangun sebanyak 2.192.068 unit dan pada tahun 2045 diprediksikan akan bertambah menjadi sebanyak 2.773.372 unit rumah.

Tabel II.22.

**Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan**

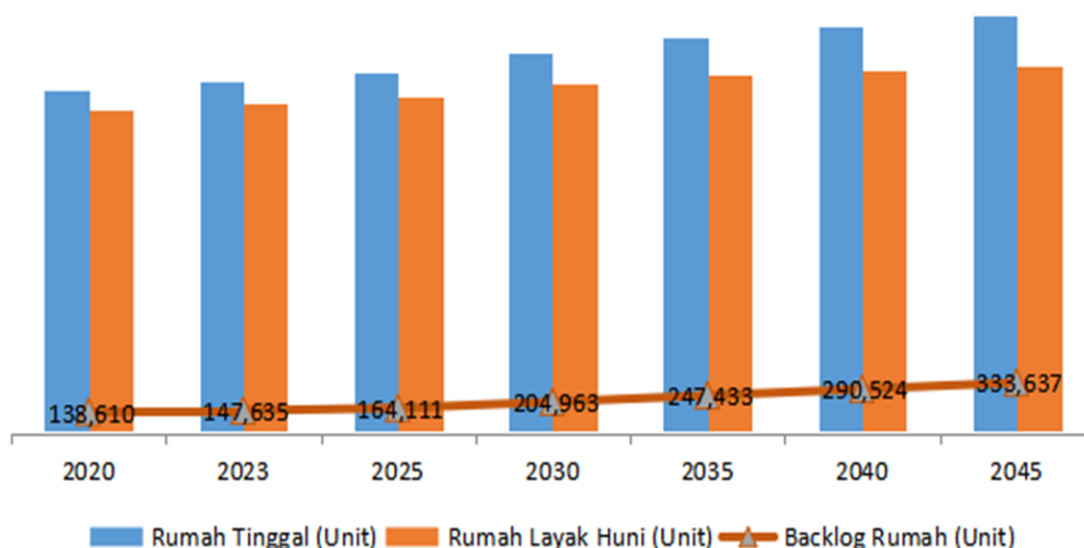
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	2.192.068	2.402.796	2.521.080	2.623.899	2.707.588	2.773.372

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Perhitungan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah di Sulawesi Selatan saat ini didasarkan pada kebutuhan rumah layak huni sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 yang pada tahun 2022 sudah mencapai 93,40 persen dari jumlah rumah yang ada atau sebanyak 2.165.037 unit dan diprediksi pada tahun 2023 akan meningkat menjadi 2.192.068 unit, sehingga kesenjangan pemenuhan rumah layak huni pada tahun 2023 sebanyak 138.610 unit dan diproyeksikan pada tahun 2045 akan bertambah menjadi 333.637 unit rumah atau sebesar 88 persen.

Grafik II.51.

**Proyeksi Kesenjangan Pemenuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2045**



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Prov. Sulawesi Selatan dan BPS Prov. Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda Tahun 2023.

**b) Kebutuhan Air Minum**

Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan air di Sulawesi Selatan didasarkan pada perencanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibagi atas jaringan perpipaan (JP) yang dilayani oleh PDAM dan bukan perpipaan jaringan perpipaan (BJP) yang terdiri dari sumur, bak penampung air hujan, dan mata air.

Akses masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap jaringan perpipaan perpipaan pada tahun 2023 sebanyak 651.841 sambungan rumah yang melayani 3.259.207 jiwa atau sebesar 41,59 persen dan diprediksi pada tahun 2025 cakupan pelayanan jaringan perpipaan di Sulawesi Selatan meningkat menjadi 1.912.626 sambungan rumah yang melayani 9.563.130 jiwa atau sebanyak 49,29 persen. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum, maka pada tahun 2045 jumlah penduduk yang akan terlayani sebanyak 11.038.020 jiwa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 2.207.604 sambungan rumah atau sebesar 100 persen penduduk sudah terlayani dengan jaringan perpipaan.

Tabel II.23.

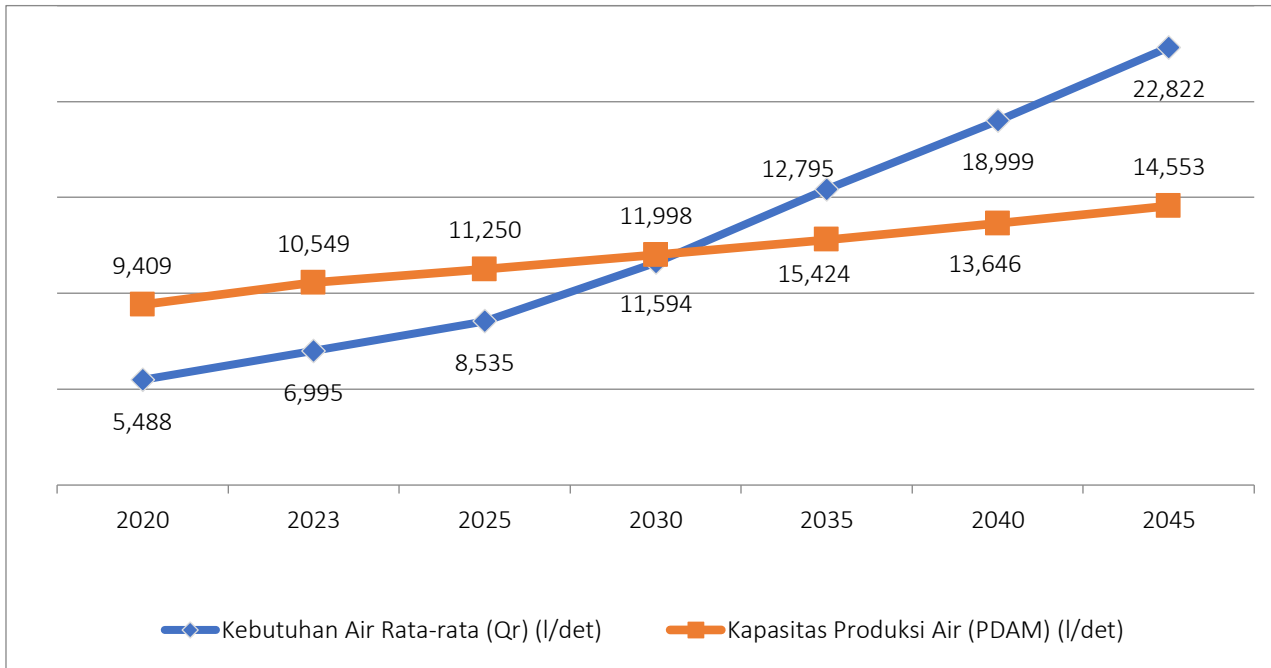
**Proyeksi Kebutuhan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Penduduk</b>	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
<b>Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)</b>	8.935,08	9.862,81	12.755,61	16.390,94	19.747,15	23.333,28
<b>Sambungan Rumah (Unit SR)</b>	651.841	1.912.626	2.006.780	2.088.780	2.155.240	2.207.604

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Sulawesi Selatan Tahun 2021, Bappelitbangda 2023 diolah

Pemerintah telah mencanangkan peningkatan pemenuhan akses air minum layak menjadi pemenuhan akses air minum aman, untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum aman berupa jaringan perpipaan yang direncanakan akan mencapai 100 persen pada tahun 2045. Kebijakan tersebut mempengaruhi peningkatan kebutuhan air rata-rata yang disediakan oleh PDAM menjadi sebesar 22.822 liter per detik pada tahun 2045, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas produksi air guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Grafik II.52.  
**Perbandingan Kebutuhan Rata Rata Dibandingkan Kapasitas Produksi Air (PDAM) Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Sulawesi Selatan Tahun 2021, Bappelitbangda 2023 diolah

**c) Kebutuhan Energi dan Kelistrikan**

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai inikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energy listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Proyeksi konsumsi listrik per kapita Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050 yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita mencapai 837 kWh per kapita yang diproyeksikan pada tahun 2025 , konsumsi listrik per kapita sebesar 1.185 kWh perkapita dan pada tahun 2045 akan mencapai 3.332 kWh.

Tabel II.24.

**Proyeksi Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Konsumsi listrik (ribu kWh)	9.664.308	11.335.660	15.637.608	21.370.816	28.320.759	36.780.902
Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.038	1.185	1.558	2.046	2.628	3.332

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2023 diolah

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Selatan hingga September 2023 mencapai 99,99 persen, dimana dari jumlah rumah tangga sebanyak 2.170.634 yang terlayani listrik dari PLN sebanyak 2.110.247 dan yang terlayani listrik non PLN sebanyak 38.681 dan diprediksi pada akhir tahun 2023 akan terlayani sebesar 100 persen. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga didasarkan pada standar sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2044 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang menetapkan bahwa setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA perjiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga.

Tabel II.25.

**Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Jumlah Rumah Tangga (RT)	2.170.634	2.223.984	2.322.662	2.417.389	2.448.730	2.549.238
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	5.866.572	6.024.772	6.321.357	6.579.166	6.789.006	6.954.066

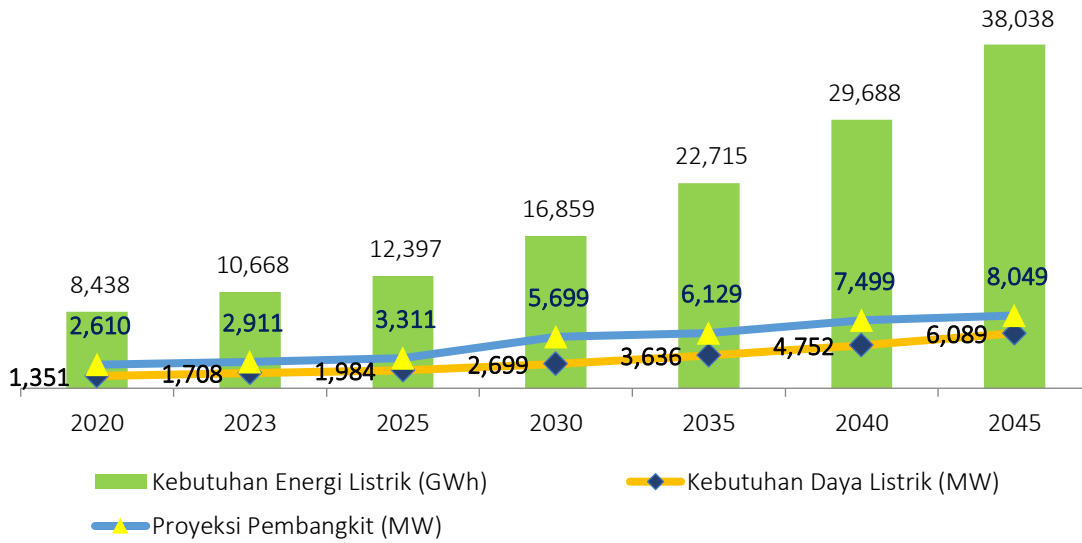
Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2023 diolah

Selain kebutuhan rumah tangga, pada dokumen RUED Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2050 juga direncanakan pemenuhan energy listrik untuk sector industry, transportasi, dan komersial di Sulawesi Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik semua sektor berdasarkan skenario RUED, setelah dilakukan analisis yang mempertimbangkan *losses* dan pemakaian sendiri, maka didapat kebutuhan riil energi listrik yang harus dibangkitkan pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 12.397 GWh, dan pada tahun 2045 sebesar 38.038 GWh. Bila kebutuhan energi listrik tersebut dikonversi sebagai kebutuhan daya, maka diperkirakan kebutuhan daya pada tahun 2025 sebesar 1.984 MW, dan pada tahun 2045 sebesar 6.089 MW.

Untuk memenuhi kebutuhan daya tersebut, maka direncanakan pembangunan pembangkit baru, sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Umum Pembangkit Listrik (RUPTL-PLN) Tahun 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berupa PLTU Batubara, PLTA, PLTG Gas, PLTGU Gas, PLTMG, PLT Biomasa, PLT Sampah, PLTP, PLT Laut, dan PLTB, serta PLTS. Pembangkit listrik tersebut pada tahun 2020 telah memasok kebutuhan listrik sebesar 2.610 MW dan pada tahun 2023 direncanakan dapat memasok kebutuhan listrik sebesar 2.911 MW dan pada tahun 2045 diproyeksikan akan memasok kebutuhan listrik sebesar 8.049 MW untuk memenuhi kebutuhan daya listrik Sulawesi Selatan.

Grafik II.53.

**Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik dan Daya Listrik serta Pembangkit Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2023 diolah

**d) Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan**

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Perhitungan proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari, sehingga pada tahun 2045 diproyeksi jumlah timbulan sampah sebanyak 2.014.439 ton.

Tabel II.26.

**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	1.699.443,47	1.745.271,29	1.831.186,82	1.905.869,38	1.966.656,57	2.014.438,56

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Memperhatikan proyeksi timbulan sampah, maka diproyeksikan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan berupa TPS yang terdiri dari TPS3R dan TPST dan TPA, sebagai berikut.

Tabel II.27.  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Prasarana Pengelolaan Persampahan (Unit)						
TPS	48	80	84	87	90	92
TPS3R	40	80	84	87	90	92
TPA	27	27	27	27	27	27

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023, di provinsi Sulawesi Selatan terdapat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebanyak 8 unit yang tersebar di 6 kabupaten dan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) sebanyak 40 unit yang tersebar di 14 kabupaten/kota serta 27 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Memperhatikan standar kebutuhan prasarana pengelolaan persampahan yang didasarkan pada cakupan pelayanan berdasarkan jumlah jiwa, maka sampai dengan Tahun 2045 masih dibutuhkan tambahan 44 unit TPS dan/atau TPST, 44 unit TPS3R, sedangkan TPA yang sudah tersedia pada setiap kabupaten/kota hanya memerlukan peningkatan kapasitas dan/atau penanganan agar dapat tetap memproses sampah dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

**e) Kebutuhan Fasilitas Kesehatan;**

Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk menyediakan layanan medis baik dasar maupun kompleks adalah Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotik yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tabel II.28.  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Penduduk</b>	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
<b>Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)</b>						
<b>Rumah Sakit</b>	126	126	126	126	126	126
<b>Puskesmas</b>	473	473	473	473	473	473
<b>Klinik</b>	181	319	334	348	359	368
<b>Apotik</b>	590	590	590	590	590	590

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023, maka kesenjangan pemenuhan fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan hanya pada ketersediaan klinik yaitu fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan medis dasar, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi pasien dengan kondisi medis ringan dan tidak darurat. Jumlah klinik yang tersedia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebanyak 181 unit yang tersebar di 24 kabupaten/kota, sedangkan berdasarkan cakupan pelayanan dibutuhkan 310 unit klinik dan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045 masih dibutuhkan penambahan sebanyak 187 unit.

Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik berdasarkan standar kebutuhan sampai dengan tahun 2045 ketersediaannya sudah mencukupi sehingga yang dibutuhkan hanya peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.

**f) Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran terutama dalam proses belajar dan mengajar adalah Taman Kanak Kanak (TK) untuk menunjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk menunjang pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) untuk menunjang pendidikan menengah yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel II.29.

**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	9.312.019	9.563.130	10.033.900	10.443.120	10.776.200	11.038.020
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan						
TK	5.162	7.651	8.027	8.354	8.621	8.830
SD/MI	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162
SMP/MTs	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
SMA/SMK/MA	1.474	1.992	2.090	2.176	2.245	2.300

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2023 diolah

Memperhatikan ketersediaan fasilitas pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka kesenjangan ketersediaan fasilitas pendidikan hanya pada sarana PAUD yang masih membutuhkan ketersediaan sarana sebanyak 2.288 unit dan sarana SMA/SMK/MA yang masih membutuhkan ketersediaan sarana sebanyak 386 unit. Sehingga berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 dibutuhkan penambahan sarana PAUD sebanyak 3.668 unit dan sarana pendidikan menengah sebanyak 826 unit.

**g) Kebutuhan jaringan transportasi;**

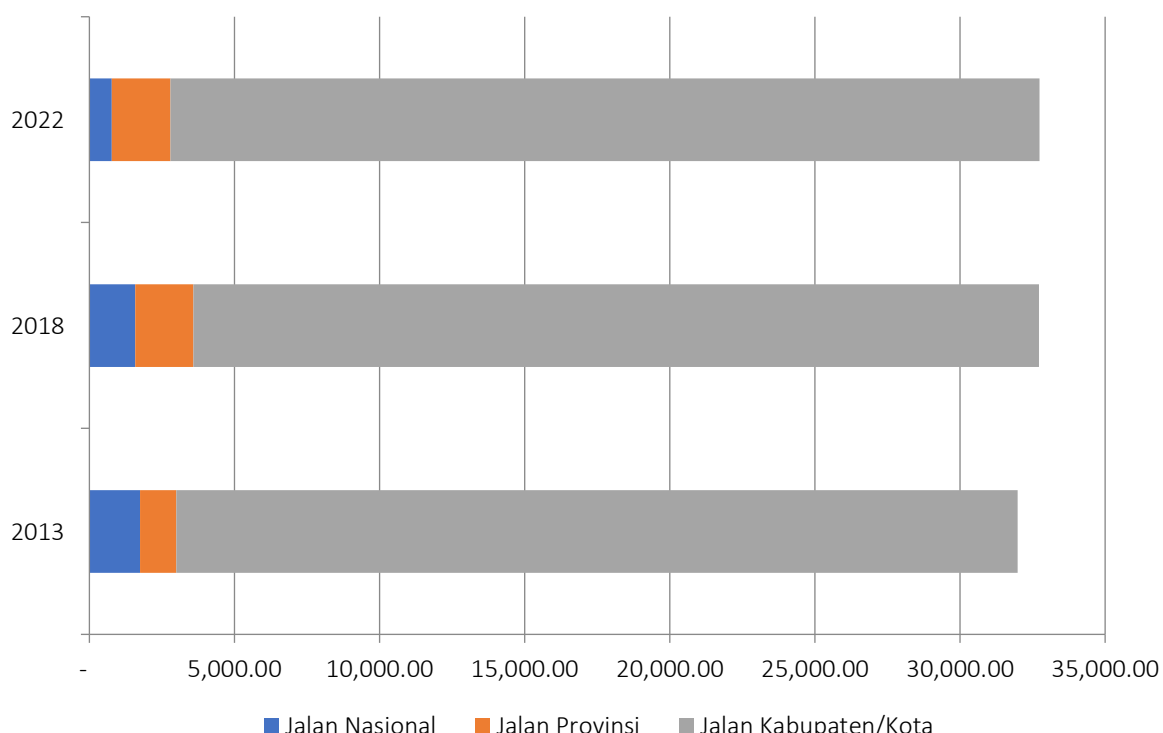
Sistem jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas system jaringan jalan, system jaringan kereta api, system jaringan sungai, danau dan penyeberangan, system jaringan transportasi laut, serta bandar udara dan bandar udara khusus.

### 1. Sistem Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan salah satu factor utama pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sistem jaringan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan baik pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengatur jalan menurut statusnya yang dikelompokkan ke dalam jalan Nasional, dan jalan daerah yang terdiri dari Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota dan mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yaitu Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam pengembangan system jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan jalan secara umum dan jalan nasional, sedangkan pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pada jalan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Grafik II.54.

**Gambaran Penyelenggaraan Jalan Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2022**



Sumber: Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023, diolah

Panjang jalan baik jalan nasional maupun jalan daerah di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2013 sepanjang 31.978,65 Km mengalami peningkatan sepanjang 1.725,21 Km menjadi sepanjang 33.703,86 Km pada tahun 2022 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688 Tahun 2022 tentang Status Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 668/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya.

Jalan sebagai infrastruktur pendukung konektivitas dan akses distribusi logistic di Sulawesi Selatan sangat dibutuhkan. Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan tahun 2045 didasarkan pada aspek mobilitas yang menghitung rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya yang dinyatakan dalam satuan km/10.000 jiwa.

Tabel II.30.  
Perhitungan Kebutuhan Panjang Jaringan Jalan Minimal di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2045

Deskripsi	Satuan	Tahun 2022	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km <sup>2</sup>	71,60	74,22	78,65	81,05	83,63	85,67
Kebutuhan Jalan Minimal	Km	17.067,63	17.691,79	18.747,72	19.319,77	19.935,97	20.420,34
Kerapatan Jalan	Km	7,55	7,28	6,87	6,67	6,46	6,31

Sumber: Penentuan Capaian Luas Kawasan Terlayani Infrastruktur Terbangun, Kementerian PUPR Tahun 2023, diolah

Tabel II.31.  
Rencana Pembangunan Jalan Berdasarkan Arah Rencana Tata Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2045

Deskripsi	Satuan	Tahun 2022	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
<b>Jalan Nasional</b>							
Jalan Arteri Primer	Km	925,27	925,27	997,31	997,36	1.952,03	1.952,03
Jalan Kolektor Primer-1	Km	813,93	813,93	813,93	813,93	813,93	813,93
<b>Jalan Provinsi</b>							
Jalan Kolektor Primer-2	Km	2.014,23	2.014,23	2.171,13	2.328,03	2.484,93	2.641,83
<b>Jalan Kabupaten/Kota</b>							
Jalan Primer dan Sekunder	Km	29.950,43	29.950,43	30.035,15	30.119,87	30.204,59	30.289,31
<b>Total</b>		<b>33.703,86</b>	<b>33.703,86</b>	<b>34.017,52</b>	<b>34.259,19</b>	<b>35.455,48</b>	<b>35.697,10</b>

Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, diolah Tahun 2023

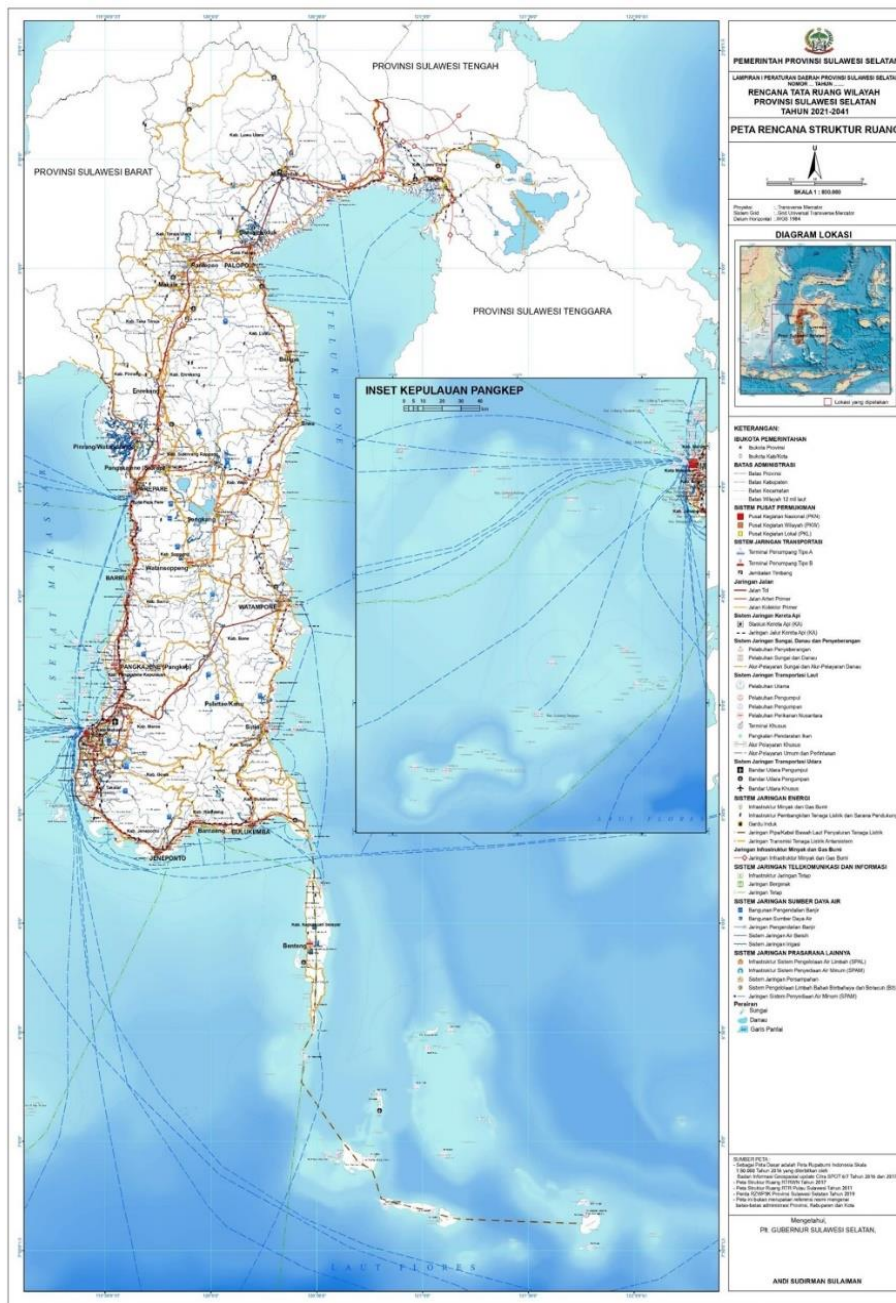
Berdasarkan dasar perhitungan tersebut, maka diprediksi kebutuhan jalan minimal di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2045 sepanjang 20.420,34 Km telah terpenuhi sebagaimana yang direncanakan pada RTRWP Sulawesi Selatan sepanjang 35.697.10 Km.

Rencana pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana ditetapkan dalam RTRWP meliputi jalan kewenangan nasional berupa jalan arteri primer sepanjang 1.026,76 Km yang meliputi jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, jalan lintas tengah Pulau Sulawesi, jalan penghubung lintas Pulau Sulawesi, jalan non lintas, jalan lintas timur Pulau Sulawesi dan jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol. Sedangkan jalan kewenangan provinsi yang direncanakan akan dibangun berupa jalan kolektor primer yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah sepanjang 627,60 Km dan jalan kewenangan kabupaten/kota berupa jalan pada system primer dan sekunder sepanjang 338,88 KM.

### 2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Renacan Tata Ruang Kawasan Perkotaan MAMMINASATA maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

**Gambar II.3.**  
**Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Perda Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan dan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Memperhatikan kinerja pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebagaimana digambarkan berdasarkan kawasan pembangunan sebagai berikut:

### **2.7.1. Pembangunan Kawasan Makassar**

Pembangunan kawasan Makassar dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran Kawasan Makassar yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam. Pembangunan kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi rata-rata 49,63 persen pertahun, yang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan dan jasa dengan kontribusi sebesar 17,51 persen, lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,17 persen dan lapangan usaha industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,23 persen yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, sebagaimana peran kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional di Kawasan Timur Indonesia yang memacu tumbuhnya investasi rata-rata sebesar 7,15 persen per tahun atau rata rata investasi sebesar Rp. 97,36 triliun (atas dasar harga berlaku).

PDRB Kawasan Makassar pada Tahun 2023, berkontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PDRB dari 49,74 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 50,01 persen pada tahun 2023 yang dikontribusikan oleh Kota Makassar, kabupaten Maros dan kabupaten Gowa.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Makassar, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Makassar memiliki ketercapaian yang baik untuk indicator Indeks Pembangunan manusia namun sebagai kawasan yang menjadi episentrum sosial dan ekonomi di Sulawesi Selatan capaian IPM di Kawasan Makassar masih perlu ditingkatkan. Ketercapaian target pada indicator tingkat kemiskinan dan gini ratio pada Kawasan Makassar masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indicator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal dan pada indicator laju pertumbuhan ekonomi hanya kabupaten Takalar yang pencapaian targetnya belum tercapai.

Ketercapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Makassar, tidak terlepas dari kinerja perwujudan ruang kawasan MAMMINASATA yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kabupaten Pangkajene Kepulauan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana

diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditandai dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas antara lain bandar udara pengumpul, Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan regional serta kemantapan jalan yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan pembangunan lainnya, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta pemenuhan akses akan layanan air minum dan sanitasi, khususnya jaringan air minum perpipaan dengan rata-rata 35,78 persen yang lebih baik daripada capaian provinsi tahun 2023 sebesar 31,49 persen.

### **2.7.2. Pembangunan Kawasan Bulukumba**

Sebagai upaya mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan, maka kebijakan pengembangan kawasan Bulukumba yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap dan peningkatan akses kelola kawasan hutan dengan skema perhutanan sosial, serta optimalisasi fungsi dan peningkatan produktivitas Kawasan Industri Bantaeng sebagai kawasan industri prioritas nasional. Selain itu dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan dasar diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan destinasi pariwisata sebagai bagian dari pengembangan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh penguatan kewirausahaan.

PDRB di Kawasan Bulukumba merupakan PDRB kawasan yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang hanya sebesar 10,17 persen, yang dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi PDRB kabupaten Kepulauan Selayar, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Jeneponto.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten di Kawasan Bulukumba, maka semua kabupaten di Kawasan Bulukumba memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Indeks Pembangunan Manusia. Pada target indikator tingkat kemiskinan, semua kabupaten pada Kawasan Bulukumba masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, sedangkan pada indikator Gini Ratio, semua kabupaten juga masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, kecuali kabupaten Sinjai.

Ketercapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Bulukumba tidak terlepas dari kinerja perwujudan ruang kawasan yang beberapa kabupatennya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kabupaten Jeneponto dan kabupaten Bulukumba sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditandai dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas antara lain pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpul serta kemantapan jalan yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan pembangunan lainnya, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, namun masih rendah pada pemenuhan akses akan layanan air minum dan sanitasi, khususnya jaringan air minum perpipaan dengan capaiannya hanya 29,86 persen yang lebih rendah daripada capaian provinsi tahun 2023 sebesar 31,49 persen.

### **2.7.3. Pembangunan Kawasan Watampone**

Pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk memacu pemulihan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh

peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Kawasan Watampone berkontribusi sebesar 13,21 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kontribusi PDRB kawasan Watampone terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya pada kabupaten Bone dan kabupaten Wajo. Kawasan Watampone memberikan kontribusi cukup besar terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,33 persen mengingat peran kawasan Watampone sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten di Kawasan Watampone, maka semua kabupaten pada indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi serta Gini ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Soppeng yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal. Dan pada ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia, semua kabupaten memiliki ketercapaian yang baik.

Ketercapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Watampone sangat dipengaruhi oleh kinerja perwujudan ruang kawasan yang kabupatennya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kabupaten Wajo dan kabupaten Soppeng serta kabupaten Bone yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hal ini tergambarkan dari ketersediaan infrastruktur konektivitas antara lain pelabuhan pengumpan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional yang belum dapat berfungsi optimal serta kemantapan jalan yang baik walaupun lebih rendah daripada kemantapan jalan provinsi. Akan tetapi pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan masih belum optimal dan pemenuhan akses akan layanan air minum dan sanitasi, khususnya jaringan air minum perpipaan yang capaiannya hanya sebesar 18,46 persen dibawah capaian provinsi tahun 2023 sebesar 31,49 persen.

#### **2.7.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya**

Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan peran kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Pembangunan kawasan Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 16,25 persen dengan dominasi lapangan usaha terbesar adalah pertanian dengan kontribusi sebesar 29,68 persen, industry pengolahan sebesar 21,64 persen dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,88 persen.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Parepare, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Parepare memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia demikian halnya dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan ketercapaian target pada indikator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, demikian halnya dengan ketercapaian indikator Gini Ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, kecuali di kabupaten Pinrang

Ketercapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Parepare sangat dipengaruhi oleh kinerja perwujudan ruang kawasan yaitu kota Parepare dan kabupaten Barru yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sedangkan kabupaten lainnya yaitu kabupaten Sidenreng Rappang, kabupaten Pinrang, dan kabupaten Enrekang yang hanya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur konektivitas antara lain pelabuhan pengumpan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional serta kemantapan jalan yang baik walaupun lebih rendah daripada kemantapan jalan provinsi. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang berskala regional di kota Parepare dan pemenuhan akses akan layanan air minum dan sanitasi, khususnya jaringan air minum perpipaan yang capaiannya hanya sebesar 28,03 persen dibawah capaian provinsi tahun 2023 sebesar 31,49 persen.

#### **2.7.5. Pembangunan Kawasan Palopo**

Pembangunan Kawasan Palopo diprioritaskan pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penguatan peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan Kawasan Strategis Nasional Toraja yang juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan kawasan Palopo dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan UMKM, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Peran kawasan Palopo terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 15,22 persen pertahun. Kontribusi tertinggi disumbang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 44,03 persen, kemudian lapangan usaha pertanian sebesar 22,34 persen dan pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 16,93 persen. Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Palopo, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Palopo memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia, namun sebagai kawasan yang menjadi episentrum sosial ekonomi di wilayah teluk Bone, capaian Indeks Pembangunan Manusia masih perlu dioptimalkan Ketercapaian target pada indikator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka hanya kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Tana Toraja yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal, sedangkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka hanya kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Toraja Utara yang berkinerja baik dan pada indikator Gini Ratio, hanya kabupaten Luwu dan kabupaten Toraja Utara yang berkinerja baik. Ketercapaian kinerja makro pembangunan di Kawasan Palopo sangat dipengaruhi oleh kinerja perwujudan ruang kawasan yaitu kota Palopo yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sedangkan kabupaten lainnya yaitu kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Tana Toraja, kabupaten Toraja Utara, dan kabupaten Luwu Timur yang hanya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur konektivitas antara lain pelabuhan pengumpan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional namun kemantapan jalan di kawasan Palopo sangat rendah daripada kemantapan jalan provinsi yang dikarenakan kawasan ini masih didominasi oleh wilayah yang terpencil dan aksesibilitas yang rendah. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang berskala regional di kota Palopo dan pemenuhan akses akan layanan air minum dan sanitasi, khususnya jaringan air minum perpipaan yang capaiannya sebesar 38,83 persen lebih baik daripada capaian provinsi tahun 2023 sebesar 31,49 persen.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada berbagai tantangan atau masalah yang dihadapi oleh suatu daerah dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna mewujudkan suatu hasil capaian pembangunan yang berkelanjutan. Mendasarkan pada gambaran kondisi daerah Sulawesi Selatan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat dirinci beberapa permasalahan pembangunan di Sulawesi Selatan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan sinergis dari banyak pihak.

#### **1. Pendapatan per Kapita yang masih rendah dan tidak merata.**

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan relatif masih rendah jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi di regional pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah yang sudah melebihi ratusan juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya PDRB per kapita ini menggambarkan masih rendahnya produktifitas ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya akses akan sumberdaya ekonomi, rendahnya penerapan iptekin dalam kegiatan produksi, dan rendahnya nilai tambah ekonomi dari lapangan usaha yang dikelola dalam kegiatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.

Pendapatan yang belum merata atau ketimpangan pendapatan Sulawesi Selatan ditandai dengan angka gini ratio Sulawesi Selatan masih pada posisi tertinggi ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Tingginya angka gini ratio mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi daripada kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cukup berdampak positif terhadap menurunnya angka pengangguran terbuka, namun demikian laju penurunan angka gini ratio masih relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga kerja belum mendapatkan upah kerja yang cukup untuk mengisi celah perbedaan pendapatan antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana di satu sisi harus tetap menjaga momentum pertumbuhan terutama untuk menyediakan lapangan kerja baru, namun di sisi lain juga harus mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial, termasuk kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah harus di desain sedemikian rupa agar kemajuan ekonomi bisa memberi manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar dapat menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang selama ini telah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi meningkat tetap berjalan. Upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi ketimpangan harus menjadi agenda penting dalam pembangunan.

#### **2. Daya Saing Daerah belum optimal**

Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 telah melampaui nasional, namun bila dibandingkan dengan

sejumlah provinsi di Pulau Jawa, IDSD Sulawesi Selatan masih lebih rendah. Belum optimalnya daya saing daerah ini dikontribusi oleh rendahnya pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi, atau dengan kata lain diperlukan penciptaan lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran.

### **3. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan**

Tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan diindikasikan oleh posisi Sulawesi Selatan masih di urutan ke 17 tertinggi dari 35 provinsi, dimana jumlah penduduk miskin perdesaan masih mendominasi atau dua kali lipat lebih banyak dibanding perkotaan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan adalah kurang efektifnya penanganan kemiskinan sebagai dampak beragamnya data kemiskinan dari berbagai sumber otoritas yang mempunyai parameter dan metodologi pengukuran kemiskinan berbeda satu sama lain, rendahnya laju penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan, belum optimalnya intervensi penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berdasarkan strategi penanganan kemiskinan, belum optimalnya penanganan kemiskinan di perdesaan, dan belum optimalnya aksesibilitas layanan sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi kondisi geografis. Penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan dengan basis data yang tepat dan terupdate harus menjadi komitmen nyata oleh seluruh pemangku tanggungjawab, baik pemerintah maupun non pemerintah.

### **4. Belum Meratanya Layanan Kesehatan yang Berkualitas**

Kualitas kesehatan penduduk yang masih rendah diindikasikan oleh rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Selatan dibanding nasional, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Selatan belum mencapai target SDGs, prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, dan meningkatnya kasus tuberkulosis dari tahun ke tahun.

Pelayanan kesehatan berkualitas yang menjangkau untuk semua perlu lebih mengoptimalkan upaya promotif dan preventif termasuk membangun kesadaran umum di masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat berbasis individu dan komunitas. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan termasuk sumber daya manusia penyedia layanan kesehatan yang terlatih harus lebih ditingkatkan, termasuk untuk pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan, serta kemudahan dan perluasan jangkauan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk seluruh penduduk patur menjadi perhatian penting agar dapat mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah dan kawasan di Sulawesi Selatan.

### **5. Kualitas Pendidikan yang Relatif Rendah dan Belum Merata.**

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan lanjutan yang berkualitas masih menjadi permasalahan mendasar. Hingga tahun 2023 belum ada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi, karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih dibawah capaian standar kompetensi atau dibawah 40 persen. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang rendah juga ditandai dengan capaian satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca baru mencapai 31,61 persen dan

numerasi baru mencapai 25,3 persen. Selain itu capaian RLS tahun 2023 masih di bawah nasional.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun ke atas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi; besarnya kasus drop out (DO) anak usia 7-18 dari jenjang kelas 1 hingga 12; belum meratanya kualitas sarana prasarana termasuk teknologi pembelajaran antara daratan dan kepulauan serta antara perkotaan dan perdesaan; dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas yang memenuhi standar kompetensi antara perdesaan dan perkotaan maupun daratan dan kepulauan yang belum merata. Dalam konteks inilah penting untuk memprioritaskan agenda pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Wajib belajar 13 tahun yang disertai dengan pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas anak didik di seluruh jenjang pendidikan dapat mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi dan dapat meningkatkan kualitas modal dasar manusia Sulawesi Selatan.

#### **6. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau**

Pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, memerlukan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Ekonomi biru dan hijau memuat konteks keberlanjutan dan inklusif yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi, namun penerapannya dalam pembangunan di Sulawesi Selatan dipandang belum optimal. Hal ini diindikasikan dari capaian pilar lingkungan dan ekonomi dari Indeks Ekonomi Biru yang relatif rendah jika dibandingkan beberapa provinsi Indonesia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam penerapan ekonomi biru ke depan adalah masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perairan, hilirisasi sumberdaya perairan, menurunnya kualitas ekosistem perairan, tingginya eksploitasi sumberdaya perairan, dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya perairan.

Demikian pula halnya dengan penerapan ekonomi hijau yang belum optimal ditandai dengan progresnya yang masih lebih rendah dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Indikasi lainnya bahwa pada pilar lingkungan memiliki skor komposit terendah. Indikator capaian kualitas air memiliki capaian yang masih rendah diantara pilar yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masih tingginya alih fungsi lahan dan hutan yang berkontribusi terhadap rendahnya persentase luas tutupan lahan hutan, alokasi tata ruang untuk budidaya belum sepenuhnya diseimbangkan dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis, serta kapasitas pendanaan yang bersumber dari pendanaan alternatif berbasis lingkungan masih rendah. Olehnya itu perlu mengintegrasikan kebijakan ekonomi hijau pada semua sektor untuk mengoptimalkan seluruh pilar pendukungnya. Pada pilar ekonomi perlu lebih dititikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim sebagai penggerak ekonomi yang 'hijau', serta hilirisasi komoditas unggulan harus berkelanjutan dan memperhatikan pengaruh dampak perubahan iklim. Pilar ekonomi yang dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pilar lingkungan, serta memberi manfaat optimal dan mampu menguatkan pilar sosial.

## **7. Rendahnya Produktifitas Ekonomi Daerah serta Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.**

Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak baik di darat maupun di laut, namun produktifitas perekonomian Sulawesi Selatan masih relative rendah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi yang melambat diakibatkan adanya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi, juga mengalami perlambatan. Selain itu, sektor industri pengolahan yang potensial untuk dikembangkan dalam perekonomian Sulawesi Selatan, cenderung mengalami stagnasi, yang disebabkan oleh kurangnya diversifikasi industri, kurang berkembangnya hilirisasi industri, dan lambatnya pertumbuhan industri kreatif, serta kurangnya fasilitas sarana pengolahan dan sarana pengembangan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi industry.

Produktifitas perekonomian daerah yang masih rendah juga ditandai oleh beberapa hal yaitu ketidakselarasan antara keahlian dan keterampilan dan pendidikan pencari kerja dengan kebutuhan industri sehingga banyak pekerjaan yang diisi adalah low paying/low skilled jobs, capaian rasio kewirausahaan yang masih dibawah nasional dan relative masih rendah, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif belum menjadi prioritas, rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi promosi dan distribusi hasil, belum optimalnya nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism), serta belum optimalnya pengelolaan asset BUMD untuk menghasilkan laba bersih yang ditandai dengan menurunnya Return of Aset (RoA) BUMD di Sulawesi Selatan.

Perekonomian daerah Sulawesi Selatan perlu memperhatikan penguatan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang belum menetapkan Sulawesi Selatan khususnya Pelabuhan Makassar sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor-impor Indonesia, khususnya produk-produk unggulan ekspor dari KTI, perlu disikapi dengan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif industri pengolahan yang berorientasi ekspor di Sulawesi Selatan. *Backward and forward linkage* kegiatan industri pengolahan yang berorientasi ekspor perlu ditingkatkan, sehingga integrasi ekonomi domestic dan global di Sulawesi Selatan akan semakin membaik, baik pada pasar *output* dan apalagi pada pasar *input* internasional.

## **8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital**

Tantangan dan peluang dalam era digital menuntut seluruh provinsi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. Secara nasional Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sulawesi Selatan menempati posisi 19 terendah dari 34 provinsi. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian dalam pemanfaatan teknologi di Sulawesi Selatan.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi di Sulawesi Selatan juga diindikasikan oleh daya saing digital daerah. Hal ini ditandai dengan menurunnya urutan indeks daya saing digital Provinsi Sulawesi Selatan dari urutan ke 10 pada tahun 2022 menjadi urutan ke 12 pada tahun 2023. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah secara merata, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam

pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital, perlu menjadi perhatian dalam pembangunan teknologi di Sulawesi Selatan.

### **9. Kesenjangan Ekonomi Perkotaan Dan Perdesaan**

Dalam perspektif pengembangan wilayah, ekonomi perkotaan dan perdesaan terintegrasi secara fungsional dalam kaitan lapangan usaha primer, sekunder dan tersier (jasa-jasa). Berkembangnya sektor industri dan jasa di perkotaan sejatinya akan mampu menarik pertumbuhan sektor perdesaan dalam penyediaan bahan baku dan dukungan input produksi lainnya. Begitupun sebaliknya, berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan akan mendorong pengembangan industri pengolahan dan jasa layanan di perkotaan. Keterkaitan fungsional ekonomi perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan kurang berjalan efektif, yang antara lain ditandai dengan kontribusi PDRB wilayah perkotaan terkhusus Kota Makassar terhadap Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 34,67 persen di Sulawesi Selatan, dimana perubahan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Indikasi lainnya adalah perkembangan persentase desa mandiri yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat baru mencapai 20,78 persen dari 2.266 desa di Sulawesi Selatan.

Kesenjangan ekonomi perkotaan dan perdesaan perlu direduksi dengan mengupayakan berkembangnya kegiatan ekonomi agribisnis, agroindustri, agrowisata dan keseluruhan dukungan pengembangan agropolitan agar menjadi fokus perhatian dan prioritas pembangunan ekonomi daerah pada sebagian besar kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Perlu diperhatikan bahwa sumber utama pendapatan masyarakat belum bertumpu pada sumber kegiatan agribisnis, agroindustri, agrowisata sehingga belum tumbuh pengembangan ekosistem agropolitan yang mampu mengurangi gap kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kawasan perdesaan belum mampu menjadi *hinterland* bagi tumbuh dan berkembangnya *core activity* pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan, yang salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih lebar.

### **10. Tatakelola Pemerintahan Belum Adaptif**

Tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif belum berjalan optimal, diindikasikan dengan masih rendahnya capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sulawesi Selatan masih berada di peringkat 19 terendah, dan skor Sulawesi Selatan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai Jawa Timur. Dalam lingkup Sulawesi, SPBE Sulawesi Selatan hanya berada diatas Sulawesi Barat. Indikasi lainnya adalah indeks pelayanan publik belum mencapai kategori pelayanan prima, indeks inovasi daerah yang masih berada di posisi ke 16, dan indeks integritas nasional Sulawesi Selatan masih berada di bawah nasional dan hanya tumbuh sebesar 0,15 poin selama 3 tahun terakhir .

Perlu optimalisasi pelaksanaan kebijakan SPBE dalam hal kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE, kebijakan manajemen data, kebijakan internal layanan pusat data, dan kematangan kebijakan internal pengguna sistem penghubung layanan. Selain itu, perlu pula dioptimalkan penerapan manajemen dan audit SPBE, seperti dalam hal kematangan penerapan manajemen risiko, kematangan penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, kompetensi sumberdaya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan kematangan penerapan

manajemen layanan SPBE. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, serta pelayanan publik terhadap risiko korupsi, perlu menjadi perhatian ke depan.

### **11. Kerawanan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Demokrasi yang Belum Optimal**

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum berjalan dengan baik, diindikasikan oleh jumlah kasus kejahatan yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama 6 tahun terakhir, dan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal baru mencapai 64,60 persen. Dua indikasi ini belum cukup menggambarkan kondisi yang keamanan dan ketertiban yang ideal dan dapat mempengaruhi daya saing investasi. Indeks demokrasi tahun 2023 berada pada tingkat demokrasi kategori “Sedang” dan dibawah capaian nasional menjadi indikasi belum optimalnya demokrasi di Sulawesi Selatan.

Ketidaksetaraan akses perlindungan dan hak hukum di masyarakat terutamanya di daerah-daerah terpencil, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas, penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tuntas, dan pelanggaran ketertiban umum yang masih cukup tinggi pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, patut menjadi perhatian. Selain itu kurangnya pendidikan politik atau kesadaran akan hak-hak demokratis mempengaruhi penurunan indeks demokrasi di Sulawesi Selatan. Literasi politik Sulawesi Selatan masih rendah karena masyarakat sebagai warga negara belum memahami secara mendalam sistem politik dan proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada masih sangat jauh dari partisipasi politik yang benar. Didalam era teknologi digital dan media sosial yang mendominasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada informasi yang melimpah namun tidak selalu berkualitas. Hal ini menimbulkan masalah yang perlu diatasi secara serius. Kondisi ini perlu dikapi dengan penerapan kurikulum pendidikan literasi media dan politik, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik dalam hal ini perlu ditingkatkan, kampanye publik lebih dioptimalkan dengan menysasar semua lapisan masyarakat, serta pengawasan terhadap konten media sosial dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang akurat.

### **12. Ketidak-stabilan Ekonomi Makro dan Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah**

Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, salah satunya ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidak-stabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam penyelenggaraan pembangunan. Kapasitas fiskal yang rendah akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan kondisi makro ekonomi daerah. Ketergantungan fiskal daerah yang tinggi dan kurangnya keleluasaan fiskal daerah berdampak kurang efektifnya pemerintah dalam mengatasi ketidak-stabilan makro ekonomi daerah akibat guncangan eksternal. Gambaran kondisi fiskal daerah Sulawesi Selatan, antara lain ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran

rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai jauh melebihi porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan asset terhadap total belanja daerah.

Selain itu, dalam hal perkembangan harga-harga umum, Sulawesi Selatan masih mencatat tingkat inflasi yang lebih tinggi dari nasional, mengindikasikan ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal masih cukup tinggi pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dalam konteks ini perlu disikapi dengan meminimalisir dampak timbulnya *high cost economy* mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi. Perlu pula disikapi dengan tepat melalui kebijakan dan tatakelola yang mempengaruhi kenaikan biaya input, biaya transportasi dan logistik, karena biaya input yang meningkat akan berdampak pada penurunan produksi, serta biaya transportasi dan logistik yang tinggi akan berdampak pada berlanjutnya tekanan inflasi, sehingga dapat berdampak ketidak-stabilan makro ekonomi daerah dalam jangka panjang.

### **13. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas antar Daerah**

Kesenjangan pembangunan antara kawasan di Sulawesi Selatan, pada umumnya ditandai dengan kesenjangan infrastruktur wilayah, diantaranya kemantapan jalan yang ditunjukkan dengan kemantapan jalan nasional yang masih rendah, apalagi kemantapan jalan provinsi jalan kabupaten menunjukkan capaian yang lebih rendah lagi. Konektivitas wilayah menjadi hambatan utama sehingga sinergitas dan kerjasama wilayah tidak berjalan efektif. Gagasan poros pengembangan selatan-selatan, selatan-tengah, selatan-utara dan utara-utara belum mampu menciptakan sinergitas dan kerjasama antar daerah, baik yang bersifat substansial maupun kawasan. Saat ini kita tidak dapat menutup mata masih terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah telah menetapkan 5 (lima) kawasan pembangunan berdasarkan pendekatan kawasan andalan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan perekonomian regional, namun sampai saat ini belum memperlihatkan keberhasilan sebagaimana yang diharapkan yang ditandai dengan belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan skema kerja sama daerah baik berupa kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela, karena sampai saat ini skema kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam kerangka kerjasama regional Pulau Sulawesi dan belum mengembangkan skema kerjasama daerah kabupaten/kota dalam lingkup kawasan pembangunan yang merupakan kerjasama wajib.

### **14. Kesadaran Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju Mengalami Pasang Surut dalam Kehidupan Masyarakat.**

Kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan mengalami pasang surut. Secara faktual mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya capaian indeks toleransi dan kerja sama umat beragama. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah perlintasan khususnya di Kawasan Timur Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya paham keagamaan yang kurang moderat yang cenderung ekstrem serta tidak toleran kepada kelompok lainnya. Selain itu berkembangnya ekstremisme, klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengetahuan antar masyarakat dan wilayah juga berkontribusi terhadap penurunan toleransi dan kerja sama beragama di Sulawesi Selatan. Kurang optimalnya dialog antar

tata nilai yang berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab yang penting untuk menjadi perhatian utama.

Pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan juga belum berjalan dengan optimal, diindikasikan dengan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan yang cenderung stagnan. Tiga dimensi komposit indeks kumulatif yang capaiannya rendah dan di bawah nasional, yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya. Pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan perlu memperhatikan optimalisasi tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif; pengembangan inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya; penguatan pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; penguatan koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya; serta pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

### **15. Menurunnya Kualitas Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender**

Menurunnya kualitas ketahanan keluarga ditandai oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga; kualitas ketahanan sosial budaya keluarga masih di bawah nasional, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan relatif kecil penurunannya dari tahun ke tahun, semakin menurunnya persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya melakukan kegiatan keagamaan, dan persentase rumah tangga dengan perkawinan anak yang masih lebih tinggi dari angka nasional.

Upaya sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal perlu dioptimalkan, dan didukung dengan penyediaan lembaga layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi di kabupaten/kota, baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana dan jenis layanannya. Selain itu, peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga di provinsi dan kabupaten/kota menjadi faktor penting yang patut diperhatikan untuk mewujudkan kualitas ketahanan keluarga.

Salah satu fondasi dalam mewujudkan kualitas ketahanan keluarga adalah tercapainya kesetaraan gender. Hal ini penting, mengingat kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat untuk masyarakat, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Meskipun kesetaraan gender mengalami peningkatan di Sulawesi Selatan, namun pertumbuhannya masih lambat sehingga masih terjadi ketimpangan gender. Terdapat tiga dimensi penyebab ketimpangan ini, dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif di seluruh wilayah termasuk kepulauan, Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk miskin dan rentan lainnya, dan perbaikan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak mendukung kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir.

Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yang perlu disikapi dengan serius yaitu kesetaraan akses masyarakat di

daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas, termasuk pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya. Selain itu ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan yang berkualitas di seluruh jenjang dan wilayah, perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kesetaraan pada dimensi pemberdayaan.

Pada dimensi pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan akses terhadap lima modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

#### **16. Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Sepenuhnya Berbasis System**

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang belum optimal diindikasikan oleh capaian Indeks Perlindungan Anak Sulawesi Selatan masih dibawah angka nasional.

Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak dan belum tersystemnya penyelenggaraan perlindungan anak di Sulawesi Selatan. Dalam konteks inilah penting untuk mengefektifkan peran bimbingan dan pengawasan provinsi terhadap perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak di seluruh kabupaten/kota, meningkatkan kapasitas dan standarisasi layanan pengaduan terpadu yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah, peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam pengembangan dan pelebagaan pengasuhan dan perawatan, mengembangkan upaya pencegahan yang dapat mengurangi kerentanan anak menjadi korban perlakuan salah dan menghindarkan anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

#### **17. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan yang berkualitas belum optimal dilaksanakan diindikasikan oleh berfluktuasinya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sangat dipengaruhi menurunnya luasan tutupan hutan sekitar 0,12 persen; menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah sebesar 65,32 persen; meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Selain itu jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terus menurun dengan pesentase penurunan sebesar 54,58 persen, yang dipicu oleh lemahnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang akibat masih terdapatnya kabupaten/kota yang belum melakukan dan menetapkan revisi rencana tata ruang wilayah dan masih terbatasnya kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang.

Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan bijak, dengan tetap memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan lingkungan seperti alih fungsi lahan terutama lahan hutan

menjadi non hutan, menurunnya kualitas air dan udara, dan rusaknya ekosistem laut dan pesisir, tetap harus menjadi fokus perhatian karena akan berimplikasi pada berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), kemampuan sekuestrasi gas rumah kaca dan terjadinya bencana akibat terganggunya ekosistem dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

### **18. Tingginya risiko penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.**

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan diindikasikan oleh belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Menurunnya ketahanan energi disebabkan belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industri dan rumah tangga; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya pada daerah kepulauan.

Perlu menjadi agenda penting pembangunan kedepan untuk memastikan peningkatan ketahanan air di Sulawesi Selatan melalui pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan perluasan jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun. Selain itu perlu ditingkatkan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air. Beberapa permasalahan terkait DAS yang perlu diupayakan penanganannya secara optimal adalah sedimentasi, banjir dan kekeringan, erosi, degradasi lahan, tekanan penduduk dan kemiskinan, serta perubahan penggunaan lahan. Harapannya 108 DAS yang masuk ke dalam kategori kritis dapat diupayakan restorasinya.

Permasalahan terkait menurunnya ketahanan pangan mencakup rendahnya akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas, rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; serta rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan, perlu menjadi bagian penting agenda pembangunan daerah.

### **19. Rendahnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim**

Indeks Risiko Bencana (IRBI) Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada kategori tinggi merupakan ancaman serius yang harus menjadi fokus perhatian masyarakat dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Disamping itu, perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, ketersediaan dan pemenuhan air, dan terganggunya ekosistem laut dan pesisir. Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki panjang garis pantai sekitar 1.979 km<sup>2</sup> dengan luas perairan laut sekitar 48.000 km<sup>2</sup> akan sangat rentan terhadap banjir rob, abrasi, peningkatan tinggi permukaan laut dan gelombang pasang. Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu.

Secara faktual intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, belum efektif mencegah besarnya korban dan dampak fisik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau dan biru perlu menjadi komitmen menyeluruh bagi setiap daerah di Sulawesi Selatan.

Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiap-siagaan, evakuasi dan penanganan pasca bencana perlu menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Dibutuhkan upaya dan komitmen kuat untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

### **20. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang Berfluktuatif**

Intensitas Emisi Sulawesi Selatan mengalami tren fluktuasi kurun waktu 6 tahun terakhir masih jauh di bawah capaian nasional. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission antara lain lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/ sektor unggulan, masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan (untuk perkebunan monokultur, pertanian, pertambangan), rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan, kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

### **3.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk mencegah dampak negative yang dapat dirasakan atau mengoptimalkan kesempatan dan peluang untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

#### **1. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.**

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

## **2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan**

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkannya sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran

kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan-Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan.

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi local yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

### **3. Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional.**

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

### **4. Pemanfaatan Bonus Demografi.**

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya

saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

### **5. Ekosistem Transformasi Digital.**

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

### **6. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan.**

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

### **7. Hilirisasi.**

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu

industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai penyangga pangan IKN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastuktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

### **8. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal**

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

## **BAB IV VISI DAN MISI**

### **4.1. VISI**

Pengertian visi dalam RPJPD ini adalah kondisi Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan sebagai hasil dari pembangunan sampai dengan tahun 2045. Perumusan visi ini memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Rumusan visi Sulawesi Selatan juga memperhatikan tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW yaitu mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia. Selain itu, rumusan visi RPJPD ini mengacu pada visi RPJPN 2025-2045 yakni **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, serta menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka rumusan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 adalah sebagai berikut.

### **SULAWESI SELATAN MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN**

Mandiri adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemanfaatan potensi daerah, terutama dalam berposisi sebagai lumbung pangan nasional. Mandiri juga merupakan kondisi Sulawesi Selatan yang berdaya saing tinggi yang didukung dengan kemandirian fiskal, mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan diperhitungkan dalam konstelasi nasional maupun global.

Maju adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 dimana masyarakat hidup sejahtera dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan merata. Pada saat itu pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan sudah mendekati setara dengan pendapatan masyarakat negara maju dan tingkat pendapatan antar lapisan masyarakat relatif merata. Kondisi maju tersebut juga ditandai oleh manusia Sulawesi Selatan yang religius dan unggul, memiliki derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin), yang memungkinkannya mempunyai kualitas tinggi sebagai modal manusia.

Berkelanjutan adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta ketersediaan sumberdaya alam yang menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Keberlanjutan ini dilandasi oleh semakin menguatnya komitmen dan implementasi dalam penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Bentang lahan (*landscape*) Sulawesi Selatan terkelola melalui pertanian berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, infrastruktur transportasi hijau, pengelolaan limbah terpadu, pendidikan lingkungan, dan inovasi teknologi hijau, yang secara signifikan dapat menciptakan lapangan kerja baru, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Bentang laut (*seascape*), pesisir, dan perairan darat Sulawesi Selatan dikelola keberlanjutannya untuk menguatkan perikanan tangkap dan budidaya, manufaktur berbasis maritim, pariwisata berbasis maritim, ketenagakerjaan berkompentensi maritim, kesehatan masyarakat pesisir

dan . . .

dan pulau-pulau, riset dan pendidikan maritim; peningkatan kualitas sumberdaya dan konservasi laut serta *blue energy*.

Berkelanjutan juga merupakan kondisi Sulawesi Selatan yang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan global dan nasional, keberlanjutan pembangunan yang terjaga, penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta ketaatan kepada hukum yang berkeadilan, yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara substantif dan berkesetaraan gender, beragama secara maslahat, berkebudayaan maju, dan memelihara kearifan lokal.

Keselarasannya visi RPJPD Sulawesi Selatan dengan visi RPJPN tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel VI.1.**  
**Penyelerasan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045**

No	Visi RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045	Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2045
(1)	(2)	(3)
1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan

#### 4.2. SASARAN VISI

Indikator pencapaian dari visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari lima sasaran utama beserta targetnya sebagaimana termuat dalam Tabel IV.2 berikut.

**Tabel VI.2.**  
**Sasaran Utama dan Indikator Visi RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

No.	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB/kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16 – 497,92
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95 – 13,05	18,62 – 19,92
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	0,19 – 0,69
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371 – 0,376	0,309 – 0,332
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,23
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69
5.	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,60	84,75

Pencapaian target sasaran visi dalam setiap tahap pembangunan jangka menengah, tercantum pada Tabel IV.3.

**Tabel VI.3.**  
**Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Sulawesi Selatan**  
**Per Tahapan Lima Tahun**

No.	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	2029	2034	2039	2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	164,78	250,57	336,37	422,16-497,92
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	122,3	173,3	224,29	275,29
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	13,30-14,76	14,73-16,48	16,13-18,20	18,62-19,92
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	5,60-6,1	3,90-4,3	2,20-2,5	0,19-0,69
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,340-0,355	0,324-0,340	0,310-0,324	0,309- 0,332
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,21-3,22	3,22	3,23	3,23
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,2	6,7	6,8	6,90-8,94
3.	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	60-63	65-67	70-73	75-80
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	3,49	3,52	3,56	4
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks modal manusia	0,52	0,56	0,61	0,65	0,69
5.	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37	52,05	70,05	81,21	89,74
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	79,38	81,16	82,94	84,75

Pencapaian sasaran visi Sulawesi Selatan mendukung pencapaian sasaran visi Nasional, dan keselarasan sasaran visi RPJPD Sulawesi Selatan dengan sasaran visi RPJPN termuat pada berikut.

**Tabel IV.4.**  
**Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045**

No	RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62-19,92
2.	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69
		4. Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332
		5. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,23
						7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	6. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80
						9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	7. Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	8. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74
						12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75

### 4.3. MISI

Misi dalam RPJPD ini dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Upaya umum tersebut bersifat menggerakkan perubahan secara transformatif, bukan sekedar evolusi ataupun reformasi. Transformasi menjadi keniscayaan agar Sulawesi Selatan berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk berposisi sebagai lima besar kekuatan ekonomi di dunia pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Rumusan misi RPJPD Sulawesi Selatan terdiri atas upaya umum terkait substansi transformasi, upaya umum terkait landasan transformasi, dan upaya umum terkait kerangka implementasi transformasi. Rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan . . .

### **1. Mewujudkan transformasi sosial**

Transformasi sosial ditujukan untuk melahirkan manusia Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan, yang unggul. Manusia unggul diperlukan agar daerah ini memiliki modal manusia dengan kualitas yang tinggi, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan, dibalik terkondisikannya bonus demografi. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, pendidikan yang berkualitas dan merata, penguasaan iptekin terkini dan termaju, serta perlindungan sosial adaptif untuk standar hidup yang layak.

### **2. Mewujudkan transformasi ekonomi**

Transformasi ekonomi ditujukan untuk menggiatkan beragam aktivitas perekonomian yang memiliki nilai tambah tinggi melalui penerapan iptekin dan kewirausahaan yang kuat sehingga produktivitas daerah dapat diperbesar. Penerapan iptekin dan kewirausahaan tersebut diorientasikan untuk penciptaan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif, termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian penting transformasi ekonomi Sulawesi Selatan akan mendorong ekosistem yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### **3. Mewujudkan transformasi tata kelola**

Transformasi tatakelola ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk itu akan didorong penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, inklusifitas dan kepatuhan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat. Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam penguatan pemerintahan berbasis elektronik, penataan regulasi, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan masyarakat sipil.

### **4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro**

Misi ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, perwujudan demokrasi yang substansial dalam kehidupan sosial politik, dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro daerah. Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial dan ekonomi makro daerah yang stabil, akan menjadi pendorong dan memudahkan perwujudan substansi transformasi.

### **5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi**

Misi ini juga merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi pertama. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan keluarga dan kualitas masyarakat yang religius dan berbudaya sebagai basis utama ketahanan sosial. Termasuk juga dalam misi ini adalah upaya memelihara ketahanan ekologi secara timbal-balik dengan ketahanan sosial budaya, terutama dalam kapasitas ketahanan energi, air, dan pangan. Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan hal penting dalam konteks keberlanjutan dan keberhasilan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan sumber daya vital untuk kehidupan manusia.

## **6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**

Misi ini merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi yang didorong. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan, guna menekan kesenjangan antara daerah wilayah utara dan selatan serta antara daerah pantai barat dan timur. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam mendorong kemajuan daerah berdasarkan karakteristik dan potensinya. Kemajuan daerah diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki. Dengan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan maka transformasi yang didorong lebih mudah terimplementasikan.

## **7. Mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

Misi ini juga merupakan bagian dari kerangka implementasi dari tiga transformasi. Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar dan sarana prasarana wilayah. Selain itu, misi ini memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga bisa lebih mendukung dalam berlangsungnya transformasi Sulawesi Selatan. Pembangunan infrastruktur yang memadai dibutuhkan untuk memastikan konektivitas dan aksesibilitas yang baik antara kabupaten-kota dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat memudahkan mobilisasi dan transportasi barang dan jasa yang menunjang kehidupan masyarakat serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan wilayah. Pada misi ini mencakup pula peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, serta peningkatan komitmen pembangunan rendah karbon. Ketahanan kehidupan masyarakat tidak dapat terwujud apabila lingkungan hidup terdegradasi, untuk itu dibutuhkan kombinasi intervensi ekologi serta sosial budaya melalui restorasi ekosistem, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan.

## **8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan**

Misi ini merupakan kerangka implementasi yang terakhir, bahwa transformasi Sulawesi Selatan terkerangkakan dalam suatu kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui upaya pengembangan potensi unggulan dan peningkatan ketahanan daerah, sehingga tidak hanya mampu mengoptimalkan pembangunan tetapi juga siap menghadapi berbagai tantangan. Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam mendorong kerjasama daerah, inovasi daerah, penguatan kapasitas fiskal, dan perencanaan pembangunan yang berkualitas demi terjaganya kesinambungan transformasi.

Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keselarasan dengan misi RPJP Nasional sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel IV.5.**  
**Keselarasan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2025-2045**

No	RPJPN Tahun 2025 - 2045		RPJPD Provinsi Tahun 2025 - 2045
	Agenda	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transformasi Indonesia	1. Transformasi sosial	1. Mewujudkan transformasi sosial
2.		2. Transformasi ekonomi	2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3.		3. Transformasi Tata Kelola	3. Mewujudkan tranformasi tata kelola
4.	Landasan Transformasi	4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
5.		5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7.		7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas	7. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.		8. Kestinambungan Pembangunan	8. Mendorong daya saing daerah untuk kestinambungan pembangunan

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

#### **5.1. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam kerangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang sinergis, telah ditetapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berdaya saing dengan derajat kesehatan yang tinggi dan merata, pendidikan berkualitas yang merata, serta standar hidup yang layak untuk semua. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pengembangan kawasan pembangunan berdasarkan potensi wilayah, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi dengan implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Sulawesi Selatan secara regional, nasional, dan internasional.

Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan berkembangnya demokrasi substansial di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas sosial dan budaya, dan menjaga kualitas ekologi secara menyeluruh.

Transformasi Sulawesi Selatan memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana berkualitas yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Transformasi Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2045 dibagi dalam empat tahapan yang disajikan pada gambar berikut.

#### **Tahapan Transformasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**



Penjabaran . . .

Penjabaran kerangka kerja transformasi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 melalui arah kebijakan lima tahunan dimaksudkan untuk memberikan arahan prioritas pembangunan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

### **5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029**

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Selatan diarahkan pada kebijakan “Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

**Transformasi sosial** pada tahap ini diarahkan pada konsolidasi peningkatan layanan kesehatan secara merata dan terjangkau untuk semua termasuk regionalisasi layanan kesehatan, pendidikan berkualitas termasuk pendidikan tinggi yang berorientasi pada demand-supply side, dan perlindungan sosial yang komprehensif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat guna terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan sejahtera.

**Transformasi ekonomi** diarahkan konsolidasi penguatan fondasi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan penguatan ekosistem industrialisasi, serta penguatan pengembangan sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

**Transformasi tata kelola** diarahkan pada pengembangan kelembagaan inovatif dan tepat fungsi, kualitas SDM ASN yang unggul, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah** diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahap ini diperkuat lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya berbasis nilai religius dan budaya, partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan ekologi; dan ketahanan pangan dengan pendekatan terpadu *FEW nexus* (*food, energy, water*).

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** diarahkan pada pemerataan pembangunan antar wilayah, baik antara wilayah barat dan timur, perkotaan dan perdesaan, maupun antara daratan dan pulau. Pada tahap ini diperkuat upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar daerah di Sulawesi, penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut, pengembangan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung konektivitas laut backbone logistic, melanjutkan pengembangan wilayah perkotaan Mamminasata dan kota sedang Palopo dan Parepare, penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, serta penguatan dukungan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global.

Pada tahap ini juga diarahkan pada peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

**Pembiayaan pembangunan**, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah yang adaptif dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

### **5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034**

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Selatan diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan akselerasi transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata dengan pemenuhan sarana prasarana semakin merata dan berkualitas, serta penguatan pembiayaan pembangunan yang semakin mambaik.

**Transformasi sosial** pada tahap ini diarahkan pada akselerasi peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk semua termasuk regionalisasi layanan kesehatan, akselerasi partisipasi pendidikan disertai peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas lulusan, dan perlindungan sosial yang lebih inklusif guna percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**Transformasi ekonomi** diarahkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produktivitas daerah, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penguatan struktur industri, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah dan tinggi.

**Transformasi tata kelola** diarahkan pada akselerasi peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, semakin membaiknya pelayanan publik dan semakin menguatnya transparansi pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten dan masyarakat sipil yang partisipatif.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah** diarahkan pada pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat; kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan.

Pada tahap ini juga diarahkan pada akselerasi penguatan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, serta percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah, dan pengembangan lingkup dan jenis kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada memperkokoh kemampuan keluarga dan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya berlandaskan nilai-nilai religius, budaya, dan lingkungan; serta memperluas jangkauan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan menguatkan upaya keberlanjutan lingkungan.

Pada tahap ini diperkuat pemantapan nilai religius dan budaya agar keluarga mampu berperan optimal dalam membentuk karakter manusia untuk menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan; dan mempercepat peningkatan ketahanan energi, air, dan pangan dengan pendekatan terpadu *FEW nexus (food, energy, water)*.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** diarahkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata dan kota sedang Palopo dan Parepare dengan tata kelola kelembagaan yang lebih terintegrasi, serta memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian, percepatan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan pelabuhan Makassar sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia.

Pada tahap ini juga diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi (kepulauan dan daerah sulit) untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing yang merata antar kawasan perkotaan dan perdesaan, serta mengakselerasi pencapaian pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim.

**Pembiayaan pembangunan**, diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan non pemerintah, serta semakin adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan.

### **5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039**

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Selatan diarahkan pada kebijakan “Perluasan Transformasi”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan memperluas upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perluasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang jauh lebih merata dan berkelanjutan dengan pemenuhan sarana prasarana berkualitas di sebagian besar wilayah yang lebih merata, serta penguatan pembiayaan pembangunan yang semakin mengokohkan kemandirian fiskal daerah.

**Transformasi sosial** pada tahap ini diarahkan pada perluasan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua termasuk regionalisasi layanan kesehatan, perluasan partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia sehingga lebih mandiri, inovatif, produktif, dan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan.

**Transformasi ekonomi** diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri, dan memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dan barometer Kawasan Timur Indonesia.

**Transformasi tata kelola** diarahkan pada perluasan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik termasuk pengelolaan barang/jasa yang professional, perwujudan kelembagaan yang adaptif, SDM ASN kompetitif, dan masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel.

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah** diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahap ini dilakukan upaya pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik global; paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik; serta perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala nasional dan global.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas.

Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; menguatkan pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi.

***Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan*** diarahkan pada peningkatan konektivitas berkualitas terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah, serta perluasan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global.

Pada tahap ini juga diarahkan pada pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) secara merata di seluruh wilayah, serta menguatkan implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.

***Pembiayaan pembangunan***, diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan non pemerintah, serta semakin adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan.

#### **5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045**

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Selatan diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Sulawesi Selatan yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan”. Tahap keempat ini dilakukan dengan optimalisasi upaya transformasi yang berkesinambungan dan lebih konsisten dalam rangka perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang telah merata dengan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas, serta pembiayaan pembangunan yang ditopang dengan kemandirian fiskal.

***Transformasi sosial*** pada tahap ini diarahkan pada perwujudan manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang tinggi, melalui pemenuhan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, pelayanan kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif.

***Transformasi ekonomi*** diarahkan pada perwujudan Sulawesi Selatan sebagai provinsi berpendapatan tinggi dan menempati posisi lima besar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional, ditopang oleh sektor ekonomi hijau dan biru unggulan yang tangguh iklim. Pada periode ini pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan relatif stabil, dan ketimpangan pendapatan semakin merata. Pada tahap ini diarahkan pula pada perwujudan Sulawesi Selatan yang memiliki produktivitas daerah yang tinggi dan berdaya saing secara Nasional.

***Transformasi tata kelola*** diarahkan pada perwujudan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, inovatif, adaptif, inklusif, profesional dan akuntabel, serta masyarakat sipil yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.

***Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah*** diarahkan pada perwujudan Sulawesi Selatan yang aman, tertib, damai, dan memiliki daya saing daerah yang tinggi. Pada tahap ini terwujud Sulawesi Selatan yang bebas korupsi dan terselamatkannya asset dan keuangan daerah; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia. Serta terwujud demokrasi substansial yang

mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada Perwujudan keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang religius, beradab, tangguh dan adaptif; dan Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan air, energi dan pangan yang tangguh dengan pendekatan terpadu *FEW nexus (food, energy, water)*, serta terjaganya pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Pada tahap ini terwujud ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang religius dan berkarakter dalam menghadapi berbagai perubahan; memastikan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial, dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Sulawesi Selatan menjadi provinsi terdepan dalam penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh pembangunan, penerapan teknologi tinggi untuk menghasilkan produk pangan dan olahan yang di terima pasar global serta pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber pangan dan farmakologi. Terwujud pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

**Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** diarahkan pada perwujudan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan infrastruktur konektivitas yang tangguh iklim; serta perwujudan Sulsel sebagai hub ekonomi biru melalui pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global.

Pada tahap ini diarahkan pula pada perwujudan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, serta terwujudnya lingkungan yang berkualitas mendukung pencapaian net zero emission, dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

**Pembiayaan pembangunan**, diarahkan pada perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dan adaptif terhadap guncangan perekonomian, dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal.

Arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan diatas, diformulasi dalam setiap misi yang secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

**Tabel V. 1.**  
**Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
<b>Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan</b>	1. Mewujudkan transformasi sosial	Konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial guna terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemenuhan pelayanan kesehatan dilakukan secara merata dan terjangkau, pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Pemenuhan	Akselerasi transformasi sosial diarahkan pada peningkatan kualitas manusia yang sehat, produktif, dan inovatif, melalui akselerasi pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemenuhan pelayanan kesehatan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas layanan, baik sarana prasarana, maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. Begitu pula pemenuhan pelayanan pendidikan lebih ditekankan pada percepatan wajib belajar	Perluasan/ekspansi transformasi sosial diarahkan pada penguatan daya saing sumberdaya manusia sehingga lebih mandiri, inovatif, produktif, dan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan.  Pemenuhan pelayanan kesehatan lebih ditekankan pada perluasan kualitas layanan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, mencakup sarana prasarana, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.	Perwujudan manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang tinggi.  Pada tahap ini telah tercapai Wajar 13 tahun, sebagian besar sekolah telah memenuhi standar kompetensi minimum literasi dan numerasi, pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, stunting dan kematian ibu sangat rendah, seluruh wilayah memperoleh pelayanan
					pelayanan . . .

		<p>pelayanan pendidikan dilakukan melalui perluasan akses dan pemerataan layanan; pendidikan guna mencapai wajib belajar 13 tahun (termasuk PAUD) dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dilakukan secara komprehensif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu</p>	<p>13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas lulusan, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan. Sedangkan pemenuhan pelayanan perlindungan sosial lebih ditekankan pada inklusifitas dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun</p>	<p>Begitu pula pemenuhan pelayanan pendidikan lebih ditekankan pada kualitas modal dasar manusia, dengan perluasan pendidikan berkualitas pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah di seluruh wilayah, kualitas lulusan sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Sedangkan pemenuhan pelayanan perlindungan sosial lebih ditekankan pada perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.</p>	<p>kesehatan yang berkualitas, dan kemiskinan pada kisaran dibawah 1 persen.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

			bagi lansia miskin dan tidak mampu		
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Konsolidasi penguatan fondasi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan penguatan ekosistem industrialisasi, serta berorientasi ekspor.	Akselerasi transformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produktivitas daerah, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penguatan struktur industri, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah dan tinggi, serta berorientasi ekspor.	Perluasan/ekspansi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri, dan memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dan barometer Kawasan Timur Indonesia, serta perluasan posisi Sulawesi Selatan pada pasar dunia.	Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai provinsi berpendapatan tinggi dan menempati posisi lima besar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional, ditopang oleh sektor ekonomi hijau dan biru unggulan yang tangguh iklim.  Pada tahap ini telah terwujud industri berbasis SDA unggulan yang maju di Sulawesi Selatan, dengan dukungan Iptekin yang handal, dan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang memberi manfaat sosial dan lingkungan yang jauh lebih tinggi.	

	<p>3. Mewujudkan Transformasi Tata kelola</p>	<p><b>Konsolidasi</b> penguatan fondasi transformasi tata kelola melalui pengembangan kelembagaan inovatif dan tepat fungsi, kualitas SDM ASN yang unggul, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan kawasan bebas korupsi, penataan pengelolaan asset yang akuntabel, peningkatan transparansi dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil.</p>	<p><b>Akselerasi</b> transformasi tata kelola melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, semakin membaiknya pelayanan publik yang prima, semakin meluasnya kawasan bebas korupsi, menguatnya pengelolaan asset yang akuntabel, dan semakin menguatnya transparansi pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten dan masyarakat sipil yang partisipatif.</p>	<p><b>Perluasan/ekspansi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, termasuk pengelolaan barang/jasa yang professional dan berintegritas, perwujudan kelembagaan yang adaptif, perwujudan kelembagaan yang adaptif, SDM ASN kompetitif, dan masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel.</b></p> <p>Pada tahap ini dilakukan upaya pemantapan kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset; perbaikan tata kelola melalui pendekatan</p>	<p><b>Perwujudan</b> Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, inovatif, adaptif, inklusif, profesional dan akuntabel, serta masyarakat sipil yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.</p> <p>Pada tahap ini telah terwujud pemerintahan yang bersih dan melayani secara professional, pelayanan publik dikelola secara profesional dan handal dalam pelayanan prima, dan seluruh instansi pemerintah telah menjadi kawasan bebas korupsi.</p>
--	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Corruption Impact Assessment	
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	<p>Penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembankan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas Pembangunan.</p> <p>Pada tahap ini pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan</p>	<p>Pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat; kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan.</p> <p>Pada tahap ini kapasitas kelembagaan ketertiban</p>	<p>Perwujudan Sulawesi Selatan yang aman dan tertib, bebas korupsi, serta kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.</p> <p>Pada tahap ini ketertiban dan keamanan mampu menjadi daya tarik investasi yang lebih optimal; kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan</p>	<p>Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang aman, tertib, damai, dan tangguh.</p> <p>Pada tahap ini ketertiban dan keamanan mampu menjadi daya tarik global; paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, dan politik; serta ekonomi makro daerah yang terjaga stabil</p>	

		transformasi tata kelola ketentraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital, dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai lebih ditingkatkan. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan	dan ketentraman masyarakat semakin menguat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, adaptifnya ekonomi makro dan pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan	dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; serta pengelolaan fiskal yang semakin handal dan resilien terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan	
5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan	Memperkokoh kemampuan keluarga dan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani	Menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global,	Perwujudan keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang religius, beradab, tangguh dan adaptif; dan Sulawesi	

		<p>iklim, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</p> <p>Pada tahap ini diperkuat lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya berbasis nilai religius dan budaya, partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan ekologi; dan ketahanan pangan.</p> <p>Pada tahap ini dilakukan konsolidasi untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan, dan</p>	<p>kehidupannya berlandaskan nilai-nilai religius, budaya, dan lingkungan; serta memperluas jangkauan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan menguatkan upaya keberlanjutan lingkungan.</p> <p>Pada tahap ini diperkuat pemantapan nilai religius dan budaya agar keluarga mampu berperan optimal dalam membentuk karakter manusia untuk menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan; meningkatnya keselarasan daya dukung, daya tampung</p>	<p>dan terjaganya ketersediaan air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas.</p> <p>Pada tahap ini manusia, keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan semakin religius, tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; menguatkan pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang dikelola dengan baik serta pemantapan</p>	<p>Selatan sebagai daerah dengan ketahanan air, energi, dan pangan yang tangguh, serta terjaganya pengelolaan DAS, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.</p> <p>Pada tahap ini sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah telah terkelola optimal, serta kebutuhan produksi pangan, akses energi dan air, serta keamanan iklim terkelola dan terjaga secara seimbang dan optimal</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>konsolidasi pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water)</p>	<p>lingkungan hidup termasuk meningkatkan pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil, pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan serta instrumen kebijakan pengelolaan ekologi dan SDA. Energi terbarukan, dan pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water) semakin dikuatkan pengembangannya pada tahap ini.</p>	<p>sistem ketahanan pangan, air, dan energi terbarukan melalui pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water).</p>	
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	<p>Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah, baik antara wilayah barat dan timur, perkotaan dan perdesaan, maupun antara daratan dan pulau. Optimalisasi</p>	<p>Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan</p>	<p>Peningkatan konektivitas berkualitas terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pengembangan energi</p>	<p>Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan</p>	

		<p>pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar daerah di Sulawesi, penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut, pengembangan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung konektivitas laut backbone logistik. Melanjutkan pengembangan wilayah perkotaan Mamminasata dan kota sedang Palopo dan Parepare.</p> <p>Memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi</p>	<p>pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata dan kota sedang Palopo dan Parepare dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi.</p> <p>Memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistik dan perekonomian.</p>	<p>baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.</p>	<p>dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan infrastruktur konektivitas yang tangguh iklim.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		aktivitas logistic dan perekonomian.			
		Penguatan dukungan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global, serta pengembangan pelabuhan makassar sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia	Percepatan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global, serta penguatan peran pelabuhan makassar sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia	Perluasan pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global, serta perluasan peran pelabuhan makassar sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia	Perwujudan Sulsel sebagai hub ekonomi melalui pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global, serta optimalnya peran pelabuhan makassar sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia
7. Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman,	Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, permukiman dan lingkungan serta infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan	Pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, permukiman dan lingkungan serta infrastruktur dasar	Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mampu menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan yang	

		<p>konsolidasi reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi</p>	<p>air layak minum, sanitasi aman, percepatan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pada tahap ini perlu lebih diperhatikan terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi (kepulauan dan daerah sulit), untuk mendukung peningkatan daya saing yang merata antar kawasan perkotaan dan perdesaan serta daratan dan kepulauan. Pada tahap ini dilakukan pula akselerasi pencapaian pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim</p>	<p>termasuk listrik dengan micro grid, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, perluasan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pada tahap ini lebih memperluas upaya dan memantapkan implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran</p>	<p>terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, serta terwujudnya lingkungan yang berkualitas mendukung pencapaian net zero emission, dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim,</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dan mitigasi perubahan iklim		lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati.	
	8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Konsolidasi untuk penguatan dan pengembangan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah, dan pengembangan lingkup dan jenis kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala nasional dan global	Perwujudan Sulawesi Selatan yang memiliki produktivitas daerah yang tinggi dan berdaya saing Nasional dan Global

## 5.2. SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 ditetapkan **10 (sepuluh) sasaran pokok** dengan **17 (tujuh belas) arah pembangunan** daerah Sulawesi Selatan (17 Sulawesi Selatan/17SS), dan dijabarkan lebih lanjut dalam **201 arah kebijakan transformasi**. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan **indikator utama pembangunan** sebagai ukuran kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Gambaran keterkaitan misi, sasaran pokok dan arah pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V. 2.**  
**Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

Misi	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
1	2	3
<b>Mewujudkan Transformasi Sosial</b>	1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sulawesi Selatan yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera	SS01. Kesehatan untuk Semua
		SS02. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		SS03. Perlindungan Sosial yang Adaptif
<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi</b>	2. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin	SS04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital	SS05. Penerapan Ekonomi Hijau
	4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	SS06. Transformasi Digital
<b>Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan</b>	5. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan	SS07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		SS08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
<b>Mewujudkan Transformasi Tata kelola</b>	6. Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berintegritas dan adaptif	SS09. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
<b>Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan</b>	7. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	SS10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Misi	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
1	2	3
stabilitas ekonomi makro daerah.		SS11. Stabilitas Ekonomi Makro
Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	8. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	SS12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	9. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	SS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		SS14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		SS15. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
Mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	10. Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim, didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	SS16. Lingkungan Hidup Berkualitas
		SS17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Selanjutnya, penjelasan setiap sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1. Sasaran 1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sulawesi Selatan yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai sumberdaya manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumberdaya manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera difokuskan pada **tiga arah pembangunan** yaitu Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Berikut penjelasan arah pembangunan dimaksud beserta arah kebijakan transformasinya.

#### SS01. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Transformasi pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk semua di Sulawesi Selatan dapat dicapai jika beberapa prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya infrastruktur kesehatan

(fasilitas kesehatan dan alat kesehatan) yang memadai di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan yang didukung dengan regionalisasi layanan kesehatan, tersedianya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri Kesehatan

**Arah kebijakan transformasi** untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Sulawesi Selatan dua puluh tahun ke depan adalah: 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat di provinsi dan di seluruh kabupaten /kota, 2) Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana yang berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan guna mendukung pola hidup sehat yang dilengkapi dengan pemenuhan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis, 3) Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah sulit akses, 4) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen, 5) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisector, 6) Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor, 7) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam, 8) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat local yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses, 9) Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah Kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim, 10) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat, dan 11) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

## **SS02. Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Kebijakan pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan termasuk pendidikan tinggi serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. **Arah kebijakan transformasi** untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata untuk dua puluh tahun ke depan adalah : 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, 2) Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi, 3) Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah seperti pertambangan, pertanian, industri pengolahan hasil pertambangan, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata, 4) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang

modern dan adaptif, 5) Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, 6) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan dan terpencil, dan penyediaan asrama siswa dan guru 7) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, 8) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT), dan 9) Mendorong peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.

### **SS03. Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Selatan. **Arah kebijakan transformasi** untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif di Sulawesi Selatan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional, 2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial, 3) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, 4) Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya, 5) Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, 6) Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan, 7) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, 8) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah, 9) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan, dan 10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi.

Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sulawesi Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 3.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sulawesi**  
**Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah		
				2025	2045	
1	2	3	4	5	6	
1.	Terwujudnya sumberdaya manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera	1. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18	
			2. Kesehatan Ibu dan Anak			
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	16	
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,1	
			3. Penanganan Tuberkulosis:			
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	95	
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,54	98	
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	
			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata			
			5. Hasil Pembelajaran:			
		a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
		i) Literasi Membaca	8,33-12,50	66,67 – 70,83		
		ii) Numerasi	0,00 – 4,17	58,33 – 62,50		
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
i) Literasi Membaca	31,61–33,61	69,55 – 71,55				
ii) Numerasi	25,30–27,30	61,50 – 63,50				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	11,97 – 12,02
			d) Harapan Lama Sekolah	13,80-13,81	15,27 – 15,31
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,81	12,81 – 13,96
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90,00
		<b>3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 – 7,89	0,19 – 0,69
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5-45,0	79,22
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	50

### 5.2.2. Sasaran 2. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi berbasis Iptekin

Perwujudan sasaran pokok ini dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, utamanya peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi berbasis Iptekin difokuskan **satu arah pembangunan** yaitu Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

#### **SS04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

Peningkatan produktivitas ekonomi Sulawesi Selatan dilakukan secara optimal berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau. **Arah kebijakan transformasi** untuk mewujudkan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada :

- 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya,
- 2) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya),

3) Penerapan . . .

3) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan, 4) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism), 5) Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), 6) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, 7) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, 8) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja, 9) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 10) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri. 11) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, dan 12) Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Iptekin tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 4.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai**  
**Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi berbasis Iptekin Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah			
				2025	2045		
1	2	3	4	5	6		
2	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95 – 13,05	18,62– 19,92		
			12. Pengembangan Pariwisata				
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,40		
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	195,55		
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif thd PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	2,68	2,97		
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				

a) Proporsi . . .

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	10,24	13,08
			b) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,46	3,38
			c) Rasio Kewirausahaan daerah (%)	3,53	10.02
			d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	4,82
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62
			f) Nilai Tukar Petani Pangan	98	115-117
			g) Nilai Tukar Nelayan	112	120-122
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80 – 4,10	2,63–3,64
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	80
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7
			17. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	4,5 – 4,9

### 5.2.3. Sasaran 3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan pendukung IKN berbasis Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional perlu menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya. Penerapan pembangunan ekonomi hijau yang didukung transformasi digital, akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital difokuskan pada **dua arah pembangunan** yaitu Penerapan Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital. Arah Pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya adalah sebagai berikut:

### **SS05. Penerapan Ekonomi Hijau**

Perwujudan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dalam dua puluh tahun kedepan dioptimalkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau agar peningkatan produktivitas komoditas pangan tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Arah pembangunan penerapan ekonomi hijau ini diperkuat oleh penerapan ekonomi biru. **Arah kebijakan transformasi** dalam rangka penerapan ekonomi hijau adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan berbasis keunggulan wilayah, 2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, 3) Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan, 4) Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut, 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif, 6) Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan, 7) Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman local, 8) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam, 9) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, terutama berbasis sumberdaya perairan, untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, serta pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan, dan 10) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.

### **SS06. Transformasi Digital**

Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang dapat mendukung perekonomian Sulawesi Selatan. **Kebijakan** untuk membangun **transformasi** digital yang handal di Sulawesi Selatan diarahkan pada: 1) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan, 2) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok, 3) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis, dan 4) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Pendukung IKN berbasis Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 5.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai**  
**Lumbung Pangan Pendukung IKN berbasis Ekonomi Hijau dan**  
**Transformasi Digital**  
**Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a) Indeks Ekonomi Hijau	67,8	77,03
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,80	79,69	
		6. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7

#### 5.2.4. Sasaran 4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional

Posisi geostrategis Sulawesi Selatan merupakan potensi besar untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia sekaligus Nasional. Perwujudan sasaran ini difokuskan pada **satu arah pembangunan** yaitu Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Berikut penjelasan arah pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya.

##### **SS07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Arah pembangunan integrasi domestik dan global dimaksudkan untuk menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai hub perdagangan KTI dan Internasional. **Arah kebijakan transformasi** untuk menguatkan posisi Sulawesi Selatan dalam perekonomian domestik dan global adalah : 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi, 2) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya, 3) Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (global supply chain), 4) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi, 5) Pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, 6) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi, dan 7) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar

wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 6.**

**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
4.	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi	8,67	5,25
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,92
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9

**5.2.5. Sasaran 5. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Penggerak Agropolitan**

Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan mengacu pada upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai basis utama pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan berfokus pada pengembangan kawasan yang menggabungkan aktivitas agrikultur dengan kegiatan ekonomi non-pertanian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata antara perkotaan dan perdesaan. Perwujudan sasaran ini difokuskan pada **satu arah pembangunan** yaitu Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Arah pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya dijelaskan sebagai berikut :

**SS08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkotaan maupun perdesaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Sulawesi Selatan. Pentingnya mempertimbangkan kedua wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan pembangunan yang memperhatikan baik perkotaan maupun perdesaan akan membantu menyeimbangkan distribusi ekonomi, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk.

**Arah kebijakan transformasi** pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi meliputi : 1) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital, 2) Pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas, 3) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara), 4) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk

sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang, 5) Mendorong pengembangan bandara utama Sultan Hasanuddin yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity, 6) Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan, 7) Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis antara perdesaan dan perkotaan, 8) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda, 9) Mendorong percepatan pembangunan jalan tol dan penyelesaiannya Trans Sulawesi, 10) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan PKW (Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene Kepulauan, Jenepono dan Bulukumba) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, 11) Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV), terutama di kawasan perkotaan dan metropolitan, 12) Pengembangan transportasi di perdesaan dan perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang, 13) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya, kondisi geografis, dan wilayah, terutama di pesisir dan kepulauan, dan perdesaan. 14) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan, 15) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, 16) Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan, perdesaan, dan sekitar wilayah pertumbuhan, 17) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi public, 18) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Penggerak Agropolitan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 7.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai**  
**Penggerak Agropolitan Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
5	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan Mamminasata terhadap nasional	1,47	1,81
			b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100
			c) Persentase desa mandiri	0,75	9,93

#### 5.2.6. Sasaran 6. Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang Berintegritas dan Adaptif

Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berintegritas dan adaptif adalah sebuah pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan zaman. Perwujudan sasaran ini difokuskan pada **satu arah pembangunan** yaitu Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

##### **SS09. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif**

Tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, transparansi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta penggunaan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, dan merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pemerintahan. **Arah kebijakan transformasi** tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif terdiri dari : 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah, 2) Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi, 3) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah, 4) Penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) dan WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi, 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelebagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, 6) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 7) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi,

8) Peningkatan . . .

8) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah, 9) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 10) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, 11) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, 12) Peningkatan transparansi dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, 13) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, 14) Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government, 15) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, 16) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, 17) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, dan 18) Pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara berkesinambungan antar periode pembangunan.

Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 8.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan**  
**yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
6	Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berintegritas dan adaptif	9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	24. Indeks Reformasi Hukum	79,9	100
			25. Indeks SPBE	3,2	5
			26. Indeks Pelayanan Publik	4,41	5
			27. Indeks Integritas Nasional	73,95	89,08

### **5.2.7. Sasaran 7. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah Aman, Demokratis dan Stabil**

Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis, dan stabil mencerminkan upaya yang terus menerus untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Penegakan hukum yang kuat, proses demokrasi yang transparan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat mengantarkan Sulawesi Selatan menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. Perwujudan sasaran Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil difokuskan pada **dua arah pembangunan** yaitu Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan; dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut :

#### **SS10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

**Ketaatan hukum, ketertiban, keamanan**, dan demokrasi substansial merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. **Arah kebijakan transformasi** ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh, dan demokrasi substansial adalah : 1) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif , 2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial, dan 3) Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah, 4) Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi, 5) Peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, dan 6) Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

#### **SS11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**

**Stabilitas ekonomi makro daerah** adalah kondisi perekonomian Sulawesi Selatan yang mampu berjalan dengan baik tanpa mengalami fluktuasi yang tajam dan tidak terduga. Stabilitas ekonomi makro daerah adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Arah kebijakan transformasi** untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah terdiri dari : 1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD), 2) Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, 3) Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah, 4) Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (green financing), pendanaan biru (blue financing), dan pembiayaan alternatif lainnya, 5) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota, dan 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah Aman, Demokratis dan Stabil tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 9.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah Aman, Demokratis dan Stabil Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
7	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
			29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	64,53 (2020)	81,91
			30. Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi
		11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	0,9
			32. Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,8	1,1 - 3,2
			33. Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan		
			a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	61,6
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91
			c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi	2.718.532,8	29.931.570,98
			d. Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4
34. Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04			

### 5.2.7. Sasaran 8. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Daya Saing yang Optimal

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal memerlukan kombinasi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, stabilitas ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal difokuskan pada **satu arah pembangunan** yaitu Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

#### SS12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

**Kerjasama antar daerah** dan **daya saing daerah yang tinggi** merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Selatan. **Kebijakan transformasi** dalam rangka peningkatan Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah yang tinggi **diarahkan** pada: 1) Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah, 2) Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global, dan 3) Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Daya Saing yang Optimal tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V. 10.

**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Daya Saing yang Optimal Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
8	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	60	90
			36. Indeks Ketahanan Nasional	3,04	4,04

### 5.2.8. Sasaran 9. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi

Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi adalah sebuah kondisi dimana masyarakat Sulawesi Selatan memiliki hubungan yang harmonis dan kuat antar individu dan kelompok, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik secara efektif, mencakup pula

keberhasilan dalam memelihara dan menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai tradisional yang memperkaya identitas daerah, serta masyarakat Sulawesi Selatan mampu mengembangkan praktik berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada **tiga arah pembangunan** yaitu Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; serta Berketahanan Energi, Air, dan Pangan, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut:

### **SS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menunjukkan integrasi harmonis antara agama yang dimaknai dalam konteks manfaat bersama (maslahat) dan pembangunan budaya yang progresif dan inklusif. Tidak hanya tentang menjalankan praktik keagamaan dengan benar tetapi juga mengembangkan dan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. **Kebijakan transformasi** untuk beragama maslahat dan berkebudayaan maju **diarahkan** pada : 1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, 2) Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya, 3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi, 4) Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat, 5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, 6) Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 7) Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya, 8) Penguatan kerukunan antar umat beragama, 9) Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika, 10) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dan 11) Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.

### **SS14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menunjukkan sebuah tatanan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan meraih potensinya sepenuhnya, serta dapat mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan yang lebih besar. **Kebijakan transformasi** untuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif **diarahkan** pada : 1) Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local, 2) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, 3) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, 4) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan,

pembentukan . . .

pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, 5) Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, 6) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector, 7) Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative, 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, 9) Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, 10) Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi, dan 11) Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.

### **SS15. Berketahanan Energi, Air dan Pangan**

Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan hal penting dalam konteks keberlanjutan dan keberhasilan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan sumber daya vital untuk kehidupan manusia. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk membangun masyarakat Sulawesi Selatan yang stabil dan sejahtera. **Kebijakan transformasi** untuk ketahanan energi, air dan pangan **diarahkan** pada : 1) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food Energy Water (FEW) Nexus, 2) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, 3) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, 4) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, 5) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia, 6) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, 7) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan, 8) Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi, 9) Peningkatan kapasitas energi Listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, terutama yang berbasis sumberdaya perairan, 10) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga terutama di pesisir dan pulau, dan sektor transportasi; 11) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, pengembangan skema skema pendanaan dan pembiayaan kelistrikan yang diikuti kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, 12) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain, 13) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 14) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan, 15) Persiapan Lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah yang terpusat di wilayah perkotaan, berkinerja baik dan optimal, 16) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, 17) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau terkena dampak bencana, 18) Penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas, 19) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting, 20) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air, 21) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat, 22) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal, dan 23) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.

Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 11.**

**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Daerah dengan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tinggi Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
9	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43-56,51	65,44-66,14
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14-77,16	84,61-84,83
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34-70,35	75,33-75,42
			b) Indeks Perlindungan Anak	61,37-62,48	74 - 85
			c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,67-55,42	69 - 75
			40. Indeks Ketimpangan Gender	0,348-0,344	0,163-0,122
		15. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
			a. Ketahanan Energi		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
				2025	2045
1	2	3	4	5	6
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.015	5.335
			ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	298	338
			b. Ketahanan Pangan		
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42
			c. Ketahanan air		
			i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,30	12,26
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	100

**5.2.9. Sasaran 10. Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi yang Tinggi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, didukung Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas**

Sulawesi Selatan dapat meningkatkan ketahanannya terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi, serta pengelolaan risiko yang proaktif. Hal ini akan melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada **dua arah pembangunan** yaitu Lingkungan Hidup Berkualitas, dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut :

**SS16. Lingkungan Hidup Berkualitas**

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi di mana lingkungan alam dan sosial mendukung kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem, bukan hanya tentang kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. **Kebijakan transformasi** dalam rangka menciptakan lingkungan hidup berkualitas di Sulawesi Selatan **diarahkan** pada: 1) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat, 2) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, 3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana, 4) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi, 5) Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, 6) Mendukung

peningkatan . . .

peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan, 7) Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan local, 8) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan, 9) Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kab/kota dan kewenangan tata ruang laut dan kawasan hutan lindung, 10) Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan, 11) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai, 12) Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, 13) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Sulawesi Selatan, 14) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 15) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, 16) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, 16) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan, 17) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan, 18) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, dan 19) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah.

### **SS17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk tidak hanya bertahan hidup saat terjadi bencana atau perubahan iklim, tetapi juga untuk pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan terhadap dampak masa depan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Secara keseluruhan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bukan hanya tentang respons terhadap krisis saat terjadi, tetapi juga tentang upaya preventif, adaptasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan di masa depan. **Kebijakan transformasi** untuk mencapai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Sulawesi Selatan **diarahkan** pada: 1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, 2) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, 3) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai, 4) Pengembangan Flood Forecasting Warning System, 5) Mendukung perlindungan Makassar dari banjir kala ulang 100 tahun, 6) Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi, 7) Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim, 8) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian

berkelanjutan . . .

berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 9) Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim, 10) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim, 11) Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, 12) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 13) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim, 14) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, 15) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon, 16) Peningkatan rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal, 17) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 18) Peningkatan rehabilitasi pesisir dan laut, 19) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, 20) Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (green financing) dan pembiayaan alternatif lainnya , 21) Penerapan efisiensi energy dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi, dan 22) Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.

Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi yang Tinggi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Tinggi, didukung Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

**Tabel V. 12.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama**  
**Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan**  
**Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi yang Tinggi Terhadap Bencana dan**  
**Perubahan Iklim, didukung Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang**  
**Berkualitas**  
**Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah			
				2025	2045		
1	2	3	4	5	6		
10.	Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim, didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	16. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,634		
			42. Kualitas Lingkungan Hidup				
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,60	84,75		
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	60		
			c. Pengelolaan Sampah				
			i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90		
			ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35	100		
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana	135,46	115,36-98,11		
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
			a. Kumulatif	6,53	32,56		
b. Tahunan	12,82		69,93				

Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan berikut arah kebijakan transformasi dan indikator utamanya serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2045, secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

**Tabel V. 13.**  
**Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Terwujudnya sumberdaya manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera</b>	<b>1. Kesehatan Untuk Semua</b>	1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat di provinsi dan di seluruh kabupaten /kota	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18
			2) Pemenuhan sarana prasarana termasuk regionalisasi layanan kesehatan yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	16
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,1
			3) Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah sulit akses	3. Penanganan Tuberkulosis		
			4) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	95
			5) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisector,	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,54	98
6) Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5			
7) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			8) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat local yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses			
			9) Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.			
			10) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat			
			11) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)			
		<b>2. Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>	1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	5. Hasil Pembelajaran:		
			2) Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat keberkerjaan tinggi	a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
			3) Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah seperti pertambangan, pertanian, industri pengolahan hasil pertambangan, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata	i) Literasi Membaca	8,33-12,50	66,67-70,83
				ii) Numerasi	0,00-4,17	58,33-62,50
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			4) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	i) Literasi Membaca	31,61-33,61	69,55-71,55
				ii) Numerasi	25,30-27,30	61,50-63,50
			5) Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	11,97 – 12,02
				d) Harapan Lama Sekolah	13,80-13,81	15,27-15,31
			6) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan dan terpencil, dan penyediaan asrama siswa dan guru	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,81	12,81 – 13,96
				7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90,00
			7) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja			
			8) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT)			
			9) Mendorong peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3			
		<b>3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>	1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek),	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19 – 0,69

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional			
			2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5-45,0	79,22
			3) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	50
			4) Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya			
			5) Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas			
			6) Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan			
			7) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu			
			8) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah			
			9) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan			
			10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi.			
2	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62 – 19,92
				12. Pengembangan Pariwisata		
			2) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,40
			3) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	195,55
			4) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)			
5) Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif thd PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)	2,68	2,97			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)			
			6) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	10,24	13,08
			7) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	b) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,46	3,38
			8) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja	c) Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,53	10,02
			9) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	4,82
			10) Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62
			11) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	f) Nilai Tukar Petani Pangan	98	115-117
				g) Nilai Tukar Nelayan	112	120-122
				15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			12) Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80-4,10	2,63-3,64
				b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	80
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,30	64,70
				17. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	4,5-4,9
3	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau	1) Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan berbasis keunggulan wilayah	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah			
			3) Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan	a) Indeks Ekonomi Hijau	67,8	77,03
			4) Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,80	79,69
			5) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif			
			6) Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan			
			7) Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman local			
			8) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			9) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, terutama berbasis sumberdaya perairan, untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, serta pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan			
			10) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia			
		<b>6. Transformasi Digital</b>	1) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,0	7,7
			2) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok			
			3) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis			
			4) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
4.	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi	20. Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi	8,67	5,25
			2) Perbaiki sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,92
			3) Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (global supply chain)	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9
			4) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi			
			5) Pemanfaatan ALKI II disisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global			
			6) Pengembangan pelabuhan makassar sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia			
			7) Pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal <i>RoRo (Roll-On/Roll-Off)</i> angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi,			
			8) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
5	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
			2) Pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan Mamminasata terhadap nasional	1,47	1,81
			3) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100
			4) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang	c) Persentase desa mandiri	0,75	9,93
			5) Mendorong pengembangan bandara utama Sultan Hasanuddin yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity			
			6) Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan			
			7) Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis antara perdesaan dan perkotaan			
			8) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda			
			9) Mendorong percepatan pembangunan jalan tol dan penyelesaiannya Trans Sulawesi			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			10) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan PKW (Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene Kepulauan, Jeneponto dan Bulukumba) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung			
			11) Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV), terutama di kawasan perkotaan dan metropolitan			
			12) Pengembangan transportasi perdesaan dan perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang			
			13) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, dan perdesaan			
			14) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan			
			15) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh			
			16) Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			17) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi public			
			18) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berintegritas dan adaptif	9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	24. Indeks Reformasi Hukum	79,9	100
			2) Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2	5,0
			3) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah	26. Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,00
			4) Penyediaan NGWF (Firewall Jaringan) dan WAF (Firewall Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	27. Indeks Integritas Nasional	73,95	89,08
			5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			6) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi			
			7) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi			
			8) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah			
			9) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi			
			10) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi			
			11) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			12) Peningkatan transparansi dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan			
			13) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan			
			14) Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government			
			15) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah			
			16) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional			
			17) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.			
			18) Pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara kesinambungan antar periode pembangunan			
7	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil	10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	1) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif	28. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
			2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	64,53	81,91

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			3) Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah	30. Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi
			4) Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi			
			5) Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah			
			6) Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten			
		<b>11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	0,9
			2) Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	32. Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,8	1,1 - 3,2
				33. Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	61,6
			3) Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91
			4) Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (green financing), pendanaan biru (blue financing), dan pembiayaan alternatif lainnya	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita per Provinsi (Rp)	2.718.532,8	29.931.570,98
		5) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	d) Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	34. Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04
8	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	1) Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah	35. Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	60	90
			2) Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global			
			3) Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.	36. Indeks Ketahanan Nasional	3,04	4,04
9	Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43-56,51	65,44-66,14
			2) Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya			
			3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi			
			4) Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat			
			5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan			
			6) Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			7) Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya			
			8) Penguatan kerukunan antar umat beragama	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14-77,16	75,33-75,42
			9) Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika			
			10) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.			
			11) Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama			
		<b>14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>	1) Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local	39. a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34-70,35	75,33 – 75,42
			2) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	b) Indeks Perlindungan Anak	61,37-62,48	74 - 85
				c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,67-55,42	69 - 75
				40. Indeks Ketimpangan Gender	0,348-0,344	0,163-0,122
				3) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			4) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang			
			5) Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan			
			6) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector			
			7) Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative			
			8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan			
			9) Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			10) Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi			
			11) Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.			
		<b>15. Berketahanan Energi, Air dan Pangan</b>	1) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food Energy Water (FEW) Nexus	41. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
			2) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik	a) Ketahanan Energi		
			3) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.015	5.335
			4) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	298	338
			5) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia	b) Ketahanan Pangan		
			6) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42
			7) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	c) Ketahanan air		
			8) Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	3,3	12,26

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			9) Peningkatan kapasitas energi Listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, terutama yang berbasis sumberdaya perairan	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	100
			10) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga terutama di pesisir dan pulau, dan sektor transportasi			
			11) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan kelistrikan yang diikuti kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi			
			12) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain			
			13) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air			
			14) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan			
			15) Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal			
			16) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			17) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil atau terkena dampak bencana			
			18) Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas			
			19) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.			
			20) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air			
			21) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat			
			22) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal			
			23) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum			
10.	<b>Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap</b>	<b>16. Lingkungan Hidup Berkualitas</b>	1) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat	42. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,634
			2) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	43. Kualitas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
	<b>bencana dan perubahan iklim, didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas</b>		3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,60	84,75
			4) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	60,00
			5) Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah	c) Pengelolaan Sampah		
			6) Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90
			7) Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan local	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35	100
			8) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi darat dan perairan			
			9) Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kab/kota dan kewenangan tata ruang laut dan kawasan hutan lindung			
			10) Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			11) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, agar dapat berfungsi kembali dan berdaya guna serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai			
			12) Peningkatan kualitas air, udara ,pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.			
			13) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Sulawesi Selatan			
			14) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan			
			15) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman			
			16) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir			
			17) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke perairan			
			18) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			19) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah			
		<b>17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>	1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana	44. Indeks Risiko Bencana	135,46	115,36-98,11
			2) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			3) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.	a) Kumulatif	6,53	32,56
			4) Pengembangan Flood Forecasting Warning System.	b) Tahunan	12,82	69,93
			5) Mendukung perlindungan Makassar dari banjir kala ulang 100 tahun.			
			6) Perlindungan pulau pulau kecil dari risiko abrasi			
			7) Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.			
			8) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian			
			9) Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim			
			10) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			11) Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian			
			12) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			
			13) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim			
			14) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana			
			15) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon			
			16) Peningkatan rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal			
			17) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian			
			18) Peningkatan rehabilitasi pesisir dan laut, 19) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah,			
			19) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah			
			20) Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau ( <i>green financing</i> ) dan pembiayaan alternatif lainnya			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
					2025	2045
1	2	3	4	5	6	7
			21) Penerapan efisiensi energy dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi			
			22) Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.			

Selanjutnya, untuk memberikan arahan pencapaian target indikator pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator pembangunan setiap periode 5 tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 sebagai berikut:

**Tabel V. 14.**  
**Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok**

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
			2025	2029	2034	2039	2045	
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	
1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera	Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	74,87	76,22	77,56	79,18
		2	Kesehatan Ibu dan Anak					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	96,8	71,55	46,3	16
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	19,45	15	10,55	6,1
		3	Penanganan Tuberkulosis:					

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	83	87	91	95
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,54	93,15	94,76	96,37	98
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98,37	98,74	99,11	99,5
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk				
	i) Literasi Membaca			8,33-12,50	21,20-23,20	36,35-38,35	51,49-53,49	66,67-70,83
	ii) Numerasi			0,00-4,17	12,3-14,4	26,68-29,68	43,05-45,05	58,33-62,50
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk							
	i) Literasi Membaca			31,61-33,61	41,09-43,09	50,57-52-54	60,05-62,02	69,55-71,55

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
			ii) Numerasi	25,30-27.30	34,35-36-35	43,40-45,40	52,45-54,45	61,50-63,50
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	9,97-9,98	10,60-10,62	11,22-11,23	11,97-12,02
			d) Harapan Lama Sekolah	13,80-13,81	14,09-14,11	14,46-14,49	14,83-14,86	15,27-15,31
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,81	12,81 – 13,04	12,81 – 13,33	12,81 – 13,62	12,81–13,96
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	79,93	83,28	86,63	90
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	5,60-6,1	3,90-4,3	2,20-2,5	0,19 – 0,69
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5-45,0	53,18-53,55	61,86-62,11	70,51-70,66	79.22
		10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	27,15	34,29	41,43	50
<b>2. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lokomotif</b>	4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	14,37-14,77	15,78-16,48	17,19-18,19	18,62–19,92
		12	Pengembangan Pariwisata					
		a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	1,73	1,95	2,F17	2.4

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
<b>pertumbuhan ekonomi berbasis Iptekin</b>			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	101,69	131,02	160,35	195,55
		13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	2,68	2,75	2,82	2,89	2,97
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	10,24	10,95	11,66	12,37	13,08
			b) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,46	1,94	2,42	2,9	3,38
			c) Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,53	4,83	6,45	8,07	10,02
			d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	1,76	2,77	3,78	4,82
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	1,9	3,06	4,23	5,62
			f) Nilai Tukar Petani Pangan	98	102	107	110	115-117
			g) Nilai Tukar Nelayan	112	115	117	119	120-122
		15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik					

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,80-4,10	3,50-3,97	3,21-3,86	2,92-3,75	2,63 – 3,64
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	49,25	59,5	69,75	80
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	56,38	58,98	61,58	64,7
		17	Tingkat Penguasaan IPTEK					
			Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	3,9 – 4,0	4,1 – 4,3	4,3 – 4,6	4,5 – 4,9
<b>3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital</b>	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a) Indeks Ekonomi Hijau	67,8	69,65	71,95	74,26	77,03
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Prime	35,80	59,02	65,48	71,94	79,69
	6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	6	6,34	6,77	7,19	7,7
<b>4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur</b>	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	8,67	7,99	7,13	6,28	5,25
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,28	38,49	38,7	38,92
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	8,3	9,8	11,3	12,9

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
<b>Indonesia dan Internasional</b>								
<b>5. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai penggerak agropolitan</b>	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	1,47	1,54	1,62	1,71	1,81
			b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	87,85	100	100	100
			c) Persentase desa mandiri	0,75	2,59	4,88	7,18	9,93
<b>6. Terwujudnya Pemerintahan Sulawesi Selatan yang berintegritas dan adaptif</b>	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	79,9	84,9	89,9	94,9	100
		25	Indeks SPBE	3,2	3,6	4,1	4,5	5
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,41	4,55	4,69	4,83	5
		27	Indeks Integritas Nasional	73,95	76,98	80,76	84,55	89,08
<b>7. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah aman, demokratis dan stabil</b>	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	77,5	85	92,5	100
		29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	64,53	68,01	72,35	76,7	81,91
		30	Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1	1,05	1	0,95	0,9
		32	Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,8	2,6-3,5	2,1-3,4	1,6-3,3	1,1 - 3,2

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
		33	Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan					
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	31,15	40,67	50,18	61,6
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,82	1,51	2,21	2,91
			c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita per Provinsi (Rp)	2.718.532,8	9.521.792	16.325.051	23.128.310	29.931.570.98
			d) Total Kredit/PDRB (%)	24,2	31,04	39,59	48,14	58,4
		34	Inklusi Keuangan (%)	94,46	95,38	96,52	97,67	99,04
<b>8. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan daya saing yang optimal</b>	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	60	65	80	85	90
		36	Indeks Ketahanan Nasional	3,04	3,24	3,49	3,74	4,04
<b>Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi</b>	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43-56,51	58,68-58,92	60,93-61,33	63,18-63,74	65,44-66,14
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14-77,16	79,00-79,08	80,86-80,99	82,72-82,91	84,61-84,83
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34-70,35	71,34-71,36	72,59-72,63	73,83-73,90	75,33 – 75,42
			b) Indeks Perlindungan Anak	61,37-62,48	63,8 – 66,50	67,1 – 71,6	72,5 – 74,7	75 - 85
			c) Indeks Pembangunan Pemuda	54,67-55,42	57,5 - 59	61,3 – 64,2	65,1 – 68,5	69 - 75

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
				2025	2029	2034	2039	2045
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
	15. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,348-0,344	0,301-0,291	0,255-0,235	0,209-0,177	0,163-0,122
		43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.015	2.095	3.175	4.225	5.335
			ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	298	306	316	326	338
			b) Ketahanan Pangan					
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	5,39	3,74	2,08	0,42
			c) Ketahanan air					
			i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,3	5,09	7,33	9,57	12,26
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	53,61	70	90	100
<b>10. Terwujudnya Sulawesi Selatan dengan kapasitas adaptasi dan</b>	16. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,556	0,581	0,605	0,634
		42	Kualitas Lingkungan Hidup					
		a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,6	79,38	81,16	82,94	84,75

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan		BaseLine	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
				2025	2029	2034	2039	2045	
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9	
mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim, didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas		b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	15	35	45	60	
		c)	Pengelolaan Sampah						
		i)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	35	53	70	90	
		ii)	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35	35	55	75	100	
	17.Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44		Indeks Risiko Bencana	135,46	130,43-126,12	125,41-116,78	120,38-107,45	122,30-98,59
		45		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
			a.	Kumulatif	6,53	9,27	14,47	21,74	32,56
			b.	Tahunan	12,82	20,1	35,63	50,98	69,93

### **5.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

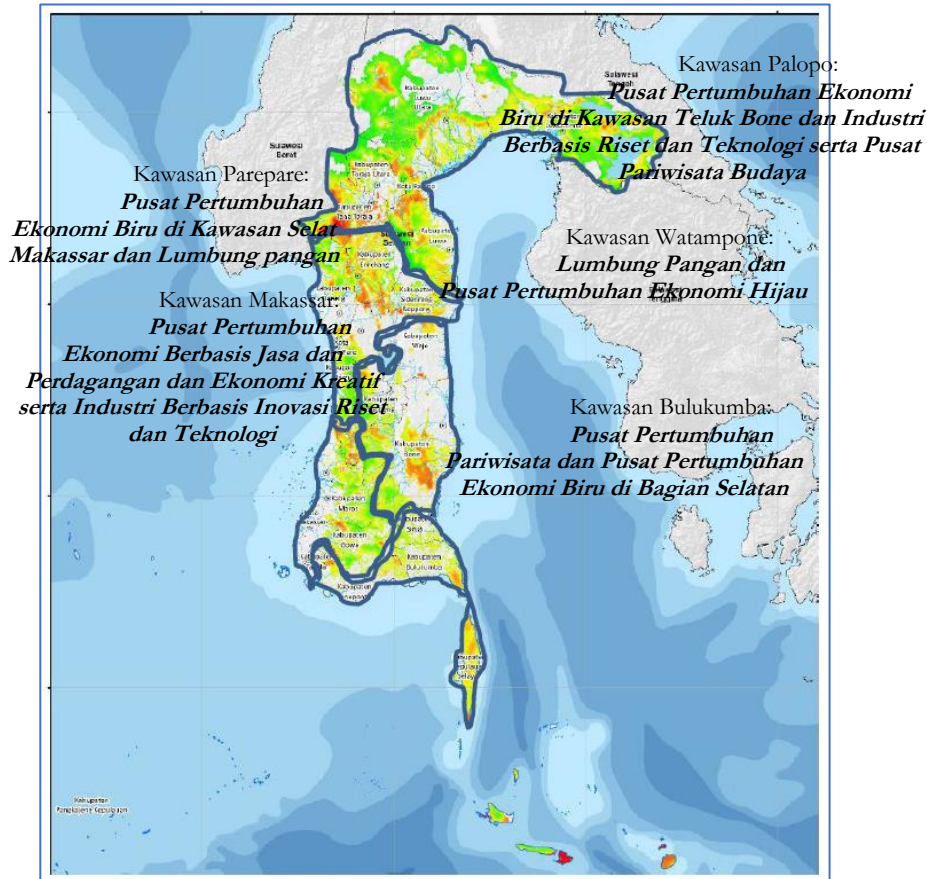
#### **5.3.1. Arah Kebijakan Transformasi Wilayah**

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi masih terdapat kesenjangan antar kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, maka pada setiap kawasan pembangunan, sebagaimana menjadi misi pembangunan jangka panjang nasional, akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Substansi transformasi dan landasan transformasi ini diterjemahkan kedalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing dengan derajat kesehatan yang tinggi dan merata, tingkat dan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata, serta standar hidup yang layak untuk semua. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai pendapatan yang tinggi melalui pengembangan kawasan pembangunan berdasarkan potensi wilayah, pengembangan ekonomi biru di kawasan andalan laut Teluk Bone dan Selat Makassar, penerapan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, diiringi dengan implementasi transformasi digital, penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA.

Tematik transformasi ekonomi berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan diarahkan sebagai berikut. Kawasan Makassar (Takalar, Gowa, Makassar, Maros, dan Pangkajene Kepulauan) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin. Kawasan Bulukumba (Jenepono, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Kawasan Watampone (Bone, Soppeng, dan Wajo) diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kawasan Palopo (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone, Pusat Pertumbuhan Industri Pengolahan SDA Mineral, serta Pusat Pariwisata Budaya. Kawasan Parepare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan berbasis pertumbuhan ekonomi hijau mendukung IKN.

**Gambar V. 2.**  
**Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Kawasan Pembangunan**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, daya saing daerah, serta keamanan dan ketertiban masyarakat pada seluruh kawasan pembangunan. Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian alih fungsi lahan hutan dan pertanian, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, pada seluruh kawasan pembangunan tersebut.

### **5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah**

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau, namun sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada

kabupaten . . .

kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan dan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

### **1. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Makassar**

Kawasan Pembangunan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2023 yaitu sebesar 50,01 persen. Ini disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kota Makassar sebesar 34,67 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Makassar adalah Kabupaten Takalar dengan kontribusi sebesar 1,97 persen. Kawasan Makassar berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional sekaligus sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional MAMMINASATA yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, dan simpul transportasi internasional.

Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Makassar bersumber dari letak geografi yang dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat Makassar. Di kawasan ini terdapat Kabupaten Takalar yang berperan sebagai kawasan industri strategis nasional dan merupakan bagian dari koridor Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Makassar diprioritaskan pada, **pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan yang diprioritaskan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

**Kedua**, meningkatnya produktivitas di sektor unggulan daerah yang didukung oleh digitalisasi ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dan UMKM serta membangun kemitraan dan kerjasama usaha; optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan wisata maritim di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy* untuk mendukung IKN; pengembangan kawasan UNESCO Global GeoPark sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik.

**Ketiga,** pengembangan komoditas unggulan pangan sebagai pendukung IKN berbasis prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru; membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi Kabupaten Takalar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Pangkajene Kepulauan untuk mendukung peran Kota Makassar sebagai pusat perdagangan barang dan/atau jasa berskala internasional, nasional dan regional serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas: pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan MAMMINASATA.

**Keempat,** perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**Kelima,** peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

**Keenam,** peningkatan kapasitas fiscal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

**Ketujuh,** peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata, peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

**Kedelapan,** peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah berbasis regional, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana, serta penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana

hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

## **2. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Bulukumba**

Kawasan Bulukumba memberikan kontribusi sebesar 10,17 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2023. Sumbangan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 2,88 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Kawasan Bulukumba adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kontribusi sebesar 1,22 persen. Kawasan Bulukumba berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis klaster pembangunan ekonomi biru seiring ditetapkannya DPP Pariwisata Selayar-Makassar-Toraja dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagai kawasan strategis Provinsi di kabupaten Kepulauan Selayar serta kawasan perikanan dan industri perikanan terpadu.

Kawasan pembangunan Bulukumba diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan**. Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Bulukumba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru bersumber dari letak geografi yang terletak di Laut Flores dan merupakan bagian dari kawasan andalan laut Teluk Bone. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM yang didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara.

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Bulukumba diarahkan pada prioritas sebagai berikut. **Pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan. Ini diprioritaskan pada kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai, Bulukumba, dan Jeneponto.

**Kedua**, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dengan mengembangkan kawasan industri strategis berbasis komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dan UMKM serta membangun kemitraan dan kerjasama usaha di Kabupaten Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi hijau berbasis komoditas pertanian hortikultura yang didukung oleh sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Bantaeng; pengembangan kawasan industri prioritas nasional di kabupaten Bantaeng; pengembangan kawasan Bulukumba dan Takabonerate sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fungsi Kawasan Taman Nasional

Takabonerate sebagai kawasan konservasi.

**Ketiga**, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, ekonomi biru, sirkuler dan berkelanjutan, membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.

**Keempat**, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**Kelima**, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

**Keenam**, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

**Ketujuh**, peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

**Kedelapan**, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler termasuk di wilayah pesisir dan kepulauan, penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana, serta penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, penguatan kawasan konservasi strategis nasional yaitu Kawasan Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar dan kawasan konservasi maritim strategis provinsi yaitu kawasan pembuatan perahu pinisi di Kabupaten Bulukumba termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, dan penguatan

pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

### **3. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone**

Kawasan Watampone memberikan kontribusi sebesar 13,21 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Wajo sebesar 3,76 persen, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Watampone Tahun 2023 adalah Kabupaten Soppeng dengan kontribusi sebesar 2,28 persen.

Kawasan Pembangunan Watampone diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Peran Kawasan Watampone sebagai lumbung pangan tidak hanya sebagai lumbung pangan regional namun juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan IKN, sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo serta bandar udara di Kabupaten Bone. Untuk itu, pengembangan Kawasan Watampone diarahkan pada prioritas berikut.

**Pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan. Ini diprioritaskan pada Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo.

**Kedua**, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan (khususnya sutera) yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan pengembangan sentra industri pengolahan komoditas perikanan di Kabupaten Bone.

**Ketiga**, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik

regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas.

**Keempat**, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**Kelima**, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

**Keenam**, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela

**Ketujuh**, peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

**Kedelapan**, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo; peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital serta pemanfaatan gas alam; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler serta penguatan kawasan konservasi yaitu Taman Wisata Alam di Kabupaten Bone dan Soppeng serta pengelolaan terpadu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan daerah sekitarnya.

#### **4. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Palopo**

Kawasan Palopo memberikan kontribusi sebesar 15,65 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2023 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,69 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Palopo adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi sebesar 1,43 persen.

Peluang kontribusi ekonomi kawasan Palopo bersumber dari kondisi geografis berupa pegunungan dengan kekayaan sumber daya alam diantaranya sumber daya mineral dan batuan yang melimpah serta sumber daya hutan dan ekosistem lautan yang merupakan bagian dari kawasan andalan laut Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur di kawasan Palopo

sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako berperan sebagai kawasan pertambangan strategis nasional dengan komoditas nikel yang melimpah. Selain itu kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yakni bagian dari koridor Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara terutama untuk angkutan barang dan angkutan pariwisata.

Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo diarahkan pada prioritas berikut. **Pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.

**Kedua**, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dan UMKM serta membangun kemitraan dan kerjasama usaha di Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*; pengembangan kawasan sentra pertanian dan perkebunan khususnya komoditas sagu sebagai bahan pangan alternatif yang didukung oleh sentra industri pengolahan; peningkatan produktivitas komoditas perkebunan unggulan wilayah, dan terkhusus untuk kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis ketaatan rencana tata ruang wilayah; serta pengembangan kawasan Toraja sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik.

**Ketiga**, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, ekonomi biru, sirkuler dan berkelanjutan, membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan

infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas.

**Keempat**, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**Kelima**, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

**Keenam**, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

**Ketujuh**, peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

**Kedelapan**, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas; peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler termasuk di wilayah pesisir, penguatan kawasan konservasi strategis yaitu Kawasan cagar alam dan Taman Wisata Alam Danau di kabupaten Luwu Timur, penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana, serta penguatan implementasi pembangunan rendah karbon dan penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

### **5. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Parepare**

Kawasan Parepare memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 10,95 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 3,84 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Parepare adalah Kota Parepare dengan kontribusi sebesar 1,42 persen.

Kawasan Parepare berposisi sebagai Kawasan Strategis Nasional Parepare yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan lumbung pangan yang diarahkan untuk mendukung IKN. Kawasan Parepare memiliki letak geografi yang strategis yaitu dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat Makassar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Kawasan Parepare diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Parepare diarahkan pada prioritas berikut.

**Pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang.

**Kedua**, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan pengembangan kawasan sentra industri komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dan UMKM serta membangun kemitraan dan kerjasama usaha di Kabupaten Enrekang, Sidenreng Rappang, Pinrang, dan Barru; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Pinrang dan Barru untuk mendukung IKN; pengembangan ekonomi hijau terutama pengembangan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan.

**Ketiga**, penguatan pembangunan berbasis pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, sirkuler dan berkelanjutan, membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas.

**Keempat**, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan

kemandirian fiscal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

**Kelima**, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

**Keenam**, peningkatan kapasitas fiscal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela

**Ketujuh**, peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

**Kedelapan**, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan .perkotaan Parepare serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkuler, penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, serta penguatan kawasan konservasi pesisir di kabupaten Barru serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan. RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan.

Dalam pelaksanaan RPJPD perlu memperhatikan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

### **1. Konsistensi Perencanaan**

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan calon anggota DPRD provinsi.

### **2. Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan

sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

### **3. Kerangka Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

### **4. Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembanguna daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

### **5. Mekanisme Perubahan RPJPD**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

### **6. Komunikasi Publik**

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang

dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

#### **7. Transisi Periode RPJPD**

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



FERWIN FIRMANSYAH, SH., MH  
NIP. 19821016 201101 1 003